

NYAPU

Bagaimana Perempuan dan Laki-laki Suku Balik Mengalami Kehilangan, Derita dan Kerusakan Berlapis Akibat Megaprojek Ibu Kota Baru Indonesia

JATAM Kalimantan Timur, 2023



NYAPU

**Bagaimana Perempuan dan Masyarakat Adat Balik
Mengalami Kehilangan, Derita dan Kerusakan
Berlapis Akibat Megaproyek Ibu Kota Baru Indonesia**

JATAM Kaltim, #BersihkanIndonesia, PuSHPA,

2023

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
I. Latar Belakang dan Metodologi	6
II. Sejarah dan Identitas di Bentang Alam Sepaku	12
II.a. Asal Usul dan Kosmologi Masyarakat Balik	
II.b. Pengetahuan Bercocok Tanam Suku Balik	
II.c. Kilas Sejarah Penamaan dan Administrasi Pada Bentang Sepaku	
II.d. Pengalaman Batin Para Transmigran di Tanah Harapan	
II.e. Pengalaman Para Perantau Lainnya	
3. Sejarah Penghancuran Berlapis Pada Bentang dan Ruang Hidup Masyarakat Adat Balik	35
III.a. Dari Gempuran Kolonial, Korporasi Hingga Ibu Kota Baru	
1. Terjungkalkan Kolonial	
2. Teror Gerombolan, Banjir Kap dan Orde Baru	
3. Gusur, Tebang dan Gali : Ekstraksi Kayu, Sawit Hingga Lubang Tambang	
III.b. Era Jokowi: Ibu Kota Baru, Legacy Untuk Oligarki	
1. Uang Publik untuk Menggusur	
2. Bancakan Bagi Aktor Oligarki Lokal, Nasional dan Global	
3. Karpet Merah Bagi Investor tetapi masih bergantung pada Dana Publik	
4. Perempuan Penjaga Ruang Hidup dan Rekaman Krisis Tak Berkesudahan di Dua Tapak Proyek	64
IV.a. Daya Rusak Akibat Proyek, Kehilangan, Derita dan Kerusakan pada Bentang Sungai Sepaku	
IV.b. Lenyapnya Obat-obatan Tradisional, Akar Kuning, Pasak Bumi dan Lemposu	
IV.c. Hilangnya Pengetahuan Perempuan : Atap Nipah, Lanjong dan Nyiruk	
IV.d. Putusnya Komunikasi dengan Ruh Leluhur : Jernang dan Batu-batu Situs Suku Balik	
IV.e. Daya Rusak Akibat Proyek, Kehilangan, Derita dan Kerusakan Pada Bentang Sungai Mentoyok atau Tengin	

KOTAK I: Beranak Pinak Proyek Bendungan Sepaku Semoi	88
5. Wilayah Lain yang Ikut Dikorbankan	96
a. Perluasan Perusakan IKN Atas Nama Reforma Agraria dan Bank Tanah	
6. Data yang Disembunyikan, Komponen dan Prakiraan Dampak	105
a. Kementerian PUPR Sembunyikan Informasi Bendungan Sepaku Semoi	
b. Berbagai Komponen Dalam Proyek Bendungan Sepaku Semoi	
KOTAK II: Modus Operasi Perampasan Tanah Warga	112
7. <i>Lex Mercatoria</i>, Bagaimana Produksi Kebijakan dan Hukum Menyokong Penghancuran	132
8. Desakan	140
9. Lampiran-Lampiran	142
10. Daftar Pustaka	143
Tim Penyusun	151
Tentang JATAM Kaltim	

Daftar Istilah dan Singkatan

1. ABRI = Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
2. ADB = Asian Development Bank
3. AMDAL = Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
4. ANDAL = Analisis Dampak Lingkungan
5. APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. APRIS = Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
7. ATR/BPN = Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
8. BPN = Badan Pertanahan Nasional
9. BWS = Balai Wilayah Sungai
10. CCSP = Corrugated Concrete Sheet Pile
11. CSR = Corporate Social Responsibility
12. DAS = Daerah Aliran Sungai
13. DI = Darul Islam
14. DKI = Daerah Khusus Ibu Kota
15. DTA = Daerah Tangkapan Air
16. HAKI = Hak Atas Kekayaan Intelektual
17. HGB = Hak Guna Bangunan
18. HPH = Hak Pengusahaan Hutan
19. IBM = Information Building Modelling
20. ICIJ = International Consortium of Investigative Journalist
21. IDB = Islamic Development Bank
22. IHM = ITCI Hutani Manunggal
23. IKN = Ibu Kota Negara
24. IPA = Instalasi Pengolahan Air
25. IPAL = Instalasi Pengolahan Air Limbah
26. IUPHHK-HA = Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam
27. KA = Kerangka Acuan
28. KIH = Kawasan Industri Hijau Indonesia
29. KIPP = Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
30. KK = Kepala Keluarga
31. KLHK = Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
32. KMB = Konferensi Meja Bundar
33. KPBU = Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
34. KSAD = Kepala Staf Angkatan Darat
35. LARAP = Land Acquisition and Resettlement Action Plan
36. LOI = Letter of Intent
37. MoU = Memorandum of Understanding
38. MW = Megawatt
39. PBB = Partai Bulan Bintang
40. PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri
41. PP = Peraturan Pemerintah
42. PPU = Penajam Paser Utara
43. PSN = Proyek Strategis Nasional
44. PT. TME = Perseroan Terbatas Tansri Madjid Energi
45. PT. BPEP = Perseroan Terbatas Bintang Prima Energi Pratama
46. PT. BS = Perseroan Terbatas Baramulti Suksesarana
47. PT. EMJ = Perseroan Terbatas Etam Manunggal Jaya
48. PT. IRP = Perseroan Terbatas Indo Ridlatama Power
49. PT. ITCI = Perseroan Terbatas International Timber Corporation Indonesia

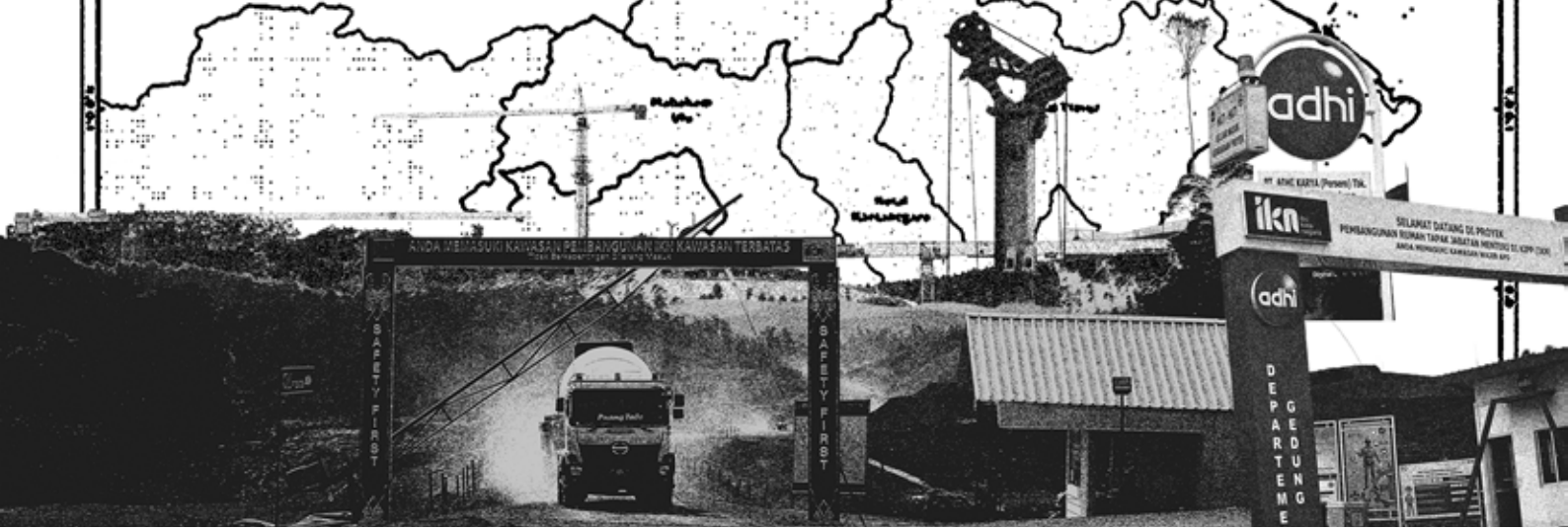
- 50. PT. MPP = Perseroan Terbatas Mutiara Panca
Pesona
- 51. PT. MSE = Perseroan Terbatas Mandiri
Sejahtera Energindo
- 52. PT. PAMS = Perseroan Terbatas Panca Artha
Mulia Serasi
- 53. PT. TBS = Perseroan Terbatas Toba Bara
Sejahtera
- 54. PT. TKA = Perseroan Terbatas Triteknik
Kalimantan Abadi
- 55. PT. EDP = Perseroan Terbatas Eka Dwi Panca
- 56. PUPR = Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
- 57. RIS = Republik Indonesia Serikat
- 58. RT = Rukun Tetangga
- 59. SD = Sekolah Dasar
- 60. SMP = Sekolah Menengah Pertama
- 61. TII = Tentara Islam Indonesia
- 62. TNI = Tentara Negara Indonesia
- 63. UUPA = Undang-Undang Pokok Agraria

Daftar Gambar

1. Gambar 1. Buah Sengkuang dan Buah Lemposu.
2. Gambar 2. Basri, memperlihatkan Bujoq Purun (tombak besi untuk berburu) yang diwariskan dari orang Tuanya.
3. Gambar 3. Cepok Loyang dan Grak, benda warisan dan biasa dipakai dalam Ritual Mulung.
4. Gambar 4. Ladang masyarakat Adat Balik di Sepaku
5. Gambar 5. Bunga, penari dan pemusik perempuan adat Balik dengan alat musik Gambus miliknya.
6. Gambar 6. Dahlia, perempuan berdarah suku Balik seorang penari Ronggeng
7. Gambar 7. Peta Partisipatif Wilayah Masyarakat Adat di Wilayah Sepaku.
8. Gambar 8. Hatta, transmigran dari Karawang Jawa Barat, yang saat ini menja di penduduk Desa Tengin.
9. Gambar 9. Tampak udara persawahan dan pemukiman transmigrasi di Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku
10. Gambar 10. Peta Bumi Wilayah Kesultanan Paser dan Kutai.
11. Gambar 11. Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) di Balikpapan.
12. Gambar 12. Aktivitas pengangkutan kayu di wilayah PT ITCI, Sumber foto JATAM Kaltim 2022.
13. Gambar 13. Plang PT ITCI Hutani Manunggal (IHM)
14. Gambar 14. Masyarakat adat Balik yang memprotes perampasan lahan mereka oleh ITCI Hutani Manunggal
15. Gambar 15. Peta konsesi pertambangan, perkebunan dan industri kehutanan di wilayah Ibu Kota Baru.
16. Gambar 16. Lubang tambang batu bara di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku bagian dari kawasan Ibu Kota Baru yang belum dipulihkan, milik PT. Mandiri Sejahtera Energindo.
17. Gambar 17. Peta Sebaran lubang Tambang di kawasan Ibu Kota Nusantara.
18. Gambar 18. Jokowi bersama menteri camping di Sepaku.
19. Gambar 19. Sukanto Tanoto (kiri) dan Hashim Djojohadikusumo pemilik PT ITCI Hutani Manunggal dan PT ITCI Kartika Utama
20. Gambar 20. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Brodjonegoro
21. Gambar 21. Aktor Global Tony Blair dan Mohammed bin Zayed.
22. Gambar 22. Nama Perusahaan yang melakukan Lol (*letter of Intent*).
23. Gambar 23. Proyek Intake Sungai Sepaku di Kelurahan Sepaku.

24. Gambar 24. Peta Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Sepaku Untuk Kawasan Sepaku, Tahun Anggaran 2021
25. Gambar 25. Peta lokasi proyek intake dan proyek penanganan banjir di Sungai Sepaku
26. Gambar 26. Dua perempuan keturunan suku Balik di nisan kayu kuburan ratusan tahun milik masyarakat Balik yang tergusur proyek Intake Sungai Sepaku
27. Gambar 27. Rapat akbar masyarakat Desa Lelong, Lombok Tengah untuk menolak Dam Mujur.
28. Gambar 28. Aksi bentang spanduk menolak penggusuran oleh proyek di Sungai Sepaku.
29. Gambar 29. Mustapa berada di dapur rumah, pandangannya kini terhalang tanggul Pembangunan Proyek Intake yang “memotong” sungai di belakang rumahnya
30. Gambar 30. Obat Air (Tawas) untuk menjernihkan air
31. Gambar 31. Tanaman Obat di Kampung Sepaku Lama, Daun Sembung dan Kumis Kucing
32. Gambar 32. Bece (55 tahun) menganyam Daun Nipah untuk membuat atap
33. Gambar 33. Baniah dan kerajinan Lanjong
34. Gambar 34. Sernin di rumahnya di Desa Bumi Harapan
35. Gambar 35. Lokasi Proyek Intake yang memotong Sungai Sepaku, di Kelurahan Sepaku
36. Gambar 36. Batu Badok
37. Gambar 37. Peta Bendungan Sepaku Semoi dan DAS Tengin
38. Gambar 38. Peta Lokasi Proyek di Luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
39. Gambar 39. Daftar Tabel Nama Proyek
40. Gambar 40. Infografis Tali-temali proyek
41. Gambar 41. Sungai Tengin atau Sungai Mentoyok di Desa Tengin Baru RT 15
42. Gambar 42. Gerbang Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru
43. Gambar 43. Pelabuhan bongkar muat material IKN Desa Bumi Harapan
44. Gambar 44. Kondisi tambak Badusappo tepat berada disamping aktivitas bongkar muat material IKN.
45. Gambar 45. Papan penanda dan patok Bank Tanah terpasang di depan rumah warga Kelurahan Gersik
46. Gambar 46. Spanduk penolakan aktivitas Bank Tanah di kebun warga
47. Gambar 47. Peta Lokasi Bank Tanah di Kecamatan Penajam, PPU
48. Gambar 48. Bendungan Bener dengan Tipe Urugan, di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
49. Gambar 49. Mustapa menunjukkan patok Proyek Intake Sungai Sepaku, di samping rumahnya.
50. Gambar 50. Pemasangan patok di bawah kolong rumah masyarakat.

51. Gambar 51. Patok bertuliskan IKN di perkebunan masyarakat.
52. Gambar 52. Penanda “Proyek Normalisasi” Sungai Sepaku berada di kebun milik Sahran.
53. Gambar 53. Tim Petugas Pengadaan Tanah IKN menggunakan rompi dinas.
54. Gambar 54. Berita Acara, Hasil Rapat Bersama Masyarakat Adat Balik, tentang rencana Pembangunan Intake dan Normalisasi Sungai Sepaku.
55. Gambar 55. Surat pelepasan tanah warga.
56. Gambar 56. Surat Lampiran pembebasan lahan Proyek Intake Sepaku.
57. Gambar 57. Infografis berbagai peraturan dan regulasi kebijakan yang berkaitan dengan memuluskan megaprojek IKN.



Ringkasan Eksekutif

Dibalik berbagai proyek sumber daya air kolosal, bagian dari mega proyek pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia yang dikemas sebagai proyek “hijau” dan “berkelanjutan” melalui pembangunan infrastruktur Bendungan Sepaku-Semai, Intake dan Proyek pengendalian banjir Sungai Sepaku, terungkap bagaimana ancaman dan daya rusak yang dialami oleh masyarakat dan perempuan adat Balik. Mereka menghadapi penjajahan dan penindasan berlapis dan menyejarah hingga menjadi korban sempurna oleh proyek yang diklaim sebagai “*Legacy*” Presiden Jokowi ini.

Buku hasil penelitian ini memaparkan bagaimana bentang sungai yang memiliki ikatan sejarah, sosial dan ekonomi dengan komunitas dirampas, puluhan keluarga masyarakat Balik kehilangan akses terhadap sungai, kesulitan mendapatkan air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, air yang dulu gratis dari sungai kini harus membeli, bahkan mirisnya harus menunggu pembagian air.

Keberadaan komunitas masyarakat Balik di Sepaku Lama, Maridan, Pemaluan dan Mentawir terancam tergusur, Ikatan batin dan sejarah yang sebelumnya tumbuh melalui peran mereka pada sejarah penamaan wilayah sosial dan ekologis seperti Sungai Sepaku, Semai dan Mentoyok akan terputus bahkan relasi spiritual seperti jernang, ritual memandikan anak yang baru lahir untuk memperkenalkannya pada ‘semesta’ air terancam punah.

Sejumlah situs yang memiliki nilai sejarah dan sakral bagi masyarakat suku balik. Diantaranya adalah Batu Badok, Batu Bawi dan Batu Tukar Tondoi harus “kalah” dengan operasi berbagai proyek ini, bahkan masyarakat terpaksa memindahkan sekitar 35 makam leluhur Suku Balik yang sudah ada disana sejak 200 tahun lamanya.

Ruang hidup yang tergusur membuat puluhan buah lokal dan endemik di Sungai Sepaku dan Tengin seperti Kendui, Bumbunyong atau buah Langsung Monyet, Lemposu, Tengkuni, Plaro, Watang Kuaro, Letan, hingga Putuk akan menghilang. Berbagai ikan, sumber protein yang acap ditemukan seperti Marsapi, Baung, Jelawat, Tenggara, atau hasil tangkapan lain di Sungai Tengin seperti Kakap, Pari, dan Bulan-bulan juga menyusul hilang. Kedua sungai ini sejak lama menjadi jalur transportasi yang menghubungkan antar wilayah.

Pohon kayu Meranti dan Ulin, bahan baku utama Biduk atau perahu asli orang Balik dan Batang Tombak atau Bujoq Purun untuk aktivitas berburu (tekayo) pun makin jarang. Begitu juga tumbuhan dan tanaman yang penting berfungsi sebagai obat-obatan seperti akar kuning, pasak bumi, bajaka, lemposu, akar aren dan ambit jalen.

Pengetahuan menentukan waktu tanam melalui formasi rasi bintang, keahlian dan mantra khusus dalam berburu semua akan lenyap. Alam semesta telah melahirkan kebudayaan dan kesenian, kulit kayu langsung menjadi bahan pembuatan alat musik Gambus, tarian dan lagu tradisional seperti Ronggeng dan lagu Rembaian Bulan, Mainang hingga Tirik terilhami bahkan menciptakan berbagai teater rakyat masa lampau seperti Memandak.

Lenyapnya hutan dan ladang bukan saja syarat penghidupan namun juga sumber dari perkakas ritual penyembuhan adat Mulung yang membutuhkan syarat Sepatung Jatus atau 100 jenis jenis kayu dan tanaman. Hilangnya identitas, pengetahuan, kekayaan alam, benda warisan, perkakas kebudayaan, milik masyarakat adat Balik adalah akibat penindasan berlapis yang direkam dalam Buku ini. Bahkan sejak era

sebelumnya seperti era Kolonial, era 'Gerombolan', era 'Banjir Kap', dari orde lama, orde baru hingga era Jokowi yang mencapai puncak deritanya setelah ditetapkannya kawasan mereka sebagai Ibu Kota Baru.

Dalam Buku ini juga terungkap, kesaksian masyarakat tentang sembilan modus dalam perampasan lahan untuk proyek Intake dan bendungan mulai dari Tanda Tangan Kehadiran Jadi Tanda Tangan Persetujuan, Mematok dan mengukur lahan warga tanpa izin, Kompensasi yang Tak Sesuai, Tanam Tumbuh yang tak dihitung, Dipaksa Menerima Ganti Rugi Melalui Pembuatan Buku Rekening, Buai janji relokasi, Dihadapkan Pada Ancaman Pengadilan, Memecah Warga Dengan Mengakali Pertemuan, hingga setelah Transaksi, Surat Tanah Asli yang tak kunjung dikembalikan.

Bukan hanya Masyarakat Adat, namun juga berdampak pada masyarakat transmigran dan perantau, lahan mereka menjadi sasaran penguasaan lahan untuk berbagai proyek infrastruktur. Ingatan, pergulatan batin dan perjuangan panjang, suka dan duka mereka membangun kehidupan dari pulau Jawa lalu ke tanah Sepaku, membuka hutan dan mengolah tanah akan hilang, menjadi cerita belaka. Relasi pada sumber air dan sungai hingga pendapatan ekonomi juga akan ikut terganggu.

Proyek Intake ini dibangun mengarah pada salah satu sisi sungai, sedangkan bendungan ditujukan untuk membendung seluruh sungai. Bendungan Sepaku Semoi ini sendiri bertipe urugan yang direncanakan memiliki tinggi 19 meter dari dasar sungai, volume tampungan $\pm 11.557.000 \text{ m}^3$ dan memiliki luas genangan $\pm 220,83$ hektar.

Buku ini mengungkap perluasan perusakan tidak hanya terjadi di kawasan delineasi IKN, wilayah lain ikut dikorbankan, seperti di Kalimantan Utara, terdapat 6 kampung, mulai dari Long Lejuh hingga Long Pelban di Sepanjang sungai Kayan akan digusur untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 9.000 Megawatt (MW) yang akan melistriki Ibu Kota Baru. Begitu juga di sepanjang pesisir Sulawesi Barat dan Tengah dikeruk untuk kebutuhan batu gajah sebagai bahan material pembangunan infrastruktur IKN. Perluasan perusakan juga menggerogoti 4.162 hektar ruang hidup

dan lahan warga di lima kelurahan mulai dari Gersik hingga Riko untuk Bandara *Very Very Important Person* (VVIP) hingga Pelabuhan demi proyek “pintu gerbang masuk” dan “penunjang” kawasan strategis nasional Ibukota baru melalui skema Bank Tanah dan dalih reforma agraria.

Untuk memuluskan IKN, dalam empat tahun terakhir pengurus negara memproduksi sedikitnya 16 regulasi atau aturan untuk melegitimasi, mulai dari PP, Perpres, Peraturan Otorita hingga Pergub dan Peraturan kepala daerah lainnya. Memberikan fasilitas pengurangan pajak, perpanjangan HGB selama dua kali 80 tahun dan HGU selama 95 tahun, pengurus negara juga memberikan ruang yang lapang bagi tenaga kerja asing. Para pengusung IKN bahkan tak segan untuk merevisi UU IKN demi memperbesar jaminan aliran finansial bagi megaprojek ini.

Terungkap juga kejahatan maladministrasi, masyarakat adat kehilangan hak perdata atas tanah bahkan hak asasi-nya, akibat terhentinya pelayanan permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran di desa dan dampaknya juga pada penghentian urusan pertanahan oleh pemerintah.

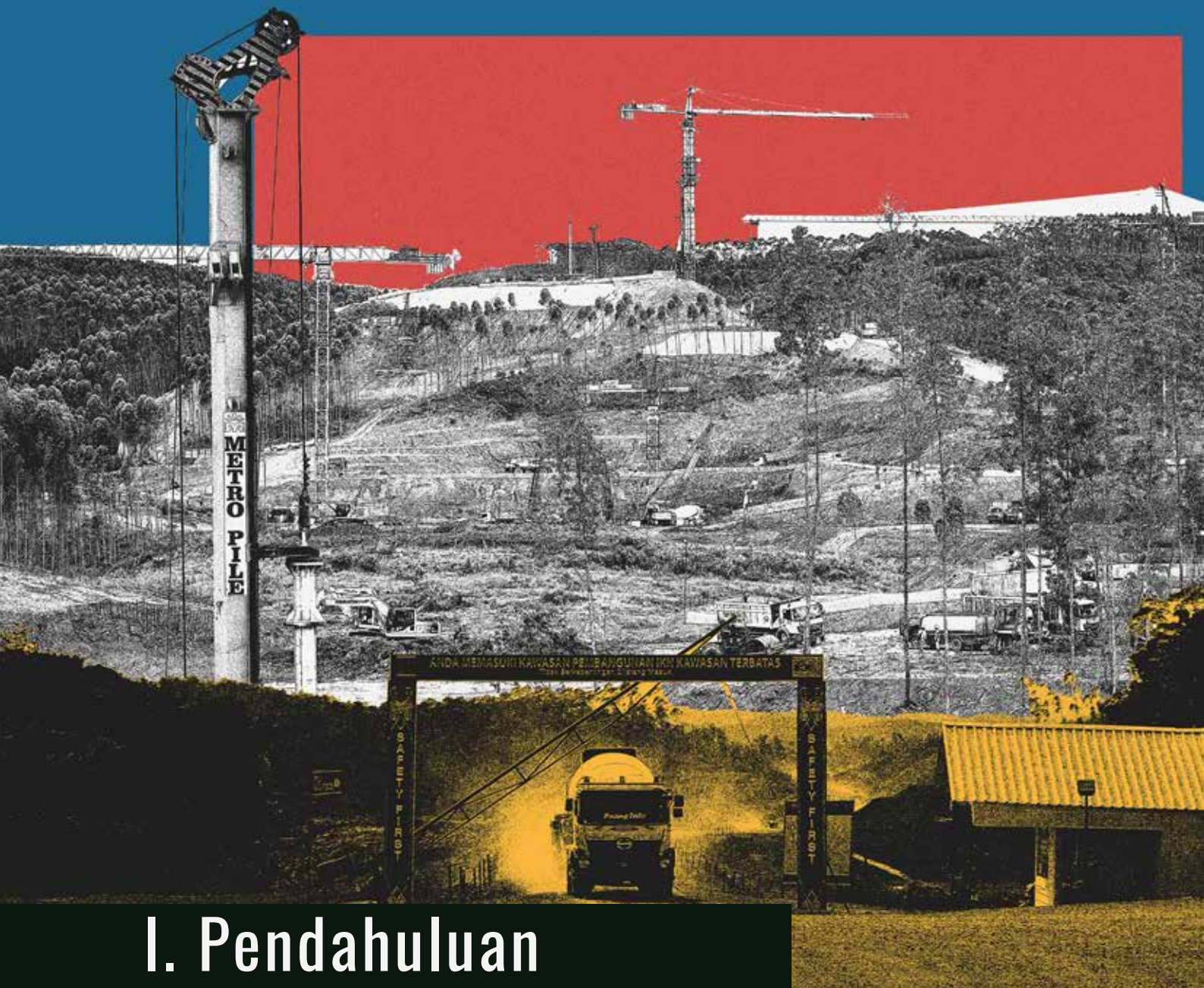
Dalam temuan juga terungkap berbagai proyek raksasa ini hanyalah ruang bagi perburuan rente, hanya upaya untuk menggelembungkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan transaksi dan berpotensi korup, memunculkan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Ditemukan 12 proyek, sumber melimpah bagi transaksi belanja jasa dan belanja barang, bermuara pada satu proyek bendungan Sepaku Semoi saja yang keseluruhannya bernilai 879,2 miliar rupiah setara dengan 375 miliar rupiah atau nyaris tiga kali lipat anggaran beasiswa pendidikan di Kalimantan Timur tahun 2023

Buku ini membeberkan bagaimana Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga tidak transparan mengenai total tujuh dokumen mulai dari dokumen teknis pembangunan prasarana intake dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku, izin penggunaan sumber daya air bendungan hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek.

Pemerintah Indonesia beralasan jika dokumen tersebut diberikan kepada publik dapat merampas Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan mengganggu persaingan usaha. Namun sebaliknya hal ini justru adalah skandal terhadap transparansi dan akuntabilitas global, menunjukkan proses ibu kota baru ini justru dimulai dengan kejahatan informasi.

Pada akhirnya buku ini berupaya menyajikan sejarah, perspektif dan memposisikan diri untuk menjadi corong suara, kesaksian dan cara pandang masyarakat dan perempuan adat Balik untuk membela dan mempertahankan ruang hidup dan keselamatannya, dalam buku juga memuat sejumlah desakan yang harus diambil oleh berbagai pihak.

Tim Penyusun



I. Pendahuluan

Pendahuluan

Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah dua Kabupaten yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dikemukakan resmi empat tahun lalu, pada 26 Agustus 2019. Kawasan IKN direncanakan sebagai 3 wilayah konsentris ("ring"). Luas seluruh kawasan yang pada 2019 ditentukan seluas 180 ribu hektar, satu tahun kemudian melonjak 256 ribu hektar di 2020¹, setara dengan enam kali luas Provinsi DKI Jakarta. Kawasan megaprojek IKN mencakup sebagian wilayah Kabupaten

1 <https://kaltim.tribunnews.com/2020/03/13/lahan-ikn-bertambah-dari-180-ha-jadi-256-ha-dua-wilayah-di-sepaku-masuk-secara-utuh-di-kawasan-ikn>, diakses pada 15 Juli 2023

Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan merupakan wilayah administratif tersendiri.

Beberapa alasan pemindahan ibu kota negara antara lain adalah tidak memadainya syarat kelayakan kota Jakarta sebagai situs kantor pusat pengurus negara, termasuk soal udara bersih, air bersih, transportasi, kepadatan penduduk, dan besarnya risiko bencana. Di samping itu, dianggap penting untuk memiliki ibu kota negara yang berada di tengah wilayah kepulauan. Alasan lain adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi yang selama ini masih terpusat di Jawa.

Wacana Ibu Kota Baru diusung dengan salah satu alasan bahwa bangsa ini ingin bergerak dari model pembangunan 'Jawa-sentris' ke 'Indonesia-sentris'. Namun sebaliknya, proses penetapan ibu kota baru dan perencanaannya sendiri justru dilakukan secara sentralistik oleh Jakarta. Pada awalnya, pemilihan lokasi mengerucut ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur. Pernyataan ini tanpa kajian terbuka yang dapat dipelajari publik. Hal ini berlanjut bahkan sampai pada pemilihan lokasi akhir di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Pengabaian partisipasi publik dalam keputusan penting ini sinonim dengan pelanggaran hak asasi warga negara dan jaminan konstitusional atas partisipasi tersebut. Keputusan ini juga sangat bergaya top-down, tidak melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak sama-sekali.

Lingkungan di Kalimantan Timur sudah rusak oleh industri ekstraktif. Kerusakan ini akan ditambah dengan beban sosial dan ekologis dari proyek raksasa pembangunan ibu kota baru. Alih alih memulihkan Jakarta, pemerintah justru akan menciptakan kerusakan serupa di tempat baru. Sebagaimana yang kita ketahui, sekarang pun Kalimantan memiliki tragedi lingkungannya sendiri. Hutan sebagai ruang hidup bersama manusia dan non-manusia, saat ini sudah menyempit, terdesak oleh industri kayu, tambang, sawit serta kebakaran lahan dan hutan. Ditambah lagi ruang hidup satwa harus bersaing dengan sebuah kota baru yang akan terus berkembang dan meluas dengan area penunjangnya.

Pemerintah dalam website resmi dan Buku Saku pemindahan Ibu kota Baru mengklaim bahwa ibu kota baru akan menjadi kota yang ideal dengan prinsip *Smart and Forest City*. Dalam menopang promosi hijau itu pemerintah juga mengklaim bahwa akan menerapkan 100% *clean energy* dan sumber energi yang rendah karbon² untuk mengejar target 100% instalasi energi terbarukan dan *Net Zero Emissions* pada 2045³, namun realitasnya pembangkit listrik dari sumber energi kotor batu bara terus dibangun di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur⁴.

Pemerintah Indonesia menyebut IKN akan dibangun dengan 75% kawasan IKN direncanakan menjadi ruang terbuka hijau dimana 65% menjadi area yang dilindungi dan 10% untuk produksi pangan⁵. Baru-baru ini pemerintah juga menggunakan istilah *sponge city* (kota spons) sebagai dalih untuk menghadapi kritik atas ancaman krisis air di bentang sekitar IKN, Bappenas mengklaim konsep ini adalah pengejawantahan sistem perairan sirkuler yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur dengan prinsip keberlanjutan⁶.

Secara keseluruhan, pembangunan fisik IKN diperkirakan memakan biaya sekitar 466 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persennya akan menggunakan dana APBN, lalu 80 persen kebutuhan anggaran IKN ditargetkan berasal dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan mengandalkan skema Investasi dari luar atau swasta.

Pada 2022 hingga 2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR akan berada pada kawasan “ring 1” atau yang disebut sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar. Infrastruktur dasar, seperti air baku, air bersih dan sanitasi, jalan dan jembatan, drainase dan embung adalah pembangunan awal megaproyek

2 Buku Saku Pemindahan IKN, Kementerian PPN/Bappenas, Juli 2021, Hal 13

3 <https://www.ikn.go.id/>, diakses 23 Juli 2023

4 Terdapat 2 PLTU batu bara di dekat Balikpapan dan Samarinda, yang tidak jauh dari lokasi ibu kota baru. Di Kalimantan, terdapat tujuh rencana pembangunan yakni Kalselteng 3, Kalselteng 4, Kalselteng 5, Kaltim 3, Kaltim 5, dan Kaltim 6 dengan kapasitas masing-masing 200 MW juga Kaltimra sebesar 400 MW, silahkan cek <https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2021/05/FINAL-IKN-REPORT-BAHASA-digital.pdf>

5 Buku Saku Pemindahan IKN, Kementerian PPN/Bappenas, Juli 2021, Hal 13-14

6 Rencana Induk IKN dalam Lampiran UU IKN, Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2022, Hal 10

Ibu Kota bernama Nusantara ini. Infrastruktur dasar yang sedang dibangun di IKN salah satunya adalah pembangunan untuk kebutuhan sumber air. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara meliputi jalan dan jembatan, bendungan, drainase, intake air baku, hunian bagi pekerja serta penyiapan lahan kawasan (*land development*).

Sebagai upaya penyediaan air baku di IKN Nusantara, Kementerian PUPR tengah melaksanakan pembangunan intake Sungai Sepaku berkapasitas 3.000 liter/detik. Intake Sungai Sepaku ini dibangun dengan konsep bendung gerak (*obermeyer*) yang memiliki lebar bendung 117,2 meter serta tinggi bendung 2,3 meter.

Selain itu dalam mendukung infrastruktur penyediaan air baku di kawasan IKN Nusantara, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan bendungan Sepaku Semoi. Bendungan ini juga dilengkapi pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bendungan Sepaku Semoi dengan potensi untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 5.000 liter/detik.

Masih terhubung dengan proyek intake Sepaku, juga sedang berjalan proyek pengendalian banjir Sungai Sepaku dengan nilai proyek 242 miliar rupiah, yang akan membangun sejumlah tanggul di sisi kanan dan kiri sungai Sepaku. Semua proyek infrastruktur sumber daya air ini diberi label “hijau” dan “Biru”, Kementerian PPN/Bappenas mengklaim akan menyokong efisiensi sistem sumber daya dan menerapkan prinsip keberlanjutan⁷.

Namun, dibalik proyek rekayasa sumberdaya air pembangunan intake Sepaku di Desa Sepaku, Bendungan Sepaku-Semoi di Desa Tengin Baru dan proyek pengendalian banjir Sungai Sepaku buku ini, terungkap bagaimana ancaman dan daya rusak yang dialami oleh perempuan dan laki-laki suku Balik, sebuah kelompok masyarakat adat menyejarah dengan penutur

7 Buku Saku Pemindahan IKN, Kementerian PPN/Bappenas, Juli 2021, Hal 13-15

bahasa Balik sekitar 5000 orang, yang paling terkena dampak dari proyek rekayasa bentang air tersebut, terutama dengan penguasaan aliran Sungai Sepaku yang dirampas untuk proyek intake bendungan di bawah dalih kepentingan umum, untuk menunjang pasokan air bagi megaprojek ibu kota baru.

Metodologi

Proses penelitian dan penulisan hasil riset ini dilakukan dengan gabungan pendekatan etnografi dan investigasi.

Pendekatan etnografi berusaha untuk memahami pengalaman masyarakat adat khususnya perempuan dari sudut pandang mereka sendiri, sementara investigasi yang dilakukan dalam riset ini bermaksud untuk mengungkap daya rusak suatu proyek ekstraktif yang mengacu pada berbagai esensi dalam panduan investigasi daya rusak yang diperkenalkan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)⁸ yakni mengungkap kesaksian dan derita yang dialami hingga kerusakan dan kehilangan yang sudah dan terancam akan membesar akibat suatu proyek ekstraktif.

Pendekatan etnografi ini diselenggarakan menggunakan metode *live in* atau tinggal bersama dengan komunitas dalam kurun waktu tertentu, proses pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam, observasi dan dilakukan secara partisipatif, melibatkan komunitas adat khususnya perempuan terdekat dari proyek intake Sepaku dan proyek Bendungan Sepaku Semoi dalam kurun waktu Desember 2022 hingga Juni 2023.

Gabungan dua pendekatan ini dipilih karena tujuan riset adalah untuk mengangkat pandangan dan suara masyarakat adat dan perempuan Balik dan masyarakat korban lain dari mega proyek pemindahan Ibu Kota Baru yang krisisnya yang mendalam dan berlapis, di tengah serbuan berbagai riset dan laporan lain yang hanya merekam pandangan elit.

8 Ady Widyanto, Taen Hine, Mencari Tahu, Investigasi Daya Rusak Pertambangan, JATAM, 2008

Workshop penyusunan penulisan kemudian dilakukan setelah datang dari lapang, melakukan kompilasi seluruh catatan wawancara dan temuan lalu menstrukturkannya bersama fasilitator pada November 2022 dan Maret 2023.

Diskusi terfokus dan wawancara langsung juga diselenggarakan dengan melibatkan para pihak dan ahli yang akan memberikan input dan pengetahuannya. Pihak-pihak yang terlibat adalah akademisi termasuk ahli bendungan, dan para ahli yang terkait dalam isu ini, sebelum dan sesudah riset lapang.

Buku atau hasil riset ini diberi judul "Nyapu: Bagaimana Perempuan dan laki-laki suku Balik Mengalami Kehilangan, Derita dan Kerusakan Berlapis Akibat Megaprojek Ibu Kota Baru Indonesia". Nyapu sendiri berasal dari bahasa suku Balik yang berarti Hilangnya Kehidupan, dan penggunaan kata tersebut diusulkan oleh teman-teman Masyarakat Adat Balik di Sepaku.

Hasil riset ini juga diterjemahkan ke bahasa inggris dengan tujuan agar dapat dipublikasikan secara global dan dikembalikan kepada komunitas masyarakat Balik sebagai pemilik seluruh himpunan pengetahuan dan sejarah sosial atas ruang-hidup mereka, sebagai argumentasi kritis atas proyek rekayasa raksasa yang mengancam ruang hidup dan keselamatan mereka dan generasi berikutnya.



II. Sejarah dan Identitas di Bentang Alam Sepaku

II.a. Asal Usul Dan Kosmologi Masyarakat Balik

Sejarah penamaan wilayah yang kini disebut sebagai Sepaku, berasal dari nama sungai yang membelah wilayah tersebut dan mengalir disana, yakni Sungai Sepaku. penamaan sungai Sepaku itu sendiri dikarenakan banyak tanaman Pakis atau yang disebut dalam bahasa Balik “daun atau tumbuhan paku”.

“Kenapa dinamakan Sepaku ? Dulu ini penuh dengan tumbuhan Paku (Pakis), hutan Paku dulu di sini, Paku-nya orang Sepaku disini bisa dimakan,”

ujar Rimba (65 Tahun). Ia adalah salah satu tetua masyarakat adat Balik. Tumbuhan Paku tumbuh di sepanjang sungai, di rawa-rawa sangat banyak dan mudah ditemui kala itu.

Selain penamaan wilayah Sepaku yang terhubung dengan sejarah penamaan oleh masyarakat adat Balik, penamaan wilayah lainnya seperti “Semoi” dan “Mentoyok” juga berkaitan dengan “penanda” ekologi, seperti yang dijelaskan lagi oleh Rimba mengenai “Semoi”, sebutan atau penamaan yang juga berasal dari bahasa “Orang Balik”. “Kalau Mentoyok adalah nama tumbuhan yang sekarang menjadi wilayah, dimana sungainya dibangun bendungan di Semoi,” tutur Rimba⁹.

Kehidupan masyarakat adat Balik, amat dekat dan tidak terpisahkan dengan keberadaan Sungai Sepaku, “Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak ada ember plastik dan mesin pompa, maka kami hanya menggunakan bambu atau bisa juga menggunakan periuk, yang dalam bahasa Balik disebut Kenceng”, ujar Sibukdin (60 Tahun), kepala adat Suku Balik di Sepaku.

Sibukdin masih bisa menyebutkan nama puluhan buah-buahan endemik yang tumbuh dan berada di sekitar Sungai Sepaku sejak masa kecilnya. Beberapa di antaranya adalah buah Sengkuang atau dalam bahasa Balik disebut Kendui, Bumbunyong atau buah Langsung Monyet, Lemposu, Tengkuni, Plaro, Watang Kuaro, Letan, Putuk, dan Rupai.

Sengkuang atau Kendui, ujar Sibukdin, berukuran kecil seperti bentuk buah Duku. Selain bermacam buah-buahan, Sungai Sepaku juga menjadi sumber protein masyarakat di masa lalu, sebelum sungai tercemar dan rusak seperti saat ini. Sibukdin juga fasih menceritakan jenis-jenis ikan di Sungai Sepaku seperti Marsapi, Baung, Jelawat, Tengara dan Pentan.

“Buah Bumbunyong, Lemposu dan Sengkuang dalam bahasa Balik, rasanya masam, tumbuh di pinggir sungai, dan pada saat ini sudah sangat jarang ditemui. Buah-buahan ini biasa dimasak bersama ikan kuning, karena

⁹ Catatan Wawancara dengan Rimba pada 19 Januari 2023.



Gambar 1. Buah Sengkuang dan Buah Lemposu.

dahulu belum ada asam kandis,” ujar Samsiah (49 Tahun), perempuan suku Balik di Sepaku.

Menurut Sibukdin dan Pandi (51 Tahun), dahulu masyarakat adat Balik memiliki kebiasaan menggunakan perahu untuk kegiatan sehari-harinya, untuk pergi mencari ikan ke sungai maupun sebagai alat transportasi mereka. Perahu kecil mereka itu dalam bahasa Balik disebut Biduk, yakni perahu dengan ukuran kecil yang dibuat dengan cara memahat batang pohon Meranti sehingga berbentuk perahu.

Selain kekayaan botani di Sungai Sepaku, hutan tidak kalah kaya dengan berbagai hewan buruan. “Dulu mencari makan tidak susah, tinggal pergi berburu ke hutan. Kebiasaan orang Balik adalah berburu Rusa atau Payau, yang dalam bahasa Balik disebut Tekayo”, tutur Sibukdin.

Para pemburu suku Balik pada zaman dahulu menggunakan tombak, yang tangkainya terbuat dari batang Pohon Ulin, dan mata tombaknya terbuat dari besi (dalam bahasa Balik disebut Bujoq Purun). Menurut kesaksian Basri (80 Tahun), mata tombak atau purun ini terbuat dari berbagai jenis



Gambar 2. Basri, memperlihatkan Bujoq Purun (tombak besi untuk berburu) yang diwariskan dari orang Tuanya.

logam yang dilebur menjadi satu sehingga lebih kokoh untuk membunuh hewan buruan¹⁰. Para pemburu melakukannya dengan menangkap suara Payau dan mengikuti jejaknya.

Sebaran dan keberadaan masyarakat adat Balik pada saat ini mencakup wilayah Sepaku Lama, Kelurahan Maridan, Kelurahan Pemaluan dan Kelurahan Mentawir. Konsentrasi terbesar mereka berada di Sepaku Lama dan Pemaluan. Wilayah Sepaku Lama ini juga biasa disebut sebagai Sepaku Logdam.

Kata Logdam dipakai karena di hulu sungai ini dulu digunakan sebagai pelabuhan penumpukan kayu log yang akan dikapalkan dan diolah oleh *PT International Timber Corporation Indonesia* (ITCI). Menurut Sibukdin, Sepaku lama atau sepaku Logdam ini juga merupakan kelurahan pertama dan tertua di kecamatan ini.

¹⁰ Catatan wawancara dengan Basri pada 11 Juni 2023.

Penyebaran masyarakat adat Balik dipengaruhi juga oleh berbagai tekanan politik dan ekonomi pada masa silam. Awalnya disebabkan oleh penjajahan Jepang, Belanda dan Australia dan persinggungan mereka dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) maupun kegiatan “Gerombolan” Ibnu Hajar. Menurut kesaksian Sibukdin dan Pandi, pada “era gerombolan” mereka sempat menyebar ke Bongan, Resak (wilayah Kutai Barat sekarang), Pantai Lango, Jenebora, Nenang, Buluminung dan Kapo (wilayah Penajam Paser Utara dan Balikpapan sekarang), dan Kedang Ipil (wilayah Kutai Kartanegara sekarang).

Sibukdin menceritakan pengalaman hidupnya bersama Rimba, adiknya. Keluarga mereka harus melarikan diri dan berpencar di hutan untuk menghindari kejaran Gerombolan Ibnu Hajar. Peristiwa ini mengilhami pemberian nama Rimba bagi sang adik, untuk mengenangkan pelarian mereka di hutan kala itu.

“Karena adik saya lahir di hutan, maka dia dikasih nama Rimba”, ujar Sibukdin. Keluarga mereka menghabiskan waktu lebih dari satu tahun di hutan belantara hingga akhirnya terpencar sampai wilayah Kedang Ipil yang sekarang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gerombolan Ibnu Hajar atau yang lebih dikenal sebagai Gerombolan Darul Islam (DI) atau Tentara Islam Indonesia (TII) adalah gerakan yang lahir sekitar 1950-an di Kalimantan Selatan, yang tidak setuju dengan konsep negara Indonesia, setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) memutuskan bahwa Indonesia akan menerapkan sistem negara serikat yang kemudian dinamai Republik Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnya, dibentuk Uni Indonesia-Belanda di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda yang membentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), lewat seleksi ulang terhadap tentara dan anggota angkatan perang. Hal ini menyulut ketidakpuasan sehingga muncul berbagai aksi perang gerilya dan pemberontakan. Salah satu di antaranya adalah Gerombolan Ibnu Hajar yang bergerilya dari Kalimantan Selatan hingga ke Kalimantan Timur¹¹.

11 Sejarah Pemberontakan DI-TII Ibnu Hadjar: Alasan, Tujuan, & Akhir <https://tirto.id/sejarah-pemberontakan-di-tii-ibnu-hadjar-alasan-tujuan-akhir-giE5> diakses 2 Mei 2023

Lenyap dan tercecernya berbagai benda warisan dan perkakas kebudayaan milik masyarakat adat Balik adalah salah satu dampak dari serangan Gerombolan. Sani (81 Tahun) menceritakan Cepok Loyang, guci, piring dan perhiasan yang sebagian banyak hilang akibat tertinggal di rumah-rumah saat masyarakat menyelamatkan dan melarikan diri ke hutan, hanya sebagian warga yang bisa membawa benda tersebut salah satunya orang tua Sani. Menurut penjelasan Sani, Cepok Loyang adalah tempat menyimpan perhiasan, terbuat dari campuran logam dan emas, diwariskan turun temurun, bentuk ukiran menyerupai lukisan bunga, menandakan eksistensi seni ukir masyarakat kala itu.

Selain Cepok Loyang, Sani menunjukkan benda bersejarah lainnya yaitu Grak, gelang tangan yang berbahan dasar logam dengan berbagai ukiran. Benda ini diwariskan secara turun temurun, dan biasa mereka gunakan pada saat melaksanakan ritus Mulung.



Gambar 3. Cepok Loyang dan Grak, benda warisan dan biasa dipakai dalam Ritual Mulung.

Menurut Medan (70 tahun), salah satu pemangku adat Balik, “ritus Mulung sendiri adalah upacara penyembuhan dan biasanya pelaksanaannya sebelum masa pergi berladang tiba,” ujar Medan. “Almarhum ayah saya dulu adalah Balian Mulung”¹². Ia juga mengatakan bahwa kini makin sulit menemukan bahan-bahan dan syarat upacara adat, termasuk yang biasa digunakan dalam Mulung atau lainnya.

Salah satu syarat Mulung adalah menyiapkan Sepatung Jatus. “Seharusnya ada 100 jenis atau minimal ada 50 jenis kayu dan tanaman yang digunakan, diantaranya kayu Ulin dan kayu langsung, ditambah sesajen lainnya,” ujar Medan. Tapi kini semakin sulit mencari syarat-syarat berupa beragam jenis kayu dan tanaman khusus ini di hutan. “Upacara Mulung terakhir yang saya tahu berlangsung 20 tahun lalu, dipimpin Paman saya, Pak Jahiru, yang melanjutkan almarhum Ayah saya. Jadi sekarang sudah tidak ada upacara Mulung lagi,” ujar Medan. Kini tak ada lagi Mulung, dengan makin beratnya beban yang ditanggung hutan oleh makin hebatnya eksploitasi hutan.

Dahulu masyarakat adat Balik memiliki kebebasan dalam mengelola lahan. Tidak ada konflik soal tanah, karena Petinggi Kampung mengetahui peta pemilikan lahan. Pada saat menggarap lahan masyarakat dibebaskan untuk menggarap seluas yang ia mampu, batas-batasnya ditandai dengan tanaman dan batas alam seperti pohon buah dan sungai¹³.

Dalam mitologi orang-orang Balik mereka mempercayai legenda Sentuwon yang diidentifikasi sebagai ruh leluhur atau nenek moyang masyarakat suku Balik . Cerita yang lain menyebutkan wujudnya berbentuk manusia raksasa yang selama ini melindungi masyarakat adat Balik. Darah dan suku Sentuwon mengalir pada sejumlah pemimpin adat Balik hingga saat ini¹⁴.

Sentuwon menjaga Muara Sepaku, wilayah orang datang dan masuk. “Jika pedagang atau orang asing bermaksud buruk atau berniat jelek, maka mereka langsung dipenggal kepalanya oleh Sentuwon penjaga itu,” cerita Pandi. “Kepala manusia yang dipenggal itu diletakkan di tanjung itu. Utok

12 <https://www.naladwipa.or.id/essay/kabar-keruh-dari-sungai-sepaku-penghancuran-berlapis-pada-masyarakat-suku-balik-dan-ruang-hidupnya>, diakses 27 Juni 2023

13 Catatan wawancara dengan Rimba pada 11 Juni 2023

14 Catatan Wawancara dengan Sikion pada 15 Desember 2022

artinya kepala. Oleh karena itulah wilayah itu dinamai Tanjung Utok,” lanjutnya.

Pandi salah satu masyarakat adat Balik juga menambahkan struktur sosial di dalam masyarakat yang diatur oleh para Petinggi, diantaranya yang masih ia ingat adalah Petinggi Kampung, ada Petinggi Kuning, Petinggi Kondra, Petinggi Adul dan Petinggi Hawwa. Mereka dibantu oleh Pengarak yang bertugas untuk mengarahkan, mengajak untuk berkumpul ketika ritus diadakan. Sementara itu struktur Kepala Adat muncul belakangan pada saat administrasi pemerintahan memperkenalkan wilayah administrasi Kelurahan.

Masyarakat adat balik meyakini tiga alam sebagai kosmologi mereka, yaitu alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Petir, hujan, bulan, matahari dan seluruh yang berada di langit diyakini sebagai alam atas bagi suku Balik. Alam tengah adalah seluruh yang tercipta di atas tanah seperti manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan alam bawah adalah alam bawah permukaan air atau tanah, dan diyakini berpenghuni.

Kekayaan mitologi dan legenda dalam kehidupan bukan saja menjelaskan tentang sejarah dan asal usul mereka, namun juga mengandung pesan moral yang menjadi panduan dalam kehidupan. Diantara mitologi atau legenda yang paling terkenal adalah legenda tentang Pulau Dua.

“Pada zaman dahulu, terdapat dua orang bersaudara yang Menyaro’ (dalam bahasa Balik berarti memiliki kesaktian), yaitu Silu dan Ayus. Pada saat mereka berada dalam sebuah perahu di daerah Muara Sungai Sepaku, mereka bertengkar karena berbeda pendapat, dan akhirnya memilih untuk berpisah, sehingga mereka mendayung ke arah berlawanan satu sama lain. Akibatnya perahu tersebut terbelah menjadi dua dan menenggelamkan mereka berdua. Setelah kejadian tersebut muncullah dua buah pulau di lokasi tenggelamnya Silu dan Ayus itu,” ujar Sikion, cerita salah seorang tetua masyarakat adat.



Gambar 4. Ladang masyarakat Adat Balik di Sepaku.

Menurutnya, pesan moral yang dapat dipetik dalam cerita ini adalah bahwa sesama saudara tidak boleh bertengkar, sebab akan merugikan satu sama lain. Selain itu keberadaan fisik pulau dua pada Muara Sungai Sepaku tersebut merupakan penanda sejarah dan kosmologi masyarakat adat Balik. Jika ia lenyap dan rusak maka mitologi dan legenda ini juga akan hilang dari ingatan dan tidak akan diwarisi oleh generasi selanjutnya.

II. b. Pengetahuan Bercocok Tanam Suku Balik

Menurut penuturan Sikion¹⁵, dalam hal bercocok tanam masyarakat memiliki cara tersendiri dalam menentukan waktu tanam dengan cara membaca formasi rasi bintang. Mereka meyakini bahwa “Bintang Tiga” (sebutan masyarakat Balik jika melihat tiga bintang bercahaya terang pada waktu tertentu di malam hari) adalah waktu paling baik untuk mulai bercocok tanam. Sebaliknya untuk mengetahui datangnya musim kemarau akan

15 Wawancara dengan Sikion pada 18 Januari 2023 di Sepaku Lama

diketahui jika terlihat tiga bintang dilangit bercahaya redup. Pengetahuan tentang waktu untuk bercocok tanam atau kalender tanam ini terancam hilang karena sudah tidak digunakan lagi, akibat tidak lagi dikuasainya lahan-lahan produktif seperti lahan pangan seperti pada masa lalu.

Selain bercocok tanam, masyarakat adat Balik memiliki keahlian khusus dalam berburu. Mereka melakukan ritus dengan menggunakan telur ayam kampung, dengan cara melemparkannya di atas jerat hewan buruan yang telah dipasang di hutan sebanyak tiga kali sambil mengucapkan mantra¹⁶. Berburu hewan bagi masyarakat adat Balik bukan hanya soal pemenuhan ekonomi domestik. Sebagian hasil dari kayu tertentu dan hasil buruan diambil kulitnya untuk digunakan sebagai perkakas kesenian tradisional seperti dalam pembuatan alat musik Gambus.

Bunga (65 Tahun) menceritakan dan menunjukkan alat musik gambus miliknya, “Ini gambus yang sering kami pakai manggung dulu, terbuat dari kulit Kancil. Yang lebih bagus kalau pakai kulit biawak, karena lebih tipis,” ujar Bunga, penari dan pemusik tradisional perempuan Suku Balik di Sepaku Lama ini.

“Gambus itu sering kami bawa juga ketika sedang menjaga sarang burung di Goa Tembinus, jadi hiburan kami di hutan”. Saya yang nari ronggeng, bapaknya (suami Bunga) yang main gambus sambil berpantun, sahut-menyahut. Namanya Ngibing,” ujar Bunga. “Orang yang bernyanyi pantun, kita yang mengiringi, kalau dia sudah tidak sanggup balas pantun biasanya minta tolong kepada yang main gambus untuk membalas pantunnya,” tambah Bunga.

Selain gambus, Bunga juga menyebutkan berbagai jenis alat kesenian dan lagu-lagu tradisional Suku Balik lainnya. Rembaian Bulan adalah salah satu lagu yang dilantunkan untuk mengiringi tarian Ronggeng, di samping beberapa lagu lain termasuk Batu Sopang, Mainang dan Tirik. Jenis tarian selain Ronggeng adalah Tingkilan.

16 Wawancara dengan Rimba dan Sikion pada 12 Juni 2023



Gambar 5. Bunga, penari dan pemusik perempuan adat Balik dengan alat musik Gambus miliknya.

Selain tarian, suku Balik juga memiliki kesenian lainnya yakni seni bermain peran yang disebut dengan Memandak. Seni bermain peran ini biasanya memerankan kisah tentang kerajaan. “Saya dulu pernah ikut main jadi tuan putrinya, bapaknya (suami) jadi pahlawannya,” ujar Bunga mengisahkan pengalamannya. Memandak dipimpin oleh orang yang pandai bicara dan paham tentang kisah kerajaan.

Orang yang memimpin kesenian ini biasa disebut dengan Nginang. Almarhum Hawak dulu menjadi pemimpin rombongan kesenian ini. Ia juga adalah orang terakhir menjadi Balian Mulung di masyarakat Suku Balik. Kesenian ini membutuhkan banyak pemain peran diantaranya raja, ratu, putri, pangeran, perdana menteri I, perdana menteri II, pahlawan, dan rakyat. Memandak diperankan sambil Beladun atau bernyanyi pantun yang diiringi dengan alat musik Piul (gong), Babul (gendang) dan juga Gambus.

Bunga kemudian menyampaikan beberapa syair pantun yang masih diingat olehnya :

“Ma inang salendang ma inang. Dipakai anak gadis menari, Bila kita sama berdendang serentak joget menari”.

Kalau beradu pantun biasanya begini tambah Bunga :

“Batulah di Sopang, batulah di Kajang. Di situlah tempat, di situlah tempat sayang. Kembangnya bulan-bulan. Siapa bilang hati tidaklah terbimbang melihat ya ading berbaju kembang”.

Lalu balasannya pantunnya adalah:

“Jangan suka memukul dinding, kalau tidak ada tiangnya, jangan suka memukul sindir, kalau tidak langsung orangnya”.

Kesenian adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat yang juga terhubung dengan siklus kehidupan. Karena itulah kesenian terkait dengan masa kelahiran, perayaan kedewasaan, menikah hingga upacara kematian. Kesenian Tari Ronggeng misalnya ditampilkan dalam berbagai siklus kehidupan tersebut. Bunga menceritakan bagaimana tari ronggeng ditampilkan setiap ada hajatan, seperti naik ayun, nikah atau hajatan syukur lainnya. “Dulu nggak ada namanya orkes-orkes atau elektone kayak sekarang ini, itulah kesenian orang sini,” tutur Bunga.

Kesenian tradisional yang diceritakan Bunga ini keseluruhannya bergantung dengan identitas, sejarah dan eksistensi rona fisik lingkungan serta kondisi alam di sekitar kehidupan masyarakat adat Balik. Dalam ingatan masyarakat adat Balik, batas-batas wilayah ruang hidup di Sepaku ditandai dengan pohon buah dan sungai. Batas alam lain yang menjadi batas wilayah dan ruang hidup masyarakat Suku Balik adalah gunung dan goa, seperti Gunung Parung yang berada di sebelah utara, perbatasan di antara ruang hidup masyarakat Balik dengan ruang hidup masyarakat Kutai. Begitu juga Sungai Tunan yang berada di sebelah selatan, menjadi penanda perbatasan di antara masyarakat balik dan masyarakat Paser¹⁷. Sedangkan di sebelah barat, penanda perbatasan adalah pegunungan karst yang bernama Gunung Tengkorak, perbatasan wilayah Semoi dengan wilayah masyarakat adat Balik.

17 Wawancara dengan Pandi 12 Juni 2023



Gambar 6. Dahlia, perempuan berdarah suku Balik seorang penari Ronggeng.

Kekhasan dan kekayaan kebudayaan masyarakat adat Balik juga dapat didengar dari bahasa dan dialek sehari-hari mereka. Dahlia (31 tahun) dan Bece (55 tahun) adalah perempuan suku Balik. Keduanya menjelaskan persamaan dan perbedaan bahasa mereka dengan bahasa tetangga atau saudara mereka masyarakat Paser. “Contohnya, makan dalam bahasa kami itu Kuman Aleq, sedangkan dalam bahasa Paser Kuman Dileq,” ujar Bece’ memberikan contoh perbedaan bahasa kedua suku ini.

II.c. Kilas Sejarah Penamaan dan Administrasi pada bentang Sepaku

Penamaan wilayah-wilayah di bentang alam Sepaku sebagian dilakukan secara kultural dan organik oleh komunitas atau masyarakat sendiri. Salah satu contohnya adalah penamaan Sepaku yang berasal dari nama Sungai Sepaku. Kedua tetua masyarakat suku balik Sibukdin dan Sikion menceritakan, aliran air tersebut dinamai Sepaku karena pada masa itu banyak tumbuhan pakis, dalam bahasa Balik disebut “sepaku” atau tanaman Paku.



Gambar 7. Peta Partisipatif Wilayah Masyarakat Adat di Wilayah Sepaku.

Penamaan wilayah lain bahkan juga diberikan secara bersama-sama melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat lokal seperti Dayak, Paser dan suku Balik bahkan bersama dengan masyarakat transmigran.

Hatta (60 Tahun), seorang warga Transmigran dari desa Tengin Baru bercerita bagaimana dulu tempat mereka pertama kali sampai disebut dengan Sepaku, dan sekarang tempat mereka bermukim dinamai Tengin Baru. Setelah tahun 2002 dengan adanya pemekaran kawasan, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan nama tempat tinggal mereka, melalui musyawarah antar warga baik lokal maupun transmigran. Maka lahirlah kesepakatan menamai tempat mereka dengan sebutan Tengin Baru hingga hari ini. Alasan kenapa nama desanya disebut dengan Tengin Baru itu berdasarkan sungai yang berada di tempat tersebut yaitu Sungai Tengin¹⁸.

18 Wawancara dengan Hatta, Warga Desa Tengin Baru, 18 Januari 2023

Akan tetapi, penamaan ruang hidup masyarakat Balik di bentang alam Sepaku juga tidak benar-benar lepas dari campur tangan pengurus negara. Hal itu terlihat dari perjalanan sejarah berulang kali pergantian penamaan dan perubahan administrasi wilayah disana.

Penamaan dan pembentukan administrasi wilayah dimulai pada tahun 1987. Wilayah Sepaku pada awalnya berada dalam wilayah administrasi Balikpapan Seberang kemudian bergabung dengan wilayah Kabupaten Paser, pada tahun yang sama Kecamatan Balikpapan Seberang kala itu membentuk Pemerintahan Perwakilan Kecamatan di Sepaku yang meliputi: Delapan (8) Desa dan Empat (4) Kelurahan¹⁹. Pada tanggal 25 September 1996, Sepaku diresmikan menjadi Kecamatan Sepaku Kabupaten Tingkat II Pasir. Lalu Pada 5 Maret 1999, nama-nama desanya dirubah lagi. Adapun nama-nama desa tersebut adalah :

Desa Sepaku I menjadi Desa Bukit Raya; Desa Sepaku II menjadi Desa Suka Raja; Desa Sepaku III menjadi Desa Tengin Baru; Desa Sepaku IV menjadi Desa Bumi Harapan; Desa Semoi I menjadi Desa Argo Mulyo; Desa Semoi II menjadi Desa Semoi Dua; Desa Semoi III menjadi Desa Suko Mulyo dan Desa Semoi IV menjadi Desa Wonosari²⁰.

Sepaku kemudian menjadi kecamatan yang berada di bawah daerah pemekaran baru Kabupaten Penajam Paser Utara, hasil pemekaran dari daerah Kabupaten Dati II Pasir pada tahun 2002. Setelah dua puluh satu tahun, kecamatan Sepaku merupakan, satu dari empat kecamatan yang berada di wilayah Penajam Paser Utara. Saat ini ada 11 Desa dan 4 kelurahan yang berada di Kecamatan Sepaku yaitu Desa Telemow, Desa Binuang, Desa Bumi Harapan, Desa Bukit Raya, Desa Karang Jinawi, Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, Desa Sukomulyo, Desa Argomulyo, Desa Semoi Dua, Desa Wonosari, Kelurahan Maridan, Pemaluan, Sepaku dan Kelurahan Mentawir.

19 <http://desa-bukitraya.penajamkab.go.id/sejarah-desa/> , diakses pada Februari 2023

20 <http://desa-bukitraya.penajamkab.go.id/sejarah-desa/> , diakses pada Februari 2023

d. Pengalaman Batin Para Transmigran Di Tanah Harapan

Pemerintah menjadikan Sepaku sebagai wilayah sasaran penempatan transmigran²¹. Penempatan transmigrasi dimulai pada 26 Agustus 1975 di Desa Bukit Raya yang sebelumnya adalah Desa Sepaku Satu (1). Selanjutnya setiap tahun transmigran terus didatangkan dengan masing-masing jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 500 KK, sampai yang terakhir kalinya pada tahun 1987 di Desa Sukomulyo (Desa Semoi 3). Dari delapan (8) desa yang ada, jumlah penduduk seluruhnya adalah 4.000 Kepala Keluarga. Secara keseluruhan terdapat lima gelombang transmigrasi yang sebagian besar berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta dan Bali.

Para transmigran menceritakan bagaimana pergulatan dan pengalaman hidup mereka saat tiba di Sepaku, bagaimana kerasnya mereka menyesuaikan kondisi bentang alam dan bertahan hidup saat itu, begitu juga interaksinya dengan masyarakat lokal diantaranya masyarakat adat Balik. Hatta menceritakan bagaimana desa Sepaku dulunya dikelilingi hutan belantar. Saat ia beserta keluarganya dan kelompok transmigran tiba, tingginya pepohonan dan rimbunnya hutan Kalimantan memberikan kesan berbeda dengan kondisi alam di tempat asalnya. Pada saat itu masih sedikit masyarakat yang bermukim, dan wilayah tersebut hanya ditinggali oleh masyarakat lokal seperti orang suku Dayak, Paser dan Balik, yang kebanyakan bermukim di dalam hutan dan di pinggiran Sungai Tengin.

Sebutan "suku Paser" juga disematkan kepada tiap orang suku Balik. Identitas "suku Balik" hingga saat ini tidak populer di kalangan orang diluar mereka, karena kurangnya literasi tentang suku dan masyarakat adat di kawasan sepaku. Generalisasi bahwa setiap orang Balik juga otomatis adalah orang Paser adalah bentuk ketidaktahuan tersebut.

Kondisi hutan Sepaku yang kaya tersebut ditandai dengan tersedianya berbagai jenis pohon dan kayu yang bermanfaat bagi penghidupan. "Pada saat itu jenis-jenis pohon kayu banyak sekali. Kayu Ulin, sebagai contoh, ada

21 Berawal dari Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 57/TH-Pem/1968 Tentang Penyerahan tanah seluas 30.000 Ha yang terletak di Sepaku dan Kampung Semoi Kecamatan Penajam Kabupaten Kutai untuk diperuntukan penempatan para transmigran silahkan cek <http://desa-bukitraya.penajamkab.go.id/sejarah-des/>



Gambar 8. Hatta, transmigran dari Karawang Jawa Barat, yang saat ini menjadi penduduk Desa Tengin.

di samping rumah kita, bahkan sudah ada yang ditebang jadi bisa langsung diambil dan diolah untuk digunakan membangun rumah atau bangunan”, jelas Suardi (52 Tahun) yang juga merupakan transmigran dari Banyuwangi.

Selain kekayaan hutan, kesuburan tanah di Sepaku juga masih dalam kondisi baik saat itu, seperti kesaksian transmigran lain dari Jawa Timur, Imam Turmudi (67 Tahun). Ia masih mengingat ucapan dari orang tuanya, “Untuk menanam padi tanahnya masih subur, ibaratnya, satu biji kacang panjang ini, kamu tanam akan subur. Kenyataannya itu memang benar, karena

mamaku menanam lombok, terong, padi, jagung, kedelai. Kami juga mendapatkan bantuan bibit, kami dapat dan tanam kopi, dan sampai sekarang tanaman-tanaman ini terus hidup,” tuturnya.

Kesaksian lain datang dari Hatta, warga masyarakat Desa Tengin Baru RT 12. Ia adalah seorang transmigran dari Karawang, Jawa Barat. Beserta lima saudara dan orang tuanya, ia berangkat menuju Kalimantan Timur untuk mengikuti program transmigrasi pada tahun 1975. Mereka ikut dalam gelombang ketiga. Pada saat itu rombongan terdiri dari 100 kepala keluarga. Ia masih mengingat, pada saat itu usianya sudah menginjak 19 tahun.

Alasan keluarganya mengikuti program transmigrasi adalah demi mendapatkan penghidupan ekonomi yang lebih baik. Begitu juga cerita dari Imam Turmudi dan istrinya Toerah (57 Tahun), keduanya transmigran dari Jawa Timur.

“Orangtua saya ini termasuk kurang mampu, tanahnya cuman sedikit, yah jadinya ikut daftar,. Lurahnya pada saat itu bilang kamu ikut daftar aja, cari rezeki siapa tau ada perubahan, nanti disana diberi tanah diberi rumah walaupun seadanya” ujar Toerah.

Kata pak Lurah saya saat itu “Nanti kan siapa tahu bisa berubah, bisa bikin disana berkembang, karena kamu kan kelihatan tanahnya sempit, nanti kalau punya anak lagi bagaimana?, anaknya banyak, lahannya sempit?, kalau masalah keamanan itu Insyaallah, namanya pemerintah pasti aman kan, pasti ada perlindungan disana juga ada penataan pemerintahan, tidak seperti disini, disini kan kelurahan kalau disana pemukiman transmigrasi, saya dengar pengalaman dari pakle-pakle (paman),” tambah Toerah²².

Warga transmigrasi lain yakni, Suardi menyebutkan pendidikan sebagai alasan lain untuk mengikuti program transmigrasi. “Makanya, kami sekeluarga pada saat itu bapak saya transmigrasi ke sini. Saya transmigrasi pada tahun 1977, posisi ketika saya baru datang itu di Desa Tengin Baru dekat kecamatan. Jika dulu saya masih bertahan di Jawa saya tidak yakin bisa sekolah. Saya berangkat ke sini masih umur 12 tahun,” ujar Suardi.

Peningkatan ekonomi dan taraf hidup yang lebih baik itu mulai dirasakan oleh masyarakat transmigran pada awal tahun 2005, semenjak pemerintah membuka jalan poros antar desa, sehingga mempermudah akses bagi masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial antar masyarakat baik lokal maupun transmigran. “Sebelum tahun 2005-an masyarakat masih menggunakan moda transportasi air, melalui pelabuhan Sungai Mentoyok atau yang dikenal sekarang dengan sebutan sungai Tengin menuju kota Balikpapan, untuk menjual hasil pertaniannya dan belanja kebutuhan pokok mereka sehari-hari,” ujar Hatta, warga Transmigran Desa Tengin.

22 Rekaman dan Catatan Wawancara dengan Sutami, 17 Januari 2023

Lahan masyarakat transmigran yang kebanyakan berada di wilayah perbukitan membuat mereka jarang memanfaatkan sungai sebagai sumber penghidupan sehari-hari²³. Menurut Hatta, masyarakat transmigran dulu jarang memanfaatkan sungai tengin sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari mereka, karena untuk kebutuhan air minum mereka menggali dan membuat sumur sendiri. Pada saat musim kemarau tiba barulah masyarakat transmigran turun ke sungai untuk mengambil air, karena posisi lahan dan tempat tinggal mereka yang lumayan jauh dari sungai.

Senada dengan Hatta, Suardi, salah satu transmigran yang ditempatkan di Desa Tengin Baru menjelaskan bahwa kebutuhan air sudah disediakan. Setiap empat rumah mendapatkan satu sumur bersama. Tidak ada listrik pada saat itu, untuk penerangan kami menggunakan lampu minyak tanah. “Saya tidak ingat seberapa banyak minyak tanah kami butuhkan setiap bulannya, tetapi setiap sebulan sekali kami harus mengambil jatah minyak tanah,” ujarnya.

Berbeda dengan Hatta dan Suardi, dahulu sebagian warga masih ada yang menggunakan sungai Tengin untuk kebutuhan sehari-hari seperti Sunu (70 Tahun) dan Harmawati (42 Tahun), yang bertempat tinggal di dekat Sungai Mentoyok. Sunu dan Harmawati bukanlah transmigran. Mereka adalah warga setempat bersuku Bugis.

Kebanyakan para transmigran menggunakan sungai hanya untuk memancing atau mencari ikan. “Selain ikan asin jika ingin makan ikan bisa memancing di sungai-sungai dan karena lokasi ini relatif baru ditempati, jumlah ikan masih banyak, terutama ikan Wader dan ikan Lele. Jika saya ingin makan ikan setelah pulang dari sekolah saya bawa pancingan langsung memancing saja. Semua tersedia di alam yang asri, berbeda dengan sekarang,” ingat Suardi.

Pada saat program Transmigrasi diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru, mereka diberi lahan dan jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari selama satu tahun setengah seperti beras, lauk dan lainnya.

²³ Catatan Wawancara dengan Hatta pada 18 Januari 2023

Selain itu pak Hatta juga menceritakan bahwa ia beserta keluarganya pada saat itu mendapatkan tiga sertifikat kepemilikan lahan untuk memulai kehidupan baru di desa tempat mereka tinggal. Luasan lahan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat transmigran dalam tiga sertifikat tersebut bervariasi sesuai dengan peruntukannya. Lahan berukuran 25 x 100 m² dimanfaatkan untuk bangunan rumah. Pembagian kedua seluas 25 x 300 m² untuk lahan berladang pertama, dan pembagian ketiga seluas 50 x 200 m² untuk ladang kedua. Ketiga sertifikat itu diberikan oleh pemerintah secara bersamaan sesuai dengan peruntukannya masing-masing²⁴.

“Waktu kami sampai di sini sudah disediakan rumah dan diberi jatah kebutuhan hidup selama 1,5 tahun. Jatah hidupnya berupa bahan makan dan alat-alat untuk bertani, sambil menunggu bisa ‘mandiri’. Jika orang diberikan waktu 1,5 tahun untuk menanam pasti sudah ada hasil yang dapat dipanen. Diharapkan sebelum jatah hidup tersebut habis sudah ada yang dipanen”, jelas Suardi yang merupakan transmigran dari Banyuwangi. Untuk jatah hidup yang diberikan berupa beras, tepung, ikan asin dengan rincian jatah beras bagi kepala keluarga 15 kg, istri kepala keluarga 10 kg dan masing-masing anak 7,5 kg jadi totalnya sekitar 40’an kg.

Selain fasilitas rumah, alat pertanian dan biaya hidup sementara para transmigran juga dibekali dengan bibit tanaman. “Ketika datang ke sini kami diberi bibit padi, jagung, kacang tanah, sedangkan singkong sudah banyak karena saya datang bukan yang pertama. Jadi, para transmigran awal itulah yang sudah lebih duluan menanam singkong sehingga kami tinggal meminta,” ujar Suardi

Namun fasilitas yang diberikan tidak semua tanpa keluhan. Salah satunya adalah curahan hati yang disampaikan oleh Sutami (42 tahun) warga transmigran dari Jawa Timur RT 7 Kelurahan Sepaku. Selama satu tahun pada awal-awal masa transmigrasi ia dan keluarganya mengalami kesulitan, bagaimana memanfaatkan lahan yang diberikan oleh pemerintah, agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yang jauh dari kata cukup, hanya sampai satu tahun setengah saja. Menurut Sutami pemerintah tidak menghitung jumlah anak dalam satu keluarga, ia menceritakan kondisi

24 Rekaman dan Catatan wawancara dengan Hatta 18 Januari 2023

keluarganya dengan jumlah 9 orang anak harus berbagi satu telur dan harus dicampur dengan parutan kelapa agar cukup dibagi ke setiap anak pada saat makan²⁵.

Tradisi dan metode bertani yang berbeda dengan tempat asal masyarakat transmigran di pulau Jawa sempat menyulitkan mereka. Biasanya menanam padi dengan metode bersawah pada saat itu harus dihadapkan dengan kondisi lahan yang akan mereka garap, dimana lahan yang diberikan oleh pemerintah berada di wilayah pegunungan. Sedangkan metode yang sesuai untuk bercocok tanam di lahan seperti itu hanya bisa dilakukan dengan metode rintis, membakar, dan tanam lalu setelah panen berpindah ketempat lain, dan tradisi ini yang dipakai masyarakat suku Dayak, Paser dan suku Balik di tempat tersebut. Menanam padi di wilayah pegunungan yang tidak menggunakan air, dengan tahapan merintis, membakar, tanam dan setelah panen lalu berpindah ke tempat lain.

Namun, seiring berjalannya waktu, keakraban antara masyarakat suku Dayak, Paser dan Balik dan transmigran semakin terjalin, sehingga masyarakat transmigran belajar bagaimana tata cara Bertani dengan metode yang digunakan oleh masyarakat lokal seperti ladang berpindah. Hatta bercerita bagaimana keharmonisan mereka dengan masyarakat suku Dayak, Paser dan orang-orang Balik disaat musim tanam padi tiba. Ia menceritakan kalau dulu mereka secara bergantian saling gotong royong membantu menanam padi di ladang. Tradisi itu mulai pertama kali dilakukan oleh masyarakat transmigran dengan penduduk lokal sekitar tahun 1982.

Ada pula pendatang yang merantau datang ke sini memang tidak untuk menjadi petani melainkan menjadi pedagang yang datang dengan membawa modal. Pada umumnya transmigran yang dikirim ke sini adalah orang-orang dengan tingkat sosial ekonomi rendah. Gelombang kedatangan transmigran lain ini dimulai setelah program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah selesai di tempat ini. Hal ini lebih banyak didorong karena adanya peluang usaha seperti berdagang. Lebih banyak yang datang dari Sulawesi yang merupakan penduduk terdekat dari

25 Rekaman dan Catatan Wawancara dengan Sutami, 17 Januari 2023



Gambar 9. Tampak udara persawahan dan pemukiman transmigrasi di Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku.

II.e. Pengalaman Para Perantau Lainnya

Selain para transmigran, juga terdapat para perantau yang berasal dari pulau lain namun telah cukup lama bermukim di bentang ruang hidup Sepaku. Diantaranya adalah sejumlah perantau dari Sulawesi seperti Sn (70 Tahun) dan Badusappo (70 Tahun), atau Hm (43 Tahun). bedanya, Hm adalah generasi kedua setelah kedua orang tuanya yang datang merantau ke Sepaku dan sebelumnya lahir dan besar di Tengin Baru.

Sn berasal dari luar Kalimantan, yakni Sulawesi. Pada awal tahun 1972, Sn dan keluarganya datang menggunakan kapal dari Sulawesi ke Kalimantan. Mereka membuka lahan dan bermukim di bantaran Sungai Mentoyok di Tengin Baru. Selain membangun tempat tinggal mereka juga berkebun dan membuka tambak ikan. Begitu juga Badusappo ia datang pada April tahun 2000. Ia juga berasal dari sulawesi dan membuka tambak di bantaran sungai yang lain yakni Sungai sepaku.

Relasi masyarakat perantau dan yang bermukim di dekat bantaran Sungai Tengin hingga Sungai Sepaku ini juga terbangun seiring dengan manfaat ekonomi yang mereka peroleh dari sungai. Relasi itu salah satunya tergambar melalui beberapa kepercayaan masyarakat terhadap pantangan yang tidak boleh dilakukan adalah seperti tidak boleh mencuci panci, kelambu dan tikar di sungai. Masyarakat percaya bahwa jika hal tersebut dilakukan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah satu wargamasyarakat akan terkena penyakit²⁶.

Masyarakat perantau dari Sulawesi pada umumnya juga berprofesi sebagai nelayan tambak dan nelayan tangkap. Pertambahan sendiri berada di wilayah pinggir sungai dan wilayah tangkapan mereka berada di sepanjang sungai sepaku sampai ke perairan teluk Balikpapan.

Kehadiran megaproyek IKN juga berdampak pada masyarakat transmigran dan perantau. Lahan mereka ikut menjadi sasaran penguasaan lahan untuk berbagai proyek infrastruktur. Ingatan, pergulatan batin dan perjuangan panjang, suka dan duka mereka membangun kehidupan dari pulau Jawa lalu ke tanah Sepaku, membuka hutan dan mengolah tanah akan hilang, menjadi cerita belaka. Ikatan dengan sumber air dan sungai maupun pendapatan ekonomi darinya juga akan hilang.

26 Rekaman wawancara dengan Hm, 21 Januari 2023



III. Sejarah Penghancuran Berlapis pada Bentang dan Ruang Hidup Masyarakat Adat Balik

III. a. Dari Gempuran Kolonial, Korporasi hingga Ibu Kota Baru

Bentang ruang hidup Sepaku dan masyarakat suku Balik telah menghadapi gempuran berlapis. Identitas dan ruang hidup mereka makin dipinggirkan. Sebelum diperparah oleh rencana mega proyek IKN, mereka juga telah lama terdampak oleh kehadiran industri pembalakan hutan, melalui kehadiran ITCI (*International Timber Corporation Indonesia*) pada tahun 1970-an, yang dilanjutkan oleh ekspansi kebun kelapa sawit dan masuknya tambang batu bara.

Persinggungan kehidupan mereka dengan suku-suku atau masyarakat lainnya, termasuk yang ditempatkan lewat berbagai proyek raksasa pemerintah seperti proyek transmigrasi, begitu pula persinggungan mereka dengan agama, politik negara dan modernitas juga telah membentang panjang. Perjalanan krisis yang panjang ini telah menciptakan

ketegangan, benturan tapi juga siasat adaptasi bagi masyarakat adat Balik. Semua gempuran selama ini sudah dan masih melahirkan kecemasan dan ketakutan bahkan juga menciptakan kerusakan dan kehilangan yang tak ternilai dan tak tergantikan.

Seperti yang terungkap melalui keresahan Yati Dahlia, seorang guru tari “Lou Bawe” Suku Balik di Desa Bumi Harapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, “saya tidak mau anak cucu saya seperti boneka ondel-ondel di Jakarta untuk bertahan hidup, mengemis. Karena sudah tidak punya tanah lagi akibat diubah jadi Ibukota, kami mau tinggal dimana nanti ?,” ujarnya.

Perusakan dan pendalaman krisis pada bentang Sepaku dan ruang hidup masyarakat suku balik tidak bisa dilihat hanya sepenggal saat ini saja, namun juga merupakan akumulasi perusakan yang panjang dan menyebar. Terdapat susunan babak sejarah politik ekonomi yang membentang dari sejak era kolonial belanda dan Jepang, era Orde Baru yang menjadi gerbang awal masuknya investasi ekstraktif asing dan swasta, hingga era reformasi sampai dengan era kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin, yang menjadi pelanjut perluasan perusakan dan pendalaman krisis melalui keputusan pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Kesemuanya menunjukkan pola yang sama. Aktor-aktor yang meskipun memiliki nama, wajah dan berasal dari rezim dan orde yang berbeda namun tetap memiliki watak eksploitatif yang serupa. Keseluruhannya bercirikan kolonial, melalui pengambilan keputusan yang otoriter, bertujuan sekedar untuk melakukan akumulasi ekonomi yang berasal dari penghisapan alam dan pekerja, menggunakan modus perampasan dan pengerahan operasi kekerasan psikologis sampai dengan pengerahan tentara. Dinamika krisis tersebut menunjukkan bahwa bentang Sepaku dan ruang hidup masyarakat tidak pernah bebas dan merdeka dari berbagai jenis penjajahan.



Sebelum Bab I.

PETA BUMI KESULTANAN PASIR

- I. Pada tahun 1921, dipotong dan dimasukkan Afdeeling Samarinda dan digabungkan dengan Kesultanan Kutai, sedangkan bagian lainnya dimasukkan pada Afdeeling Pulau Laut Tanah Bumbu.
- II. Pada tahun 1947, Pemerintah Belanda (N.I.C.A.) dalam rangka membentuk Daerah Kalimantan Tenggara yang berstatus Negara Bagian, dipotong lagi dan dimasukkan kedalam wilayah Negara Bagian tersebut, dan sisanya dimasukkan dalam Wilayah Daerah Federasi Kesultanan Kalimantan Timur.
- III. Sisa dua-kali potong (Bagian Utara dan Bagian Selatan) itulah yang dewasa ini dinamakan "Kabupaten Daerah tingkat II Paser."

Gambar 10. Peta Bumi Wilayah Kesultanan Paser dan Kutai.

1. Terjungkal Kolonial

Sebelum Belanda dan Jepang hadir, sejumlah naskah pra-kolonial mengakui kehadiran dan keberadaan ruang hidup masyarakat adat Balik. Informasi tersebut di antaranya terdapat dalam konstitusi atau undang-undang Kesultanan Paser pada masa Sultan Aji Muhammad Alamsyah tahun 1707, yang bernama Boyan Bunga Nyaro (Jalan Bunga Keberuntungan). Di dalamnya disebutkan bahwa wilayah Kesultanan Paser dibagi menjadi lima wilayah. Salah satu diantaranya adalah pengakuan terhadap wilayah atau tanah adat Balik yang ibu negerinya berkedudukan di Tanjung Jumlai²⁷. Meskipun demikian, menurut acuan lain, jangkauan dan bingkai wilayah ruang hidup masyarakat adat Balik adalah lebih besar daripada yang disebutkan dalam naskah kesultanan Paser tersebut. Beberapa versi sejarah lain menuturkan tentang kisah asal usul Kota Balikpapan dan



Gambar 11. Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) di Balikpapan.

27 Assegaf A.S, Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Paser, 1982, Halaman 82

hubungannya tentang keberadaan masyarakat suku Balik, yang tunduk dan mengabdikan kepada Kesultanan Kutai Kartanegara.

Bingkai wilayah ruang hidup mereka memang lebih luas, seperti terungkap dari kisah asal usul Balikpapan²⁸ yang direkam oleh F Valenijn pada tahun 1724, dan cerita lain tentang Balikpapan yang termuat dalam surat Salasiah Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara karya Khatib Muhammad Tahir pada 1849²⁹. Begitu juga afiliasi politik masyarakat adat Balik yang mengaku tunduk di bawah Kesultanan Kutai Kartanegara, menyiratkan bahwa wilayah ruang hidupnya juga beririsan dengan wilayah Kutai Kartanegara bagian utara dan wilayah hulu sungai mahakam. Wilayah ruang hidup Kekayaan alam berupa minyak dan batu bara mengundang hadirnya kolonialisme di Kalimantan Timur, salah satunya di wilayah bentang alam Sepaku yang merupakan ruang hidup masyarakat adat Balik berada. Kedudukan penguasa Belanda sempat digantikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada Januari 1942³⁰. Puncak pertempuran di wilayah Kalimantan sebelah Timur berlangsung ketika tentara Australia mewakili blok Sekutu Barat melancarkan agresi pada bulan Juli 1945, untuk menguasai kembali kawasan pasifik yang sebelumnya dikuasai Belanda. Perebutan pantai dan teluk Balikpapan juga berdampak pada masyarakat adat Balik dan ruang hidup mereka.

Salah satu peristiwa yang masih diingat oleh Sikion dan Sani (80 Tahun) adalah ketika mereka mengalami langsung pertempuran yang melibatkan tentara Australia melawan Jepang pada puncaknya di bulan Juli 1945 yang terjadi di sepanjang pantai hingga Teluk Balikpapan³¹. Sikion menceritakan ia menyaksikan mortir-mortir dari pesawat Australia yang dijatuhkan di sepanjang hutan, pantai, dan Teluk Balikpapan. Sibukdin adik dari Sikion juga masih mengingat bukti-bukti sejarah peninggalan Jepang di sepanjang sungai Miangau³².

28 Asal Usul Balikpapan dan Cerita Perahu Papan Terbalik Halaman all - Kompas.com diakses pada 3 Mei 2023

29 Mees, Constatinus Alting, 2021: KRONIK KUTAI, hal.108.

30 <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/09/090000479/pertempuran-balikpapan-1942--latar-belakang-kronologi-dan-akhir?page=all> diakses pada 10 Februari 2023

31 Wawancara bersama Sikiyon dan Sani pada 19 Januari 2023

32 Wawancara bersama Sibukdin pada 18 Januari 2023

Warga juga merasakan kekejaman fisik dan mental seperti yang dialami oleh Basri. Ia adalah salah satu seniman pemain gambus Sepaku. Basri mengingat kekejaman penjajah saat itu, terutama kekejaman penjajah Jepang terhadap warga. “Jepang itu kejam. Perempuan kalau nggak mau ikut mau mereka, dipotong payudaranya. Laki-laki disiksa kalau nggak mau kerja turut mereka. Prinsipnya barang mu adalah milik kami,” tutur Basri mengingat kekejaman penjajah. Hal tersebut juga menjadi alasan Basri pergi ke Sepaku untuk menyelamatkan diri dari siksaan Jepang³³. Ditengah kekejaman itu, sebagian warga Suku Balik juga ikut mengangkat senjata dan melawan penjajah, sesuai dengan kesaksian Rimba, salah satu warga Suku Balik di Sepaku. “Datuk kami juga dulu pejuang, veteran, tapi surat bukti veteran itu hilang ketika kakek kami meninggal, sudah tidak diurus lagi surat-surat itu,” sambung Rimba.

2. Teror Gerombolan, Banjir Kap dan Orde Baru

“..Dari situ berubahlah namanya menjadi Logdam sampai sekarang. Karena dulu di situ jadi TPA (tempat penumpukan kayu) jaman banjir kap..”

Sahran (55 Tahun),Warga Sepaku Lama

Pada masa akhir kepresidenan Sukarno (1959-1965), Indonesia sebagai negara yang baru merdeka menghadapi sejumlah tantangan politik dalam negeri. Di antaranya adalah munculnya pertentangan gagasan mengenai konsep negara dan bangsa, bukan hanya sebagai perdebatan intelektual, namun merambat sampai ke perlawanan bersenjata. Di Kalimantan hal tersebut berkaitan dengan munculnya gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dipimpin oleh Ibnu Hajar yang merupakan mantan Letnan II TNI. Peristiwa ini berlangsung pada kurun waktu 1950-1965. Orang-orang Kalimantan menyebut era ini sebagai “Era Gerombolan”³⁴.

33 Wawancara bersama Basri pada 11 Desember 2022

34 [https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/28/120000579/ibnu-hadjar-pemimpin-pemberontakan-di-tii-di-kalimantan-selatan-?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20-%20Ibnu%20Hadjar%20adalah,Indonesia%20\(DI%2FTII\).](https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/28/120000579/ibnu-hadjar-pemimpin-pemberontakan-di-tii-di-kalimantan-selatan-?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20-%20Ibnu%20Hadjar%20adalah,Indonesia%20(DI%2FTII).) diakses pada 16 Februari 2023

Datangnya gerombolan adalah fase kedua dari ancaman kehidupan terhadap masyarakat suku Balik. Orang-orang Balik terpaksa harus berpencar dan terpisah dari kampung halamannya karena konflik bersenjata antara gerombolan Ibnu Hajar dengan tentara pemerintah. Mereka baru bisa kembali dan berkumpul di Sepaku sekitar dua tahun setelah serangan gerombolan. Banyak orang yang meninggal pada saat pelarian juga menjadi faktor menurunnya jumlah populasi masyarakat adat Balik. Ada Pula yang memilih untuk menetap di tempat baru dan tidak kembali ke Sepaku.

Datangnya gerombolan adalah fase kedua dari ancaman kehidupan terhadap masyarakat suku Balik. Orang-orang Balik terpaksa harus berpencar dan terpisah dari kampung halamannya karena konflik bersenjata antara gerombolan Ibnu Hajar dengan tentara pemerintah. Mereka baru bisa kembali dan berkumpul di Sepaku sekitar dua tahun setelah serangan gerombolan. Banyaknya warga yang meninggal pada saat pelarian juga menjadi faktor menurunnya jumlah populasi masyarakat adat Balik. Ada pula yang memilih untuk menetap di tempat baru dan tidak kembali ke Sepaku.

Pengalaman ini terekam dalam ingatan Bunga, masyarakat adat Balik di Sepaku 1. "Saat itu usia saya baru 2 tahun. Saya dibawa oleh ibu saya masuk ke hutan". "Semua orang di kampung ini pergi masuk ke hutan menyelamatkan diri. Waktu itu kami baru selesai panen padi tapi nggak sempat kami nikmati. Datang gerombolan masuk sini, menjarah barang-barang, orang-orang dibunuh kalau nggak mau ikut jadi gerombolan." "Mereka kerjanya merampok rumah-rumah di kampung-kampung kami," ujar Bunga.

Basri juga masih mengingat kehadiran gerombolan saat itu yang mengajak dan memaksa masyarakat adat Balik untuk merampok rumah-rumah. Masyarakat kemudian memilih untuk lari atau pergi meninggalkan kampung. "Siapa yang mau diajak merampok?, itu kan jahat," ingat Basri.

“Di hutan, kami setiap hari jalan kaki, malam berhenti di sembarang tempat. Yang penting bisa istirahat. Pagi lanjut jalan lagi tidak tau arahnya ke mana yang penting nggak didapati oleh gerombolan. Makan juga sembarang, ya makan jamur, apa aja kami makan. Banyak yang sakit di hutan dan meninggal, yang bertahan terus jalan. hingga akhirnya saya bersama mama saya tembus sampai di Kedang Ipil (saat ini berada di kawasan Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara),” kenang Bunga³⁵.

Kesulitan kehidupan yang dialami pada saat pelarian juga diceritakan oleh pengalaman keluarga kecil Sikion. Bersama ibunya, Saba’, mereka harus berjalan kaki menembus hutan hingga ke Kedang Ipil. Bahkan ibunya melahirkan pada saat pelarian tersebut. “Saat di hutan Ibu saya melahirkan anak keduanya yaitu adik saya Rimba. Jadi saat datang gerombolan itu ibu saya sedang mengandung, kami terpisah dari bapak kami. Ketika kami selamat dan sampai ke Nenang (saat ini berada di kawasan administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara), ada tentara yang menjemput kami di pelabuhan. Waktu dia lihat ada bayi ditanya siapa nama anak ini, dijawab “Rimba” karena lahir di hutan,” kenang Sikion . Rimba menceritakan zaman gerombolan dulu, Ibnu Hajar itu dikenal orang yang sakti. “Kalau ia lari dari sini nggak berapa langkah sudah tidak kelihatan. Menghilang begitu. Kuburannya saja kami tidak tahu di mana” ujarnya.

Gerombolan Tenggelam, Terbitlah Banjir Kap

Setelah ancaman dan gangguan Era Gerombolan berakhir, terbitlah Era Banjir Kap. Pada akhir dekade 1960-an, Pemerintah memberikan konsesi yang sebagian besar ekstraksinya melibatkan masyarakat lokal dan pendatang, kecuali di wilayah Sepaku, di mana masyarakat suku Balik hanya khususnya hanya menjadi penonton. Pada masa awal penerapan sistem pembalakan besar-besaran itu, masyarakat mendapat kesempatan menebang kayu secara bebas, baik kayu dari dalam maupun dari luar kawasan

35 Rekam wawancara bersama Bunga 11 Desember 2022

konsesi hutan, untuk dijual kepada tengkulak-tengkulak yang telah memberikan uang muka.

Penebangan kayu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan kayu. Kayu-kayu ditebang lalu dihanyutkan ke sungai. Bila sungai surut, penghanyutan ditunda sampai ada air atau banjir besar. Kayu yang sudah ditebang dikumpulkan di suatu tempat menunggu datangnya banjir. Setelah daerah itu tergenang air, kayu-kayu tebangan didorong ke sungai lalu digabung dengan kayu lain hingga membentuk rakit untuk selanjutnya ditarik ke tempat penimbunan atau pengolahan kayu. Cara pengangkutan melalui penghanyutan menggunakan air banjir ini kemudian dikenal dengan istilah “banjir kap”. Istilah ini populer pada paruh kedua dasawarsa 1960-an³⁶.

Selain dikenal dengan istilah banjir kap, di wilayah pesisir Bontang peristiwa ini juga dikenal dengan masa ‘batang pendek’. Sebutan tersebut merujuk pada ukuran batang kayu yang diminta oleh pembeli. Meskipun disebut sebut peristiwa ini melibatkan peran pemerintah daerah, akan tetapi banyak juga dugaan bahwa peristiwa ini berasal dari peran pemerintah pusat melalui presiden Soeharto. Menurut kesaksian penduduk, tidak lama setelah naiknya Soeharto ke pucuk pimpinan nasional, kapal-kapal berbendera Jepang mulai mendarat di Bontang. Mereka siap membeli kayu yang berukuran, panjang 4 meter dan diameter mulai 60 cm, dengan harga 150 rupiah sampai dengan 200 rupiah tiap kubik. Mereka jugalah yang mengajari masyarakat untuk menggunakan gergaji mesin (chain-saw) untuk menebang pohon sejak tahun 1970. Sebelumnya para pekerja menggunakan teknologi seadanya seperti gergaji tangan³⁷.

Peristiwa banjir kap ini juga memicu migran atau kedatangan penduduk secara besar-besaran dari berbagai daerah diantaranya

36 Rekaman wawancara bersama Sikion pada 11 Desember 2022.

37 Gunawan, Rimbo. Industrialisasi kehutan dan dampaknya terhadap masyarakat adat kasus kalimantan Timur. 1998. hal 40

berasal dari pulau Sulawesi³⁸ ataupun juga dari wilayah Kalimantan bagian selatan untuk bekerja sebagai pekerja kayu, seperti yang terjadi di wilayah Sepaku. Sebutan Sepaku Logdam adalah sebutan yang juga berkaitan dengan era salah satu penanda era eksploitasi kayu dan hutan secara besar-besaran pada bentang alam dan ruang hidup masyarakat suku balik di Sepaku. Setelah era penjajahan dan gerombolan selesai, gangguan terhadap ruang hidup dan keselamatan masyarakat datang lagi dari era banjir kap.

Menurut ingatan Sahran, Sepaku juga tidak lepas dari wilayah sasaran eksploitasi kayu pada saat era banjir kap. "Lokasi pengambilan kayu pada saat banjir kap hanya berada di pinggiran Sungai Sepaku dan Sungai Miangau," ujar Sahran. Saat itu masyarakat hanya menjadi penonton, para pekerja berasal dari luar Sepaku, "Pekerja yang menyusun dan mengikat kayu setelah di sungai berasal dari wilayah selatan atau banjar," tambah Sahran³⁹.

Menurut ingatan Sikion, salah satu tetua masyarakat suku balik di Sepaku Lama atau Logdam, para penebang kayu tersebut masuk dan tinggal di hutan, biasanya selama satu sampai dua bulan⁴⁰. Orang-orang 'kaya baru' yang lahir bersama '*timber boom*' dan banjir kap pada 1960 sampai dengan 1980-an yang memperkenalkan perlakuan bahwa tanah bukan lagi alat produksi tapi juga komoditas dan investasi yang bisa dilepas kala harga naik. Proses perpindahan tangan tersebut dapat dipastikan didominasi oleh bukan hanya laki-laki, namun juga oleh para elit⁴¹.

3. Penggusuran, Tebang dan Gali: Pengambilan Kayu, Kelapa Sawit hingga Lubang Tambang

Eksplorasi kawasan hutan pada bentang dan ruang hidup Sepaku disusul dengan hadirnya perusahaan-perusahaan raksasa pembalakan

38 Komunitas Nyerakat : Geliat di Tengah Gempuran Arus Modernitas - Desantara Foundation diakses pada 20 Juni 2023

39 Komunitas Nyerakat : Geliat di Tengah Gempuran Arus Modernitas - Desantara Foundation diakses pada 20 Juni 2023

40 Wawancara bersama Sahran pada 11 Juni 2023.

41 Wawancara bersama Sikion pada 12 Juni 2023



Gambar 12. Aktivitas pengangkutan kayu di wilayah PT ITCI, Sumber foto JATAM Kaltim 2022.

kayu dan "hutan" tanaman industri (HTI) yang izinnya keluar pada masa Orde Baru. Mereka adalah, PT. ITCI, Delong Corporation, Weyerhaeuser Far East Ltd, PT. ITCI Kartika Utama dan PT. ITCI Hutani Manunggal.

PT. International Timber Corporation Indonesia (PT. ITCI) adalah sebuah Badan Hukum yang dibentuk oleh PT IRDA (karya TNI AD Republik Indonesia) dan Delong Corporation yang berasal dari Amerika Serikat dalam bentuk Joint Venture yang didirikan dengan akta Notaris Elisa Pondaag No. 6 Tertanggal 3 Juni 1969 dalam rangka Undang-undang Nomor 01 Tahun 1967 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Penanaman Modal Asing⁴².

Dalam tulisan lainnya, disebutkan bahwa PT. ITCI disokong oleh gabungan dua pemegang saham yaitu Weyerhaeuser Far East Ltd yang menguasai 65 persen saham dan Truba memegang 35 persen saham. Truba atau Tri Usaha Bhakti adalah satu dari tujuh Perusahaan milik militer yang terhubung dengan Kementerian Pertahanan (Hankam). Truba didirikan pada tahun 1968 melalui merger dari empat

42 Studi Tentang Jenis-Jenis Bangunan Air Pada PT ITCI KARTIKA UTAMA Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Kawulur, James Karel 2002 Halaman 17.



Gambar 13. Plang PT ITCI Hutani Manunggal (IHM).

puluh perusahaan yang didirikan oleh perwira Angkatan Darat pada pertengahan 1960-an dan semua pemegang sahamnya adalah senior Pejabat Hankam⁴³. Seperti kebanyakan perusahaan militer yang memasuki kemitraan semacam itu, kontribusi Truba terhadap usaha tersebut pada dasarnya adalah konsesi itu sendiri, yang tidak bisa diperoleh oleh Weyerhaeuser⁴⁴.

Perusahaan Weyerhaeuser adalah perusahaan hasil hutan internasional yang memproduksi kayu lunak, pulp, kertas dan produk kemasan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1900 oleh Frederick Weyerhaeuser sebagai Perusahaan Kayu Weyerhaeuser.

43 Bob Hasan, the Rise of Apkindo, and the Shifting Dynamics of Control in Indonesia's Timber Sector, Christopher M. Barr

44 <https://www.weyerhaeuser.com/company/history/> diakses pada 19 juni 2023

PT ITCI telah melakukan kegiatan pengusahaan hutan sejak tahun 1970 berdasarkan surat keputusan menteri Pertanian RI Nomor: 01/Kpts/UM/I/70 Tanggal 3 Januari 1970 setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari presiden RI nomor: 13-19/PRES/3/1969 tanggal 17 Maret 1969⁴⁵. Pada tahun 1970 sampai 1990, luas HPH ITCI Konsesi I adalah seluas 601.750 Hektar. Di antara 1990 sampai 2010 luas HPH ITCI konsesi II membesar mencapai 470.200 Hektar⁴⁶.

Selama PT. ITCI berdiri, pihak manajemen telah mengalami beberapa pergantian. Pada awalnya berdirinya pengelolaan PT ITCI di bawah manajemen asing (*Delong Corporation, USA*). Selanjutnya manajemen dipegang oleh Weyer Haeuser Far East Ltd, dan kemudian berangsur-angsur, baik saham maupun manajemen beralih ke Mitra Indonesia seluruhnya dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 1981⁴⁷.

'Nasionalisasi' PT ITCI sejak tahun 1980-an⁴⁸, seperti diuraikan dalam tulisan tentang sejarah PT. ITCI Kartika Utama, tak bisa dipisahkan dengan kepentingan Angkatan Darat. Seperti dituliskan dalam buku "TB Silalahi Bercerita Tentang Pengalamannya" (2008:154) yang ditulis oleh Atmadji Sumarkidjo, di sekitar tahun 1985, sejumlah perusahaan milik Angkatan Darat di bawah payung Yayasan Kartika Eka Paksi kerap mengalami kerugian, termasuk PT. ITCI Kartika Utama. Saat itu yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) adalah Jenderal Rudini, sementara wakilnya dijabat oleh Letnan Jenderal Try Sutrisno. Memasuki tahun 2000-an, karena mengalami penurunan pendapatan PT. ITCI Kartika Utama (KU) merumahkan banyak karyawannya⁴⁹.

Pada 1993 perusahaan ini dikuasai Hashim Djojohadikusumo. Ia merupakan Komisaris Utama PT. ITCI KU yang diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA) seluas 173.395 hektar

45 Studi Tentang Jenis-Jenis Bangunan Air Pada PT ITCI KARTIKA UTAMA Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Kawulur, James Karel 2002 Halaman 17.

46 Ibid, Halaman 17

47 Ibid, Halaman 14

48 <https://kaltimkece.id/historia/peristiwa/mengenang-kejayaan-pt-itci-perusahaan-mati-suri-yang-lokasinya-menjadi-ibu-kota-negara> diakses pada 5 Mei 2023.

49 <https://tirto.id/jejak-bisnis-angkatan-darat-dan-adik-prabowo-di-penajam-paser-utara-ehe7> diakses pada 5 Mei 2023.



Gambar 14. Masyarakat adat Balik yang memprotes perampasan lahan mereka oleh ITCI Hutani Manunggal.

dan tepat berada di ring dua kawasan megaproyek IKN. Ia adalah adik kandung dari Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Perusahaan ini mendapat IUPHHK-HA pada 2012⁵⁰. Dengan menggunakan bendera Grup Arsari yang menguasai saham mayoritas PT ITCI Kartika Utama, perusahaan ini kemudian berkongsi dengan PT Inhutani-I (Persero) mendirikan lagi perusahaan patungan bernama PT ITCI Hutani Manunggal.

PT ITCI Kartika Utama menjadi pemegang saham mayoritas yakni 60 persen. Sementara PT Inhutani-I menguasai 40 persen saham. Saat itu perusahaan memegang konsesi lahan di Kalimantan Timur hingga 173.195 hektare. Pada 2004-2006 ITCI Kartika Utama secara bertahap menjual sahamnya kepada PT Kreasi Lestari Pratama (PT KLP). Pada tahun 2006 komposisi saham PT IHM berubah, di mana PT KLP memegang 90 persen saham dan PT Inhutani-I (Persero) 10 persen sisanya.

⁵⁰ <https://www.jatam.org/ibu-kota-baru-buat-siapa/> diakses pada 5 Mei 2023

Pada saat ini PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) telah beralih kepemilikan dari Hashim Djojohadikusumo ke Sukanto Tanoto. Sukanto Tanoto adalah pebisnis yang dijuluki Raja Sawit yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia, ia santer diberitakan baru saja membeli properti mewah bekas istana Raja Jerman⁵¹.

ITCI Hutani Manunggal bergerak pada bisnis "hutan" tanaman industri (HTI), perusahaan ini memiliki konsesi 161.127 ha⁵². Kehadiran perusahaan-perusahaan pada masa Orde Baru ini ikut menyumbangkan perluasan kerusakan dan pendalaman krisis pada bentang alam sepaku dan ruang hidup masyarakat suku balik yang makin diperparah dengan megaprojek IKN.

Mustapa (64 Tahun) warga Suku Balik di Sepaku Lama menceritakan bagaimana ladang dan kebunnya yang terletak di hulu sungai sepaku, dirambah, diduduki dan ditanami paksa oleh IHM. "lahan saya berada di jalan kilometer 1.500 (sebutan lokasi Jalan perusahaan), dua hektar sebagian besar ladang dan buah-buahan termasuk yang saya tanami kopi dirambah IHM. Tiba-tiba tanah saya rata, bahkan saya tidak bisa lagi masuk ke tanah saya sendiri karena langsung dijaga *security*", kenang Mustapa⁵³.

Di sepanjang operasi ITCI memabat hutan melalui ITCI Kartika Utama dan ITCI Hutani Manunggal sampai dengan 2006, Jubain, warga suku Balik di Pemaluan seperti warga lainnya di kampung dipaksa menghirup debu yang mengepul dari jalan raya, dan yang hanya berhenti pada saat hujan turun. "Siang malam mereka bekerja mengangkut kayu. Boleh dikatakan 10 menit sekali armada mereka lewat dan mengeluarkan cemaran. Kita cuma lihat saja, kita kena debunya," jelasnya⁵⁴.

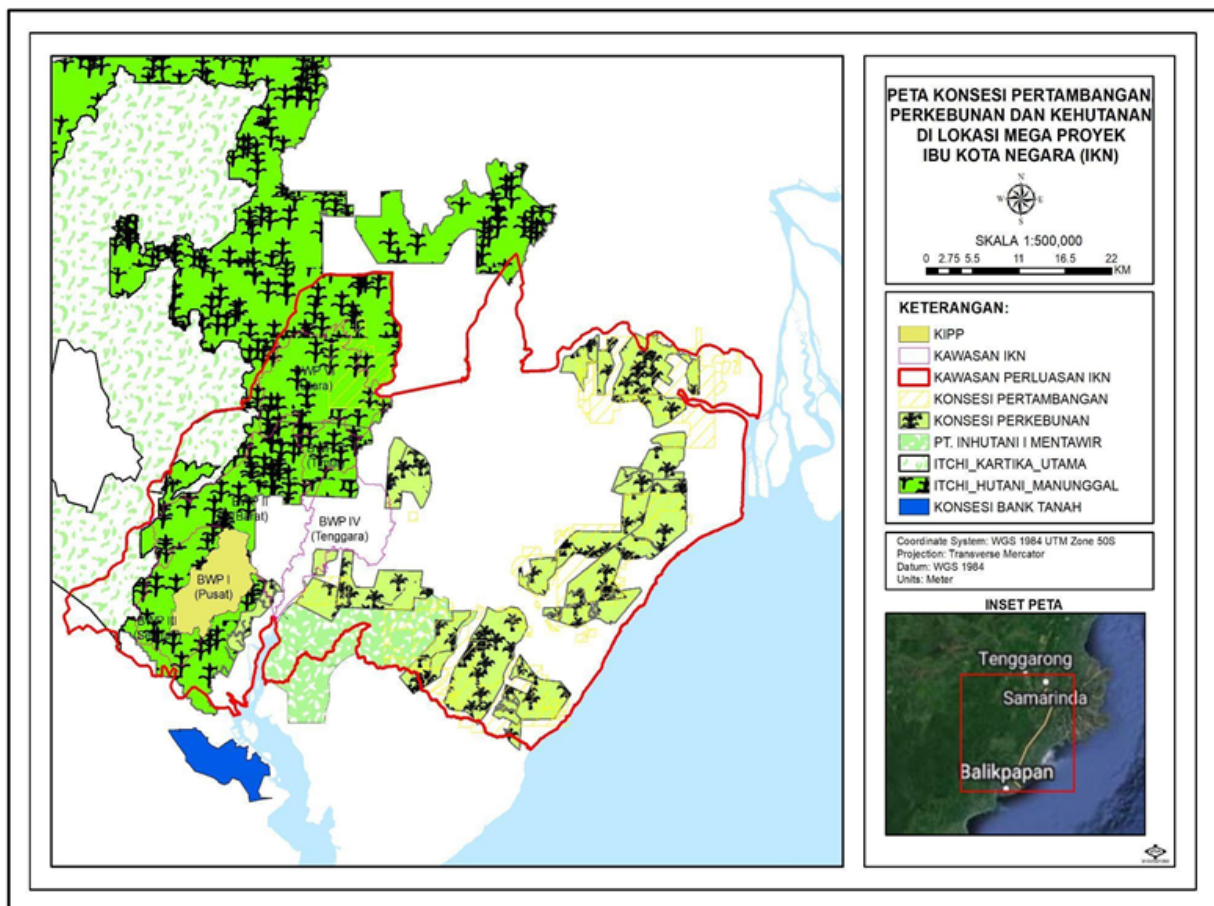
Jubain juga menceritakan bagaimana operasi penggundulan hutan terjadi di antara 1984-1985. Jenis-jenis kayu hilang diantaranya adalah

51 <https://money.kompas.com/read/2021/02/14/100200126/profil-sukanto-tanoto-raja-saw-it-yang-beli-bekas-istana-raja-jerman?page=all> diakses pada 19 Juni 2023

52 <https://itcihutanimanunggal.co.id> diakses pada tanggal 5 Mei 2023

53 Wawancara bersama Mustafa pada 21 Juni 2022

54 Wawancara bersama Jubain 21 Juni 2022



Gambar 15. Peta konsesi pertambangan, perkebunan dan industri kehutanan di wilayah Ibu Kota Baru.

Sengon, Ulin, dan Kapur. Perusakan hutan ini juga menyebabkan tradisi Mulung atau tradisi pengobatan orang Balik tergerus bahkan hilang. Ia menilai ada kaitan erat antara melemahnya tradisi pengobatan dan hilangnya hutan sebagai ruang hidup. “Mulai hilang budaya saat ramai-ramai pembabatan hutan di sini,” bebernya.

Tak hanya ruang hidup yang dirusak. Perusahaan ketika itu tak memperdulikan fasilitas sosial bagi orang orang Balik. Sebagai contoh, Jubain bisa mengenyam pendidikan dari usaha swadaya orang orang di kampung yang mendirikan sekolah di bekas kantor desa. “Saat itu usia saya sudah sekitar 15 tahun baru belajar di sekolah swadaya. Pada usia 17 tahun baru ada sekolah SD inpres di kampung ini,” ujarnya. Antara sekolah swadaya dan kehadiran sekolah SD Inpres, Jubain sempat menganggur selama dua tahun. Usai tamat dari sekolah SD ia

melanjutkan sekolah SMP yang jaraknya sekitar 8 km dari Pamaluan di desa tetangga Binuang.

Jubain mengaku perusahaan ITCI memiliki sekolah tersendiri. Anak-anak kampung tidak diperkenankan masuk sekolah di sana. Hanya orang-orang pekerja tetap di perusahaan yang dapat mengenyam pendidikan di sekolah ITCI. Selain karyawan boleh asalkan membayar uang sekolah dan. "Itu pun kita kena pungutan," keluhnya. Sesuatu yang sulit dilakukan oleh orang-orang kampung. Kehidupan orang-orang kampung dengan orang-orang perusahaan berbanding terbalik. "orang-orang perusahaan makmur dia," ujarnya.

Diluar ITCI, beberapa masyarakat juga menyebut PT SITA. Sahran warga Sepaku menyebut perusahaan yang juga sempat beroperasi di dekat sungai Sepaku ini. "Dulu di sini hutan, ada PT SITA. Mereka mengambil kayu untuk di ekspor. Alat-alatnya juga ada di pinggir sungai ini, seperti *logging tractor* dan *lorry*. Saya tahu karena begitu PT SITA masuk membalak kayu di sini, bapak saya juga masuk pake perahu. Beikatliah (diparkir) perahu di sini, merintis di sini", jelas Sahran.

"Mereka pakai *tractor*, mendorong kayu hutan, dan membangun jalan. Berpuluh tahun SITA itu ambil kayu. Makanya dulu sempat ada nama Sepaku SITA lama. SITA pindah lalu masuklah PT ITCI", kenang Sahran⁵⁵.

Menurut data yang dikumpulkan oleh JATAM Kaltim, hingga kini terdapat 10 konsesi perkebunan sawit dan 180.000 hektar atau 162 IUP/PKP2B yang berada pada lokasi "konsesi" megaprojek Ibu Kota Baru.

Alih-alih dicabut izin atau kontraknya, konsesi bisnis lahan skala besar ini malah potensial diberikan berbagai kemudahan dan keringanan kewajiban, seperti yang ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal

55 Rekaman Wawancara Syahran (55 Tahun), 26 Februari 2023



Gambar 16. Lubang tambang batu bara di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku bagian dari kawasan Ibu Kota Baru yang belum dipulihkan, milik PT. Mandiri Sejahtera Energindo.

bagi Pelaku Usaha di ibu Kota Nusantara, pemerintah memberikan justru kembali keistimewaan bagi HGU (hak guna usaha) termasuk HGU perkebunan sawit untuk mengelola lahan hingga 95 tahun. Sebelumnya usia konsesi maksimal 35 tahun lamanya. Belum lagi ditambah dengan penawaran fasilitas lain seperti *tax holiday*, *super tax deduction*, pembebasan bea masuk hingga PPN impor⁵⁶.

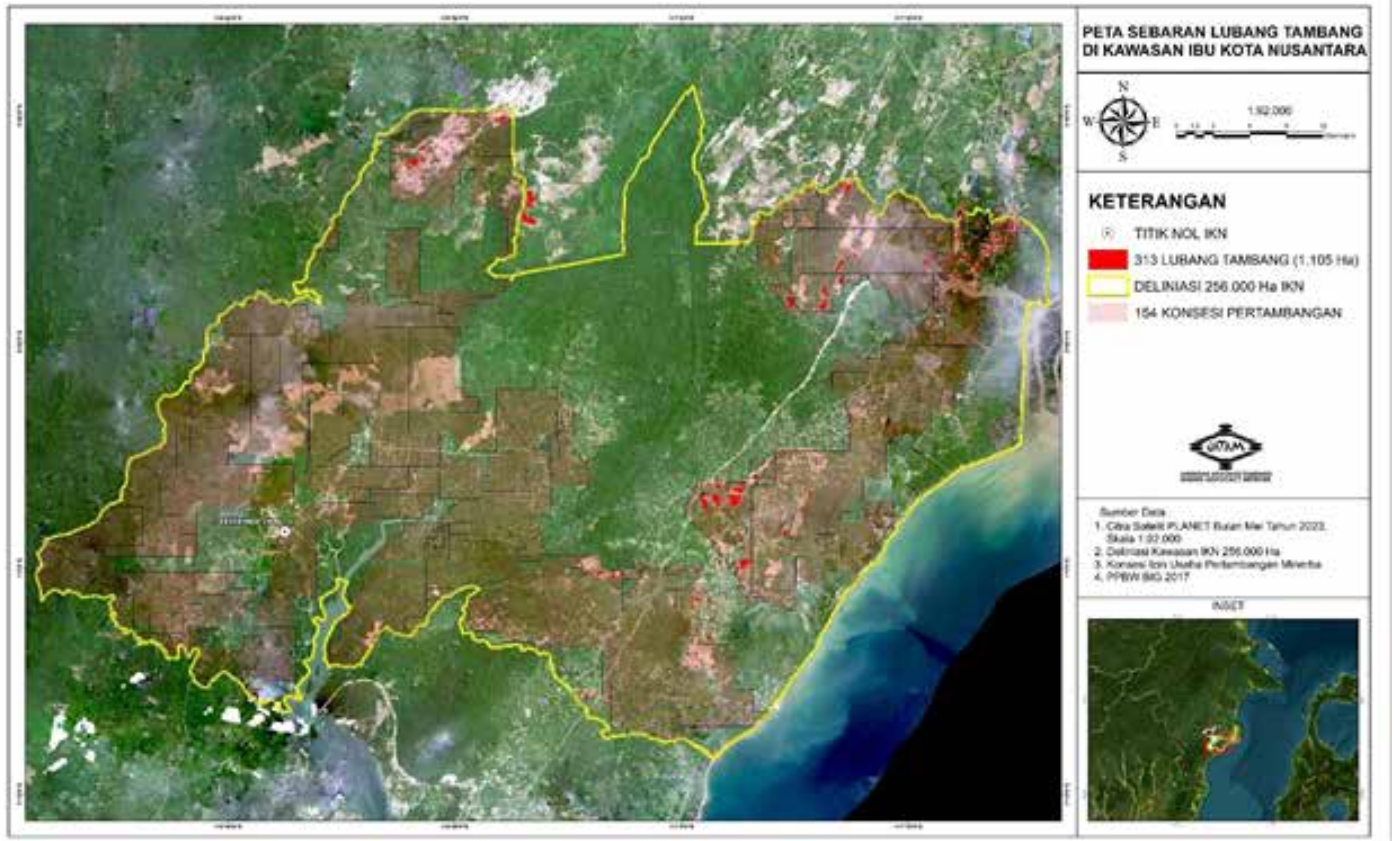
Tambang-tambang batubara juga meninggalkan banyak lubang tambang, di kawasan konsesi Ibukota baru ini bahkan terdapat 313 lubang tambang yang luasnya mencapai 1.105 Hektar⁵⁷.

Tidak ada rencana yang terstruktur dalam pemulihan kawasan dan lubang-lubang tambang di kawasan IKN. Sejak diumumkannya agenda pemindahan ibukota pada Agustus 2019 hingga saat ini, pemulihan hanya menjadi wacana dan sekedar himbauan belaka⁵⁸. Sampai saat

56 <https://finance.detik.com/properti/d-6605729/investor-ikn-bisa-dapat-hgb-80-tahun-kalau>, diakses 20 Juli 2023

57 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220203164809-20-754698/jatam-temuan-lubang-bekas-tambang-di-ikn-bertambah-kini-149> diakses pada 20 Juli 2023

58 <https://nasional.tempo.co/read/1695000/jokowi-minta-perusahaan-hijaukan-lagi-lubang-tambang-di-sekitar-ikn>, diakses pada 20 Juli 2023



Gambar 17. Peta Sebaran lubang Tambang di kawasan Ibu Kota Nusantara.

ini tak satupun lubang tambang yang berada di kawasan IKN berhasil dipulihkan.

Operasi pertambangan tidak hanya mewariskan lubang-lubang bekas tambang. Keberadaan pertambangan batubara ilegal juga menjadi masalah baru di kawasan IKN, seperti yang terjadi di Bukit Tengkorak. Yang muncul kemudian justru wacana legalisasi tambang ilegal disana⁵⁹.

59 <https://kaltimpost.jawapos.com/kaltim/07/06/2023/wacana-legalisasi-tambang-di-bukit-tengkorak-harus-izin-otorita-ikn>, diakses 20 Juli 2023

b. Era Jokowi : Ibu Kota Baru, Legacy untuk Oligarki



Gambar 18. Jokowi bersama menteri *camping* di Sepaku.

III.b.i. Menghabiskan Uang Rakyat untuk Menggusur Rakyat

Selain akan membongkar bentang alam dan menggusur manusia dan yang bukan manusia, megaprojek pemindahan ibu kota ini merupakan rangkaian rencana proyek infrastruktur raksasa dengan dana publik dan investasi pemilik modal swasta.

Diketahui bahwa 25,9 Triliun rupiah dana publik diambil dari APBN, untuk membiayai berbagai proyek tersebut di atas di antara tahun 2022 dan 2024⁶⁰. Proyek-proyek infrastruktur tersebut antara lain adalah: Infrastruktur Sumber Daya Air berupa Bendungan Sepaku Semoi, Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sepaku, serta Pengendalian DAS Sanggai dan Penyediaan Air Baku Persemaian Mentawir. Lalu 13 kegiatan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, enam kegiatan untuk Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi, Bangunan Gedung, pembangunan perumahan termasuk

60 Laporan Progres Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, 29 Desember 2022



Gambar 19. Sukanto Tanoto (kiri) dan Hashim Djojohadikusumo pemilik PT ITCI Hutani Manunggal dan PT ITCI Kartika Utama.

proyek pembangunan Pusat Pemerintahan seperti Istana Kepresidenan serta kompleks kementerian.

Selain “menambang” dari APBN, pemerintah bahkan mengajukan sumber pendanaan yang berasal dari urunan dana publik, dalam pernyataan Badan Otorita Ibu Kota Negara dan Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono. Ia menyatakan bahwa optimalisasi sumber dana alternatif untuk pembangunan proyek IKN, seperti urun dana atau *crowdfunding*, bertujuan untuk menekan beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN⁶¹. Sumber dana lainnya dapat berupa pendanaan kreatif (*creative financing*), seperti *crowdfunding*, dana filantropi, ataupun dana *corporate social responsibility* (CSR). Sidik menegaskan bahwa *crowdfunding* merupakan mekanisme yang sah untuk memperoleh pendanaan IKN. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal tidak ada perencanaan pemenuhan kebutuhan dana dan pembiayaan yang matang. Tampak terlihat bagaimana berbagai tambal-sulam dilakukan untuk membiayai proyek.

61 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220325/9/1514957/otorita-ikn-tegaskan-crowdfunding-itu-mekanisme-sah-untuk-pendanaan-ibu-kota-baru> diakses pada 14 Februari 2023



Gambar 20. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Brodjonegoro

III.b.ii. Pesta Oligarki Lokal, Nasional dan Global

Megaproyek IKN bukan hanya menyangkut pengerahan dana publik yang membebani APBN. Dengan mengundang investasi pemilik modal swasta, megaproyek tersebut diduga berpeluang menjadi semacam pesta yang sangat menguntungkan bagi para oligark, dari tingkat lokal sampai internasional.

Kehadiran mega proyek Ibu kota negara menjadi ladang keuntungan bagi para politisi dan pebisnis yang memiliki keterkaitan dengan penguasa konsesi lahan di kawasan megaproyek. Beberapa di antaranya bisa dikemukakan di sini. Sosok yang pertama adalah Sukanto Tanoto, pemilik PT ITCI Hutani Manunggal (PT IHM) yang menjadi wilayah 'ring 1' pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Ia terhubung dengan kasus skandal pajak PT Asian Agri yang merupakan kasus skandal pajak terbesar di Indonesia⁶². Ia juga terhubung dengan sejumlah kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

62 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220325/9/1514957/otorita-ikn-tegaskan-crowdfund-ing-itu-mekanisme-sah-untuk-pendanaan-ibu-kota-baru> diakses pada 14 Februari 2023

(Karhutla) 2015 dan 2019 di Sumatera-Kalimantan⁶³. Kekayaan Sukanto Tanoto menurut majalah Forbes pada tahun 2023 terus naik mencapai 2,9 Miliar USD, yang menempatkan laki-laki berusia 73 tahun ini di antara 50 orang terkaya Indonesia.

2015 dan 2019 di Sumatera-Kalimantan . Kekayaan Sukanto Tanoto menurut majalah Forbes pada tahun 2023 terus naik mencapai 2,9 Miliar USD, yang menempatkan laki-laki berusia 73 tahun ini di antara 50 orang terkaya Indonesia⁶⁴.

Sosok kedua adalah Hashim Djojohadikusumo, komisaris utama PT ITCI Kartika Utama (PT ITCI KU), adik kandung Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin dan calon presiden dari partai Gerindra pada pemilu 2024. Lahan konsesi PT ITCI KU ini juga menjadi bagian dari 'ring 2' wilayah dari rencana mega proyek ibu kota baru.

Sosok berikutnya adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Ia adalah pemilik PT Toba Bara Sejahtera (PT TBS). Ia menjabat sebagai Menteri Maritim dan Investasi Kabinet Indonesia Maju. Setelah konsesi ibukota baru (IKN) mengalami perluasan kawasan menjadi 256 ribu hektar, maka wilayah konsesinya terhubung melalui anak group PT TBS, perusahaan tambang batubara dan sawit miliknya yang berada dalam kawasan penyangga IKN, dan masih menyisakan 50 lubang menganga⁶⁵. Seperti dimuat di berbagai media, Bambang Brodjonegoro, Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta 'arsitek' awal perluasan wilayah IKN, telah diangkat menjadi komisaris PT TBS.⁶⁶

Berikutnya Rheza Herwindo yang merupakan penguasa lahan melalui sejumlah perusahaan miliknya, yaitu PT Eka Dwi Panca (EDP), PT Mutiara

63 Silahkan baca buku Saksi Kunci Saksi Kunci: Kisah Nyata Perburuan Vincent, Pembo-cor Rahasia Pajak Asian Agri Group Penulis : Metta Darma Saputra, silahkan baca resensinya di sini : <https://www.setaranews.com/2017/03/resensi-buku-saksi-kunci-kisah-nyata.html>

64 <https://www.forbes.com/profile/sukanto-tanoto/?sh=7ac4dd8414a6>, diakses pada 14 Februari 2023

65 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220207112818-20-755940/jatam-ungkap-bukti-lubang-tambang-luhut-di-kaltim-12-di-kawasan-ikn> , diakses pada 14 Februari 2023

66 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210618091442-92-656037/bambang-brodjonegoro-diangkat-jadi-komisaris-toba-bara> , diakses pada 14 Februari 2023

Panca Pesona (MPP), dan PT Panca Artha Mulia Serasi (PAMS). Ia adalah anak kandung dari Setya Novanto, terpidana kasus korupsi e-KTP⁶⁷. Berikutnya, Yusril Ihza Mahendra yang terhubung dengan PT Mandiri Sejahtera Energindo (MSE), ia juga merupakan ketua tim pengacara Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemilu 2019 dan saat ini juga menjabat sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) 2019-2024⁶⁸.

Nama penguasa lahan lainnya yang muncul adalah Lim Hariyanto dan istrinya Rita Indriawati mereka adalah pemilik PT Harita Jaya Group. Nama mereka juga muncul dalam laporan *International Consortium of Investigative Journalist* (ICIJ), *skandal Offshore Leaks*⁶⁹. Harita Jaya Group adalah perusahaan utama pemain bisnis Nikel dan bauksit untuk baterai kendaraan listrik yang menyebabkan kerusakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia bagian timur. Bauksit mereka dikelola oleh Cita Mineral Investindo

yang akan mendirikan pabrik di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Bulungan, Kalimantan Utara. Mereka juga terhubung dengan Yayasan Keluarga Besar Polri Brata Bhakti⁷⁰.

Berikutnya adalah Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono. Ia terhubung dengan PT Arsari Tirta. Perusahaannya diduga menerima manfaat pembangunan penyedia bisnis air bersih untuk Ibu Kota Baru dan sekitarnya⁷¹. Ia adalah bendahara Partai Gerindra⁷², dan juga keponakan Prabowo Subianto.

Berikutnya adalah Irjen Pol. Dody Sumantyan Hadidojo Soedaryo, terhubung dengan PT Indo Ridlatama Power (IRP). Juga Mayjen A. Ibrahim Saleh, yang terhubung dengan PT Etam Manunggal Jaya (EMJ). Lalu, Letjen

67 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43579739> , diakses pada 14 Februari 2023

68 <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/tokoh/ketua-umum-partai-bulan-bintang-pbb-yusril-ihza-mahendra> diakses pada tanggal 08 Mei 2023

69 <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/81226> , diakses pada tanggal 08 Mei 2023

70 Laporan Riset lapang JATAM Kaltim, Januari - Maret 2023,Kebohongan Hijau: tentang Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki dan Keselamatan Rakyat Pada Tapak Proyek Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara (belum dipublikasikan)

71 <https://www.jatam.org/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik-atau-elit/> hal 9

72 <https://www.jatam.org/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik-atau-elit/> hal 12

Suaedy Marasabessy, Letjen Sintong Hamonangan Pandjatan, Brigjen Eddy Koestiwa Koesma terhubung dengan PT Toba Bara Sejahtera (TBS) Group. Berikutnya, Irjen Pol. Dody Sumantyan Hadidojo Soedaryo, yang terhubung dengan PT Baramulti Suksesarana (BS). Lalu ada Laksamana Syamsul Bahri, yang terhubung dengan PT Bintang Prima Energi Pratama (BPEP), dan Brigjen Pol. Viktor Edison Simanjutak terkait dengan PT Mandiri Sejahtera Energindo (MSE). Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim terhubung dengan PT Karya Agung Cipta KAC dan PT Tansri Madjid Energi (TME). Kedua perusahaan ini terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan batubara untuk PLN di Muara Enim yang merugikan negara Rp 477 Miliar.

Bukan saja aktor pengusaha dan politisi di tingkat nasional yang mendapatkan peluang cari untung dan terhubung dengan megaprojek IKN, namun juga terdapat sejumlah sosok berkelas global yang ditempatkan sebagai anggota Dewan Pengarah atau Steering Committee megaprojek IKN, termasuk beberapa sosok berikut.

Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), Presiden Uni Emirat Arab (UEA) dan penguasa Abu Dhabi. Presiden Jokowi mengharapkan dana UEA mengalir ke mega proyek IKN, selain membagikan jabatan SC, untuk memuluskannya pemerintah Indonesia bahkan juga mengganti nama Jalan yang semula bernama Jalan tol layang Jakarta-Cikampek menjadi jalan layang Mohammed Bin Zayed Al Nahyan pada April 2021. Sosok Mohammed Bin Zayed dan Uni Emirat Arab pernah dikaitkan dengan dakwaan kasus skandal korupsi 1 MDB melalui mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak pada tahun 2020 lalu. Kasus ini mengaitkan MBZ melalui sejumlah rekaman percakapan telpon yang diduga sebagai bagian dari kasus korupsi 1MDB.

Tony Blair mantan Perdana Menteri Inggris. Mantan perdana menteri Inggris ini dianggap terlibat dalam kejahatan perang saat invasi Irak pada 2003, dan telah memantik protes dan desakan untuk diperkarakan secara hukum.⁷³

⁷³ <https://www.theguardian.com/politics/2017/jul/05/tony-blair-should-be-prosecuted-over-iraq-war-high-court-hears>, diakses 08 Mei 2023



Gambar 21. Aktor Global Tony Blair dan Mohammed bin Zayed.

Masayoshi Son, CEO Softbank, Jepang. Ia bukan sekedar keluar dari keanggotaannya dalam Dewan Pengarah megaprojek IKN pada awal tahun 2022, tetapi juga memutuskan untuk membatalkan rencana investasinya dalam megaprojek IKN,⁷⁴ antara lain juga karena masalah internal Softbank sendiri⁷⁵.

Hal-hal diatas memunculkan pertanyaan kritis tentang mengapa sebuah rencana investasi raksasa pembangunan Ibukota baru Indonesia dimulai dengan melibatkan para figur pebisnis dan politisi global yang bermasalah, korup dan terlibat dalam kejahatan perang di negara lain.

III.c.iii. Karpas Merah untuk Investor Tetapi Masih Bergantung Pada Dana Publik

Dari mana sumber pembiayaan mega proyek IKN ini berasal? Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah menyatakan bahwa 80 persen dari pembiayaannya berasal dari dana yang

74 <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-11/softbank-s-son-cedes-indonesia-new-capital-to-middle-east-funds#xj4y7vzkg>

75 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221215142524-37-397242/investor-start-up-ini-rugi-ratusan-triliun-batal-modal-i-kn>, diakses pada 08 Mei 2023

akan dibawa oleh investor dan hanya 20 persen yang diklaim berasal dari APBN. Skema anggaran diatas terdiri dari dana APBN sebesar 89 triliun, dari swasta sebanyak 123 triliun dan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebanyak 253 triliun, yang total keseluruhannya mencapai 466 triliun⁷⁶.

Badan Otorita mengklaim ada 200 investor⁷⁷, namun dari rincian yang dipaparkan media, disebutkan 90 investor yang sudah menandatangani LOI (*Letter of Intent*), mencakup berbagai sektor. Rinciannya, 25 pada sektor infrastruktur dan utilitas, 15 pada sektor edukasi, 14 pada sektor jasa konsultasi, 10 pada sektor perumahan, serta sembilan pada sektor *mixed use* dan komersial. Lalu, enam pada sektor teknologi, lima pada sektor kesehatan, empat kantor BUMN dan swasta, dan dua kantor pemerintah⁷⁸.

Beberapa Investor yang saat ini tengah melakukan penjajakan terkait kemungkinan akan berinvestasi di IKN, hingga akhir Desember 2022, adalah *Korean Land and Housing Corporation* (BUMN Korea bidang pengembangan lahan kota), *Truba Trinitiland*, *China Constructions First Group Corporation Limited*, dan Summarecon. Kesemuanya masih sebatas menyeter dokumen *Letter Of Intent* baik kepada Kementerian PUPR atau Kepala Otorita IKN⁷⁹.

Namun, LOI bukanlah sebuah kepastian bahwa uang swasta atau investor akan, apalagi sudah, 'mendarat' ke dalam mega proyek ini. Sejumlah keluhan muncul dari kalangan pejabat pemerintah sendiri, yang menunjukkan bahwa belum ada realisasi sesungguhnya dari investasi pihak swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN)⁸⁰. Beberapa keluhan menyebut mekanisme pembelian tanah untuk investasi IKN, menjadi salah satu penyebab realisasi terhambat. Seluruh proyek kini pun akhirnya masih bergantung oleh dana publik atau APBN.

76 <https://nasional.kontan.co.id/news/tak-ada-perubahan-porsi-anggaran-dari-apbn-untuk-pembangunan-ikn> , diakses pada 14 Februari 2023

77 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230504115153-92-945145/200-investor-sampaikan-surat-pernyataan-minat-investasi-di-ikn> diakses Pada 14 Februari 2023

78 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230504115153-92-945145/200-investor-sampaikan-surat-pernyataan-minat-investasi-di-ikn>

79 Laporan Progres Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR 29 Desember 2022

80 <https://www.cnbciindonesia.com/news/20230502150356-4-433762/proyek-investor-di-ikn-sepi-ternyata-ini-biang-keroknya> , diakses pada 14 februari 2023



Gambar 22. Nama Perusahaan yang melakukan Lol (*letter of Intent*).

Pada Oktober 2022, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, yang berperan seperti 'calo' menawarkan insentif perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) hingga 160 tahun bagi calon investor di Ibu Kota

Nusantara tawaran itu dikritik dan diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lazim disebut UUPA 1960. Menurut berbagai organisasi masyarakat sipil, pemberian HGB dalam UUPA 1960 paling lama adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun⁸¹. Menurut Hadi, HGB selama 80 tahun itu nantinya dibagi tiga tahap, yakni tahap pertama 30 tahun, tahap kedua 30 tahun, dan tahap ketiga 20 tahun. Lebih lanjut, perizinan HGB selama 80 tahun tersebut masih bisa diperpanjang lagi hingga 80 tahun⁸².

81 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221020095931-20-863052/kpa-pemberian-hgb-160-tahun-kepada-investor-di-ikn-langgar-uu-agraria> , diakses pada 14 februari 2023

82 <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5093390/menteri-hadi-tjahjanto-tawarkan-hgb-hingga-160-tahun-di-ikn-nusantara> , diakses pada 14 februari 2023

Selain HGB, kemudahan lain juga diberikan melalui pasal 18 di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di ibu Kota Nusantara. Pemerintah memberikan kembali keistimewaan bagi pemegang HGU (hak guna usaha) untuk mengelola lahan hingga 95 tahun, sementara sebelumnya durasi maksimumnya hanya 35 tahun lamanya. Belum lagi ditambah dengan penawaran fasilitas lain seperti *tax holiday*, *super tax deduction*, pembebasan bea masuk hingga PPN impor⁸³.

83 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230104/45/1615006/kado-awal-tahun-aturan-insentif-ikn-segera-meluncur> , diakses pada 9 Mei 2023



IV. Para Perempuan Penjaga Ruang Hidup dan Rekaman Krisis Tak Berkesudahan di Dua Tapak Proyek

“Menurut mereka, (pelaksana proyek dan pemerintah) bapak-bapak lebih enak ditanya, berbeda dengan ibu-ibu yang kebanyakan protes, perempuan biasanya tidak diundang ke pertemuan, hanya laki-laki saja, tapi kami tetap datang, saya dianggap perempuan yang paling tidak disenangi oleh mereka, karena saya senang ngoceh dan mengomel”.

(Bece, perempuan Suku Balik RT 3 Kelurahan Sepaku)

IV.a. Gambaran Umum Proyek

Di balik gambaran serba menyenangkan dari wajah fisik megaprojek IKN, pemandangan berbukit-bukit, rencana lanskap yang dirancang selaras dengan keadaan tapak, kompleks gedung tempat penyelenggaraan



Gambar 23. Proyek Intake Sungai Sepaku di Kelurahan Sepaku.

kegiatan mengurus negara, perumahan para pegawai tinggi yang megah, ada banyak masalah yang lebih sedikit dikemukakan kepada publik.

Bagi sebuah kota-besar yang hendak dibangun dan dioperasikan cepat-cepat bak sebuah pertunjukan akrobat atau pameran kekuatan-otot, terdapat berbagai masalah "teknis", seperti keberlanjutan pasokan energi listrik maupun energi lainnya, atau kemudahan dan kelancaran ketersediaan air bersih dalam volume raksasa, di tengah krisis ekologis yang sudah lama menggerogoti bentang-bentang air di Kalimantan sebelah Timur dan yang tidak lagi bisa dijamin keberlanjutan sumber-sumbernya karena perubahan iklim. Di atas kertas, sebagian masalah-masalah utama tersebut mungkin bisa dipecahkan lewat berbagai rekayasa skala besar. Tapi seperti halnya dengan proyek-proyek raksasa lain yang dimulai dengan hasrat dan kalkulasi pertumbuhan ekonomi serta kemudahan pembiayaan, bukan berasal dari tuntutan kemendesakan yang dirasakan publik di wilayah proyek berada, kebanggaan akan daya-capai dari pengerahan teknologi rekayasa alam harus dikoreksi dengan pertanyaan:



Gambar 24. Peta Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Sepaku Untuk Kawasan Sepaku, Tahun Anggaran 2021.

siapa yang bakal menanggung akibat-akibat langsung dan jangka panjang dari pencapaian teknis tersebut?

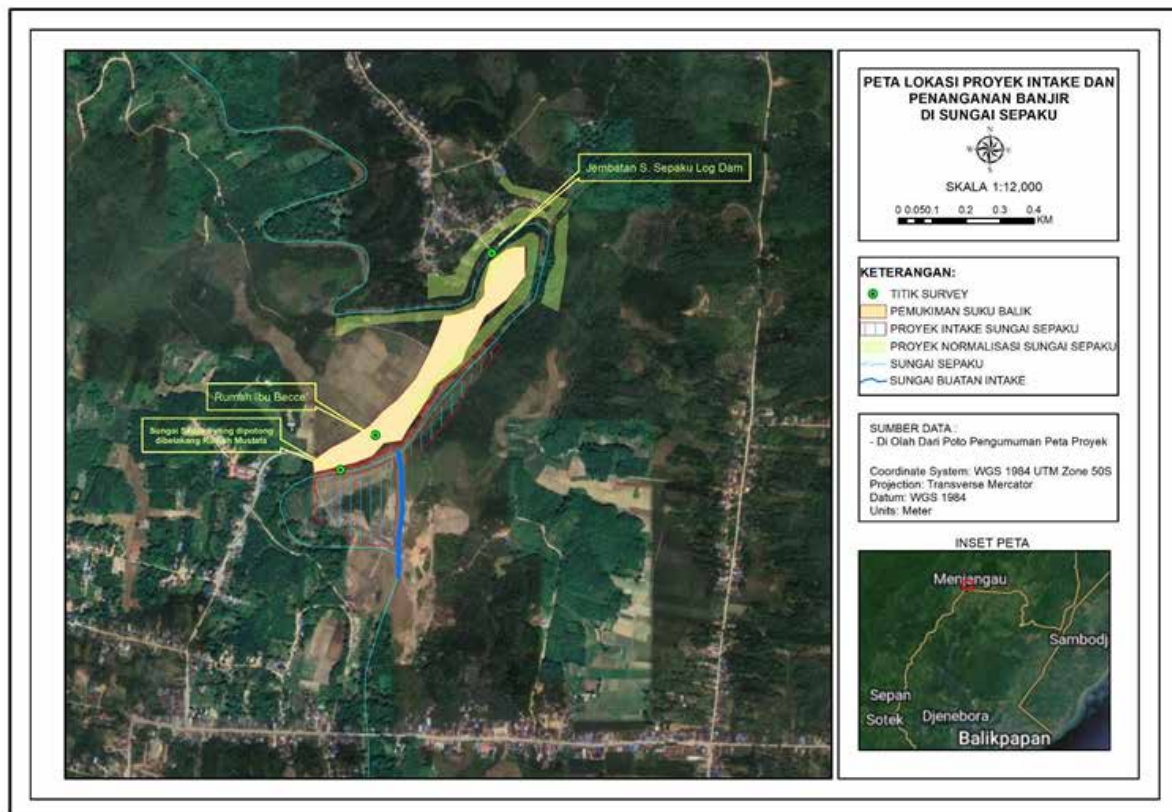
Laporan ini menyoroti sejumlah proyek infrastruktur sumber daya air yang akan merampas dan menghancurkan dua bentang sungai yang memiliki ikatan sejarah, sosial dan ekonomi dengan komunitas dan perempuan masyarakat suku Balik.

Proyek tersebut adalah Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku dan Jaringan Pipa Transmisi Sepaku serta Penanganan Banjir Sungai Sepaku Kecamatan Sepaku (IKN). Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi bersama Bendungan Intake Sepaku ini demi melayani 1,5 hingga 1,9 juta penduduk baru kawasan Inti Ibukota⁸⁴.

Proyek Bendungan Sepaku-Semoi yang berlokasi di Desa Tengin Baru bernilai 556 Miliar rupiah⁸⁵, dengan kapasitas tampung 10,6 juta m³ dan luas genangan 280 hektare. Di atas kertas, bendungan ini diharapkan bisa memasok kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter/detik, sebanyak 2000

84 <https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2022/11/Megaprojek-Ibukota-Baru-di-Indonesia-Final.pdf> diakses pada 9 Mei 2023

85 LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Informasi Tender (pu.go.id) diakses pada 08 Mei 2023



Gambar 25. Peta lokasi proyek intake dan proyek penanganan banjir di Sungai Sepaku.

liter/detik untuk IKN Nusantara dan sisanya 500 liter/detik untuk kota Balikpapan. Sementara itu, Proyek Intake seluas 13,2 hektare beserta Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku bernilai 344 miliar rupiah⁸⁶, dan di atas kertas akan mampu memasok air baku sebesar 3.000 liter/ detik.

Proyek lainnya yang terkait dengan rekayasa bentang air adalah proyek Penanganan Banjir Sungai Sepaku yang bernilai 242 miliar rupiah, yang terhubung dan bersebelahan dengan proyek Intake Sepaku. Proyek Penanganan banjir ini akan membangun sejumlah tanggul di kanan dan kiri aliran sungai. Pada kanan aliran panjang tanggul tanah mencapai 1.728,172 meter dan bagian kiri aliran 706,178 meter. Ada pula CCSP (*Corrugated Concrete Sheet Pile*) sepanjang 1.647,230 meter di kanan aliran dan kiri alirannya 670,081 meter. Selain itu ada pula tanggul panel pracetak⁸⁷.

86 <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/72932064/pengumumanlelang> diakses pada 08 Mei 2023

87 Papan informasi proyek penanganan banjir sungai sepaku yang berada di RT 03 Kelurahan Sepaku



Gambar 26. Dua perempuan keturunan suku Balik di nisan kayu kuburan ratusan tahun milik masyarakat Balik yang tergusur proyek Intake Sungai Sepaku.

Tender dari Proyek Pembangunan Prasarana Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku dimenangkan oleh PT Adhi Karya Tbk. Proyek yang menyiapkan infrastruktur fisiknya telah dimulai pada Mei 2021 ini⁸⁸ juga telah mengubah kehidupan yang sejak dulu bertumpu pada Sungai Sepaku. Sudah sepuluh keluarga suku Balik kehilangan akses terhadap sungai pembangunan intake Sepaku tersebut. Air untuk kebutuhan sehari-hari yang dulu diperoleh cuma-cuma dari Sungai kini harus dibeli. Mereka juga harus menunggu pembagian air dari pihak kontraktor proyek Bendungan, karena terputusnya akses warga ke sungai Sepaku⁸⁹. Bahkan masyarakat harus memilih memindahkan sekitar 35 makam leluhur Suku Balik yang sudah ada disana sejak 200 tahun lamanya, daripada membiarkan kompleks makam tersebut dibongkar bulldozer.

Perusahaan memperlakukan makam-makam ini seperti barang yang bisa ditawarkan dan dibeli, menurut kesaksian Bece' (55 Tahun). Perempuan suku

88 <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/72932064/pengumumanlelang>

89 <https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2022/11/Megaprojek-Ibukota-Baru-di-Indonesia-Final.pdf> halaman 10, diakses pada tanggal 9 Mei 2023

LARAP Bendungan Mujur Ditolak! Ada 3 Poin Penting

Selasa, 25 Oktober 2022 – 09:01 WIB



Gambar 27. Rapat akbar masyarakat Desa Lelong, Lombok Tengah untuk menolak Dam Mujur.

balik ini mengatakan biaya ganti diharga sekitar 15 juta tiap makam atau nisan di Sepaku Lama.

Begitu juga proyek penanganan banjir Sungai Sepaku yang dijalankan oleh PT Abipraya dan Prima KSO sejak November 2022⁹⁰. Seperti juga proyek Intake, proyek penanganan banjir ini berlangsung sejak Februari 2023 sampai sekarang. Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV bersama dengan kontraktor (Abipraya dan Prima KSO) dan konsultan proyek, Aditya Engineering Consultant, saat ini sedang intensif menyelenggarakan serangkaian pertemuan konsultasi publik dengan warga terdampak, termasuk 22 warga RT 03, agar mereka menyerahkan tanah dan kampungnya, sebagai penerapan dari LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*).

Masyarakat tidak tinggal diam. Tindakan warga yang terbaru adalah aksi protes warga suku balik melalui pemasangan spanduk dan baliho, sebagai

90 <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/81474064/pengumumanlelang> diakses pada 8 mei 2023

tandingan terhadap pemasangan patok-patok dan pengukuran tanah secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pelaksana proyek penanganan banjir tersebut. Selain itu, pemasangan spanduk dan Baliho ini merupakan tindak lanjut dari penerapan hasil rapat musyawarah adat pada 13 Februari 2023, yang dihadiri lebih dari 80 warga Sepaku Lama dan Pamaluan.

Rapat musyawarah tersebut melahirkan 8 butir tuntutan warga sebagai berikut⁹¹:

1. Masyarakat adat suku balik di Lokasi IKN terdampak menolak program penggusuran kampung.
2. Masyarakat adat sepakat tidak mau di relokasi atau di pindahkan ke daerah lain oleh Pemerintah.
3. Masyarakat adat menolak penggusuran situs-situs sejarah leluhur, kuburan atau tempat-tempat tertentu yang diyakini masyarakat adat sebagai situs adat suku balik turun-temurun.
4. Masyarakat Adat Suku Balik menolak dengan keras dipindahkan(Relokasi) atau di pisahkan dari tanah leluhur.
5. Masyarakat Adat Suku Balik di Kecamatan Sepaku Menolak perubahan nama kampung dan nama-nama sungai yang selama ini kami kuasai.
6. Masyarakat Adat Suku Balik meminta kepada Pihak Pemerintah Segera membuat kebijakan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Suku Balik di Kecamatan Sepaku.
7. Meminta Pemerintah melakukan perhatian khusus terhadap suku balik yang terdampak aktifitas pembangunan IKN, baik dampak lingkungan serta dampak sosial yang di rasakan oleh masyarakat adat suku balik di Kecamatan Sepaku.
8. Masyarakat Adat Suku Balik Menolak serta tidak bertanggungjawab jika ada tokoh atau kelompok yang mengatasnamakan mewakili atasnamakan suku Balik

91 <https://aman.or.id/regional-news/pernyataan-sikap-masyarakat-adat-suku-balik-terhadap-pembangunan-dan-menolak-pembangunan-ibu-kota-negara-baru-yang-merusak> diakses pada tanggal 9 mei 2023

melakukan kesepakatan terkait kebijakan di IKN tanpa melibatkan secara langsung komunitas Adat.

Masyarakat juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap Suku Balik yang terdampak aktivitas pembangunan IKN, baik dampak lingkungan serta dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat adat suku Balik di Kecamatan Sepaku⁹².

Di samping kegiatan operasi di lapangan yang sifatnya fisik, juga terdapat sejumlah proyek non fisik yaitu proyek supervisi (Berkaitan dengan pemberian jasa konsultasi dan pengawasan) seperti pada proyek Supervisi Pembangunan Prasarana Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku dengan nilai 12,7 Miliar⁹³.

Proyek non fisik lainnya berkaitan dengan jasa konsultasi dan penelitian seperti LARAP Tahap II Bendungan Sepaku Semoi senilai 1,7 Miliar rupiah, LARAP Pengendalian Banjir Kec. Sepaku senilai 2,1 miliar rupiah, dan Studi LARAP Bendungan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara senilai 1,4 Miliar rupiah⁹⁴.

LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) merupakan rencana tindak penanganan dampak sosial ekonomi akibat pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang disyaratkan sebelumnya oleh Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB) dan *Islamic Development Bank* (IDB). Pada tahun 2012 pemerintah Indonesia mengadopsi dan mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum⁹⁵. Pada kenyataannya LARAP adalah mekanisme untuk membujuk yang memanipulasi masyarakat untuk melepaskan tanahnya atas nama pembangunan dan kepentingan

92 Berita Acara Hasil Rapat Bersama Suku Balik Sepaku Lama dan Pemaluan (Gambar 56 Hal 108)

93 <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/72937064/pengumumanlelang> diakses pada 9 Mei 2023

94 <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang> diakses pada 9 Mei 2023

95 Penyusunan Dokumen LARAP Bidang Jalan, <https://simantu.pu.go.id/> diakses pada 9 Mei 2023

umum. contoh-contoh proses penolakan masyarakat terhadap proyek-proyek LARAP terbentang mulai Aceh hingga Papua⁹⁶.

IV.b. Daya Rusak Proyek, Kerugian, Penderitaan dan Kerusakan Bentang Sungai

Bukan hanya tempat tinggal yang akan hilang akibat berbagai proyek tersebut, akan tetapi juga akses mereka terhadap Sungai Sepaku. Salah satunya yang dialami oleh Mustapa, ia adalah salah satu dari sekitar 90 keluarga di Sepaku lama, Penajam Paser Utara. Ia tinggal dekat dengan sempadan Sungai Sepaku, di Jalan Datu Nondol. Mustapa adalah ketua kelompok Tani, Bolum Taka, ia merupakan Suku Balik, lahir di wilayah Mentawir yang juga tidak jauh dari tempatnya kini tinggal.

Sungai Sepaku yang mengalir di Kelurahan Sepaku lama adalah urat nadi kehidupan, termasuk bagi Mustapa dan warga suku Balik lainnya.”Di sini 30 keluarga tinggal di sekitar atau dekat sungai Sepaku,” ujarnya sambil menunjuk sungai dibelakang rumahnya. Kini pemandangan di belakang rumahnya bukan lagi Sungai Sepaku, namun dari rumahnya terlihat sungai yang rusak dan tertutup oleh beton, terlihat juga sejumlah alat berat berupa *buldozer* dan *excavator* yang sedang bekerja hanya berjarak tidak lebih dari lima meter antara Sungai Sepaku yang sudah hancur dengan rumah Mustapa. Keluarga ini adalah salah satu korban yang berada paling dekat proyek pembangunan prasarana Intake Sungai Sepaku dan jaringan pipa transmisi sungai Sepaku⁹⁷. Dapur dan kamar mandi rumah Mustapa terpaksa dibongkar dan dipindah ke samping rumah akibat tanggul intake yang mengambil sebagian rumahnya.

96 Silahkan cek berita penolakan warga terhadap LARAP Bendungan di tiga wilayah dari Aceh, Lombok hingga Papua berikut ini; <https://www.kompas.com/properti/read/2022/08/05/113000621/dicoret-dari-daftar-psn-tahun-2022-begini-profil-bendungan-tiro-?page=all>, <https://headtopics.com/id/ratusan-warga-desa-lelong-demo-tolak-larap-bendungan-mujur-31138773>, <https://bovendigoelkab.go.id/berita/masyarakat-suku-muyu-kati-menolak-bendungan-digoel> diakses pada 9 Mei 2023.

97 <https://naladwipa.or.id/essay/kabar-keruh-dari-sungai-sepaku-penghancuran-berlapis-pada-masyarakat-suku-balik-dan-ruang-hidupnya> diakses pada 8 Mei 2023



Gambar 28. Aksi bentang spanduk menolak penggusuran oleh proyek di Sungai Sepaku.

Sebelum ada proyek intake sepaku, fungsi sungai sepaku adalah sebagai medium transportasi warga. Mustapa masih ingat bagaimana sungai menjadi jalur pendukung kehidupannya. Dengan menggunakan perahu, ia akan berlayar 6 kilometer ke hulu sungai menuju ladang dan kebunnya setiap hari, termasuk saat menjual hasil bumi dan hasil ladang serta kebun berupa sayur-sayuran dan buah-buahan ke Balikpapan. Mustapa menjualnya dengan ikut kapal ke Balikpapan. “Kalau pergi pagi-pagi, naik kapal, besok subuh sampai di Kampung Baru, Balikpapan,” kenang Mustapa.

Mustapa merasa dirugikan. Ia menceritakan kebun kecilnya di bantaran sungai, tempat ia menanam kelapa, pisang, sawit, aren dan buah-buahan seperti langsung. Makin rugi jika banjir saat air sungai meluber ke rumahnya beberapa waktu belakangan ini karena sungai telah ditimbun dan dipotong oleh *buldozer*, bersamaan dengan naiknya air sungai itu, ia dan keluarganya juga dicekam kekhawatiran. Ada buaya terperangkap disitu pak, saya khawatir kalau cucu saya bermain disini, karena sungai rusak, ia tidak bisa keluar dan mencari mangsa” ujar Mustapa.



Gambar 29. Mustapa berada di dapur rumah, pandangannya kini terhalang tanggul Pembangunan Proyek Intake yang “memotong” sungai di belakang rumahnya.

Satu deret di bantaran sungai Sepaku dengan Mustapa, kesaksian yang sama juga disampaikan oleh Bece, salah satu ia rasakan adalah kebisingan. “Kalau yang saya rasakan berisik tidak bisa tidur dan istirahat sejak mulai proyek, jadi bagi aku tidak ada yang bagus dan mengganggu sekali, kegiatan pembangunan dilakukan biasanya dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore ini sekarang, awal-awal dulu bisa sampai jam 10 malam,” kata Bece. “Ini karena banyak dari kami yang ‘komentar’ jadi langsung tidak dikerjakan sampai jam 10 malam lagi. Tetapi untuk yang sebelah sana bahkan dikerjakan sampai pagi sekitar jam setengah 5 pagi. Itu pun sekarang saja, nanti juga tidak tahu bagaimana. Ini sudah

terjadi sekitar 5 bulanan pada tahun ini,” tambah Bece⁹⁸.

“Selain itu dampak lainnya adalah rusak dan hilangnya pohon-pohon buah karena kegiatan ini ,seperti pohon aren, langsung, rambutan, nipah dan semua pohon yang pernah kita tanam”, ujar Bece’. Bece dan keluarganya juga cemas akan tergusur, karena patok-patok proyek sudah muncul di sekeliling rumah mereka, “Kami takut nantinya kami tergusur, makanya kemarin anak saya bertanya, “Bagaimana mak, tanah bagian mamak di sini tidak dipatok ulang dan kena gusur lagi? Nggak, kalau mereka patok lagi, saya cabutlah, sekarang aku cari masalah !”, tegas Bece.

98 Rekaman wawancara bersama Bece 28 Oktober 2022



Gambar 30. Obat Air (Tawas) untuk menjernihkan air

“Teman saya yang tinggal di lorong enam tanahnya kena patok, lalu patoknya dicabut sama dia, padahal jauhnya itu tanahnya di lorong enam, bisanya kena patok proyek juga”, sambung Udin suami dari Bece’ yang ikut duduk bercerita.

Selain gangguan kebisingan, hilangnya pohon buah dan intimidasi dari pemasangan patok-patok proyek, keluarga Bece terpaksa menggunakan air sungai Sepaku untuk kebutuhan air minum. “Untuk air minum kami menggunakan air dari sungai dengan cara direbus, sebelumnya diberi

obat air untuk menjernihkan jika air keruh, lalu direbus untuk menjadi air minum. Kadang-kadang kalau pakai obat air jadi sakit perut”, keluh Pak Udin. “Obat air ini dibagikan secara gratis oleh Pak RT, kemungkinan didapat dari proyek yang dibagikan oleh Adhikarya”, ujar Bece sambil menunjukkan kantong berisi obat air. “Saya baru menggunakan satu kali saja sejak dibagikan”, lanjutnya.

Meskipun tawas (disebut juga "*alum kalium*") membantu menjernihkan air, penggunaannya dalam konsumsi sehari-hari tidak bisa disebut aman bagi kesehatan manusia.

Untuk kebutuhan sehari-hari saat ini, Bece harus menggunakan 2 mesin pompa air, karena jarak air yang disedot menjadi lebih jauh, setelah sungai sepaku dipotong oleh proyek Intake Sungai Sepaku. “Sedang mesin kami

harus beli sendiri, harganya 300 ribu rupiah, waktu itu bapaknya beli. Sekarang harus memakai 2 mesin sanyo karena jika hanya 1 tidak bisa naik airnya. Air dipompa dua kali, dari sungai ke tandon, lalu dari tandon naik ke dalam rumah”, jelas Bece.

Selain digunakan sebagai air minum, Sungai Sepaku digunakan sebagai jalur transportasi. “Dengan perahu biasanya kami pergi memancing untuk mendapatkan ikan, mencari Daun Nipah untuk membuat atap yang dijual jika ada orang yang memesan. Lembaran anyaman atap nipah sepanjang 1 meter bisa dijual dengan harga 3.500 hingga 5.000 rupiah.

Sekarang karena sungainya telah dibendung, kami harus menggunakan sepeda motor untuk mengambil daun Nipah. Kalau dulu gampang menurunkan perahu tetapi sekarang sulit jadi lebih memilih pakai motor saja”, lanjutnya. Di Sungai Sepaku terdapat Ikan Baung, Ikan Nila dan ikan lainnya yang biasanya untuk dimakan sehari-hari, tetapi sekarang sulit untuk bisa memancing. “Dulu, jika akan ke Balikpapan harus menggunakan kapal klotok dan dulu ramainya perahu biasanya digunakan untuk menjual hasil bumi seperti sayuran, bisa menggunakan kapal atau perahu di aliran sungai di belakang rumah ini”, tambah Bece.

Dampak lainnya adalah banjir. “Kalau banjir, kami was-was di sini karena bisa naik air sampai ke ‘strat’ (jalan) itu. Sebelum ada proyek ini memang ada banjir dan sekarang sejak ada proyek tambah parah banjirnya”, ujar Bece melanjutkan cerita tentang dampak lanjutan dari proyek ini. Pada tahun 1988 saya pernah mengungsi hingga ke gunung karena semua tenggelam. Banjir terakhir yang baru saja terjadi adalah pada saat setelah Najwa (Najwa Shihab, seorang Jurnalis kenamaan Indonesia) datang pada tahun lalu. Banjir terjadi karena adanya aktivitas PT ITCI yang berada di sebelah atas kampung ini.

Tidak hanya yang hidup, penggusuran kuburan adalah dampak berikutnya dari proyek ini, masing-masing kuburan diganti dengan uang 15 juta per-kuburan. Total kuburan yang sudah dipindahkan adalah 14 kuburan tetapi baru dibayarkan 25 juta rupiah kepada Sabardin yang merupakan mantan



Gambar 31. Tanaman Obat di Kampung Sepaku Lama, Daun Sembung dan Kumis Kucing.

RT dan adik dari Bece. Pemindahan kuburan ini menggunakan ritual juga yang dipimpin oleh Sabardin. Pada pemakaman tersebut ada satu makam milik adik perempuan Bece' dan keluarga yang lainnya. Penentuan atas harga pemindahan makam tidak melibatkan banyak pihak. "Orang intake datang ke dia (Sabardin) dan bilang kalau kuburan itu akan kena gusur, jadi tidak tahu apakah habis itu dibilang kepada yang lain-lainnya juga. Itu pun ketika kami bongkar kuburan itu tidak menemukan apa-apa, tulang saja tidak ada karena kuburan lama sudah 200 tahunan itu jadi kami ambil tanahnya saja. Nisannya saja sudah seperti dimakan rayap sehingga ada banyak bagian yang runcing-runcing", terang Udin.

"Saya tidak mau digusur dari sini, saya mau tetap di sini, jawab Bu Bece ketika ditanya akan pergi kemana jika ada pembangunan IKN. Masa orang dari luar dipindah ke sini lalu kami yang asli sini mau dipindahkan kemana? dan ini aneh kan ?", sambung Udin, suaminya.

V.c. Lenyapnya obat-obatan tradisional, Akar Kuning, Pasak Bumi dan Lemposu

Tumbuhan dan tanaman yang berfungsi sebagai obat-obatan bagi masyarakat suku Balik juga sudah mulai lenyap, ujar Rimba, warga Suku Balik yang masih tinggal di Sepaku Lama. Menurutnya salah satunya adalah akar kuning. “Dulu ada banyak di sepanjang sungai Sepaku ini. Akar kuning itu dipakai untuk mengobati orang yang terkena penyakit kuning atau penyakit buyu, penyakit lumpuh layu yang biasa menimpa bayi dan anak kecil. Dulu di sini banyak orang yang kena penyakit buyu itu, nah, obatnya itu akar kuning”. Dulu caranya mudah. Di sepanjang sungai ini ada banyak di pinggir-pinggir sungai”, ungkap Rimba.

“Akarnya menggantung dari pohon-pohon. Kalau dipotong dalamnya berwarna kuning dan mengeluarkan air. Daunnya selebar dua ruas jari kadang kalo tumbuh di tanah yang subur bisa tiga ruas jari”, Ujar Rimba. Untuk dijadikan obat biasanya akarnya direndam atau direbus, lalu airnya diminum. Sejak kehadiran perusahaan-perusahaan kayu di tahun 1990-an, tumbuhan ini mulai langka, dan sekarang sangat sulit didapat.

Tumbuhan dan tanaman yang berfungsi untuk pengobatan bayi dan anak kecil lainnya adalah Pasak Bumi. Menurut Rimba, Pasak Bumi biasanya digunakan untuk pengobatan bagi anak kecil yang sakit diare. Cara daun Pasak Bumi diambil, dibersihkan, ditumbuk dan dilabor (diusapkan) ke badan anak yang sakit, maka sakitnya segera sembuh.

Selain akar kuning, dan pasak bumi masyarakat Suku Balik juga sudah terbiasa menggunakan tumbuhan atau tanaman Bajaka. “Kayu bajaka itu bagus jika diambil langsung airnya dari pohonnya, pas masih segar”. Jadi caranya itu potong bagian bawah, potong juga bagian atasnya, langsung keluar airnya, itulah yang dijadikan obat, Kalo direbus dulu itu nggak terlalu bagus”, Ujar Rimba. “ Biasanya air kayu bajaka berlimpah, hampir dua liter banyaknya. Di hutan airnya kadang dapat dipakai untuk keperluan membersihkan diri”, jelas Rimba. Sebelum ramai di kota-kota digunakan sebagai obat, kayu Bajaka sudah digunakan untuk pengobatan



Gambar 32. Bece (55 tahun) menganyam Daun Nipah untuk membuat atap.

bagi masyarakat suku Balik, pungkas Rimba. Kayu Bajaka belakangan ini sedang menjadi perbincangan dalam dunia kesehatan. Pasalnya, kayu bajaka diklaim sebagai salah satu obat yang bisa mencegah kanker, diabetes dan artritis⁹⁹.

Tumbuhan atau tanaman obat lainnya yang juga tumbuh di sekitar Sungai Sepaku dan terancam lenyap adalah lempusu, akar aren, tengkerungut, dan ambit jalen. Keempat tanaman obat ini berfungsi membantu perempuan yang baru habis melahirkan. Jenis obat-obatan ini dapat dipilih salah satu, direbus lalu airnya diminumkan ke ibu yang baru habis melahirkan. Obat-obatan ini sebagai penawar dari pantangan makanan ibu pasca melahirkan. “Biasanya orang habis melahirkan gak boleh makan pedas dan ikan yang berlemak banyak. Dengan minum air akar ini, sang ibu bebas boleh makan apa aja”, ucap Bunga menjelaskan¹⁰⁰.

99 7 Manfaat Kayu Bajakah sebagai Obat Herbal untuk Kesehatan - Lifestyle Katadata.co.id diakses pada 11 mei 2023

100 Wawancara Bunga pada 11 Juni 2023.

IV.d. Hilangnya Pengetahuan Perempuan: Atap Nipah, Lanjong dan Nyiruk

Sementara itu bagi perempuan suku Balik, dengan lenyapnya akses terhadap sungai, mereka kehilangan tumpuan ekonomi, pekerjaan, dan lebih jauh lagi lenyapnya pengetahuan mereka-kaum perempuan. Inilah yang dialami oleh Bece, perempuan suku Balik yang tinggal di Sepaku Lama. Pada saat sungai masih bisa dipakai, ia dan suaminya menggunakan sungai untuk mencari getah dari pohon Damar di Hutan dan daun Nipah di sepanjang Sungai.

Dengan pengetahuan dan keterampilan jenius warisan leluhurnya, Bece' menganyam atap nipah. "Kalau banyak yang pesan, bisa sampai puluhan lembar anyaman atap, 5 sampai 8 hari menganyamnya", ujar Bece. Ia menjual satu lembar atap daun nipah tersebut seharga 25 ribu rupiah. Untuk getah Damar ia jual ke Kota Balikpapan, seharga 2.500 rupiah per kilogram. Getah Damar biasa digunakan untuk bahan campuran kosmetik, cat dan aroma makanan. Namun sejak Sungai ditutup, pendapatannya juga hilang. Selain itu, suaminya Udin juga harus tinggal lebih lama di kebun atau ladang mereka untuk menghemat ongkos perjalanannya. Tidak bisa leluasa bolak-balik berperahu lagi di sungai.

Hutan di sekitar Sungai Sepaku juga menjadi sumber bagi bahan baku pembuatan perkakas berladang seperti kesaksian Baniah istri Rimba. Menurut Baniah biasanya untuk membuat lanjong, nyiruk atau tampih, bahannya adalah rotan segah, sedangkan nyiruk terbuat dari bambu. Nyiruk biasa digunakan untuk menampih beras. "Dulu saya belajar dari mamaku waktu beliau masih hidup, umur 15 tahun-lah waktu itu. Perkakas seperti ini dulu dijual oleh mama sebagai usahanya". Sejak sebelum Jaman Gerombolan, lanjong ini memang sudah biasa dibikin", ujar Baniah.

"Pulang dari ladang biasanya baru saya membuat anyaman ini. Pergi ke ladang pagi hari, menyempatkan mengambil bahan bakunya yaitu rotan segah tadi untuk dibawa pulang, dibersihkan, dijemur dan diolah menjadi macam-macam anyaman. Pembuatan lanjong dikerjakan pada malam hari atau siang hari. Sesempatnya pada saat ada waktu mengerjakan", tutur Baniah.

“Rotan segah dulu banyak di pinggir ladang jadi mudah memperolehnya. Sebelum hutan digarap menjadi perkebunan seperti sekarang, rotan masih banyak. Sejak hutan digarap, rotan sudah mulai susah, kami pun akhirnya lama kelamaan mulai jarang membuat lanjong”, tutup Baniah¹⁰¹.

Lanjong biasanya digunakan untuk membawa hasil panen seperti padi dan sayur-sayuran dari ladang, atau untuk membawa bekal ke ladang. Menurut Baniah, proses pembuatannya dimulai dengan mengambil rotan segah dari ladang, dijemur hingga buluh lapisannya mengering lalu diraut atau di haluskan. “Alat rautnya panjang gagangnya, pisaunya berbentuk runcing ujungnya dan harus tajam”, ujar Baniah. Proses menjemur rotan biasanya memakan waktu enam hari, sedangkan meraut rotan biasanya bisa menghabiskan waktu setengah bulan. Proses meraut adalah proses yang paling lama dalam proses membuat anyaman. Untuk membuat satu lanjong butuh waktu kerja satu minggu.



Gambar 33. Baniah dan kerajinan Lanjong. Baniah dan kerajinan Lanjong

Lanjong sering digunakan pada saat panen padi, sebagai wadah padi yang baru dipetik atau “diani-ani”. Ani-ani adalah pisau kecil yang dipakai untuk memotong tangkai bulir padi. Pekerjaan menganyam lanjong biasanya dibantu oleh orang lain. Ada orang yang bertugas membelah rotan, ada yang meraut dan ada yang menganyam, karena proses membelah dan meraut memakan waktu lama jika dilakukan sendiri. “Ini lanjong terakhir yang saya buat, waktu anakku Titin masih sekolah dasar. Sekarang Titin sudah berusia

101 Rekaman wawancara Baniah pada 19 Januari 2023

20 tahunan”, lanjut Baniah. Titin adalah anak pertama dari keluarga ini, sudah menikah dan punya anak usia sekolah menengah.

Rotan segah juga digunakan sebagai benang dalam membuat atap nipah. “Selain saya, menantu saya juga bisa menganyam daun nipah untuk atap rumah. Di luar sana masih ada daun nipah, sisa bikin atap depan rumah. Untuk menganyam atap daun nipah tidak pakai pisau raut. Hanya rotan segah saja yang diraut (ditajamkan)”, tutur Baniah. Selain Baniah, Janah, kakak pertamanya juga pandai membuat anyaman serupa.

IV.e. Putusnya Komunikasi Dengan Ruh Leluhur: Jernang dan Batu-batu Situs Adat Balik

Bagi masyarakat suku balik, sungai juga memiliki fungsi spiritual seperti dalam pengalaman Sernin (60 tahun), perempuan suku balik yang tinggal di Desa Bumi Harapan dan berprofesi sebagai bidan kampung.

Sungai terhubung dengan rangkaian ritus penanda babak-babak kehidupan manusia. Kelahiran adalah salah satunya. “Habis kelahiran biasanya dibuatkan Jernang. Ini berkaitan dengan air”, ujar Sernin. Ritual yang dilakukan dengan melarungkan ke sungai sesaji berupa telur, beras kuning dan pisang yang diletakkan diatas daun nipah atau daun rokok. Ritual ini dikenal sebagai Jernang. Ritual ini dilakukan juga untuk memperkenalkan anak kepada semesta dan selain itu juga memperkenalkan pada tradisi dan pengetahuan masyarakat suku balik¹⁰².

Pemahaman tentang ritual yang melekat pada Sernin tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari pengalaman yang diturunkan oleh ibunya. Sernin sering diajak oleh ibunya untuk menemaninya membantu orang melahirkan. Tidak hanya membantu proses melahirkan, ibunya juga bisa memijat untuk anak dan ibu hamil. Pelaksanaan ritus dan pengetahuan tentang ritus tidak akan langgeng jika sungai sudah rusak dan hilang.

102 Rekam wawancara bersama Sernin pada 12 Desember 2022



Gambar 34. Sernin di rumahnya di Desa Bumi Harapan.

Syarat utama dalam melaksanakan ritual Jernang adalah melarungkan sesaji di sungai besar atau sungai yang aliran airnya deras. Sernin pernah melarungkan Jernang untuk cucu ketiganya di aliran air yang kecil namun cucunya justru mengalami sakit. Ia menduga karena ia salah memilih tempat melarungkan sesaji tersebut. “Waktu itu saya coba dua kali mengirim ke sungai kecil dekat rumah sini, masih juga sakit. Akhirnya saya jalan kaki ke Logdam buat larungkan di sungai Sepaku. Habis itu sehat sampai sekarang cucu saya,” kisah Sernin mengungkapkan pengalamannya melarungkan Jernang. Sungai Sepaku menjadi sarana penting bagi orang Balik dalam melakukan ritual dalam kehidupannya.

Habis itu sehat sampai sekarang cucu saya,” kisah Sernin mengungkapkan pengalamannya melarungkan Jernang. Sungai Sepaku menjadi sarana penting bagi orang Balik dalam melakukan ritual dalam kehidupannya. Sungai Sepaku juga memiliki sejumlah situs yang memiliki nilai sejarah dan sakral bagi masyarakat suku balik. Diantaranya adalah Batu Badok, Batu Bawi dan Batu Tukar Tondoi, ketiga batu ini bagi masyarakat Suku Balik bermakna dan memiliki cerita, batu badok misalnya dipercaya sebagai tempat untuk meminta kesembuhan jika terdapat masyarakat suku balik yang sedang



Gambar 35. Lokasi Proyek Intake yang memotong Sungai Sepaku, di Kelurahan Sepaku.

sakit. Batu tukar tondoi adalah batu bersusun berbentuk tangga tempat roh leluhur yang bernama tondoi, diyakini penghuni air, batu tukar tondoi berfungsi sebagai tempat ritual atau sebagai tempat penghubung suku balik dengan leluhurnya, batu tukar tondoi masih dipercaya hingga saat ini sebagai wadah menghantarkan persembahan kepada leluhur (hantar hajat, membayar niat).

Lokasi batu tukar tondoi kini terancam oleh proyek pembangunan Intake Sungai Sepaku karena situs penting tersebut berada di dalam kawasan proyek pembangunan intake.

Begitu pula dengan batu badok, batu yang berbentuk seperti tubuh badak ini dipercaya sebagai tempat ritual suku balik yang memiliki hajat atau membayar niat. Keberadaan batu badok dan batu tukar tondoi ini ditandai dengan bendera berkain kuning, yang menandakan bahwa tempat tersebut adalah tempat keramat yang tidak boleh diganggu. Kain kuning juga penanda bahwa sedang ada masyarakat adat yang menghantarkan hajatnya. Batu Badok yang berada di sungai Sepaku ini kini sudah tidak tampak lagi dan berubah menjadi bagian infrastruktur Intake.



Gambar 36. Batu Badok.

Hilang dan terancamnya ketiga batu sakral yang memiliki fungsi ritual bagi masyarakat suku balik ini juga berdampak pada lenyapnya sejarah dan ingatan mengenai kerajaan kuno suku balik dan hilangnya cerita dibalik nazar dan penyembuhan dalam pengobatan tradisional mereka.

Sementara itu batu bawi (batu babi), batu berbentuk babi ini telah terlebih dahulu dihancurkan dimasa lalu oleh PT. SITA, letak batu babi ini berada pada aliran Sungai Sepaku, menurut cerita dihancurkan, karena dianggap menghalangi kapal ponton pengangkut kayu yang berlalu lalang.

Hilang dan terancamnya ketiga batu sakral yang memiliki fungsi ritual bagi masyarakat suku balik ini juga berdampak pada lenyapnya sejarah dan ingatan mengenai kerajaan kuno suku balik dan hilangnya cerita dibalik nazar dan penyembuhan dalam pengobatan tradisional mereka.

IV.f. Daya Rusak akibat Proyek, Kehilangan, Derita dan Kerusakan Pada Bentang Sungai Mentoyok atau Tengin

Kehilangan dan kerusakan juga terjadi pada tapak proyek lain diluar dari Sungai Sepaku, diantaranya pada bentang sungai Mentoyok atau Tengin. Pada bentang sungai ini sudah dan sedang dibangun proyek Bendungan Sepaku Semoi. Proyek ini berlangsung sejak 2021 dan diperkirakan selesai pada tahun 2023. Sampai kini kemajuan pengerjaannya menurut keterangan pemerintah telah mencapai 86,56%¹⁰³. Proyek ini memiliki luas genangan 230 hektar dengan tinggi bendungan 25 meter dan memiliki panjang 450 meter¹⁰⁴. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan oleh PT Brantas Abipraya melalui APBN tahun 2020 sebesar 556 miliar¹⁰⁵.

Beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang termasuk ke dalam wilayah IKN lainnya adalah DAS Samboja, DAS Mahakam, DAS Manggar, DAS Riko, DAS Wain, DAS Dondang, dan DAS Sanggai. Sementara itu jumlah sungai di kawasan IKN menurut BWS Mahakam III 2017 adalah 41 Sungai, termasuk sungai Mentoyok yang sering disebut sebagai sungai Tengin.

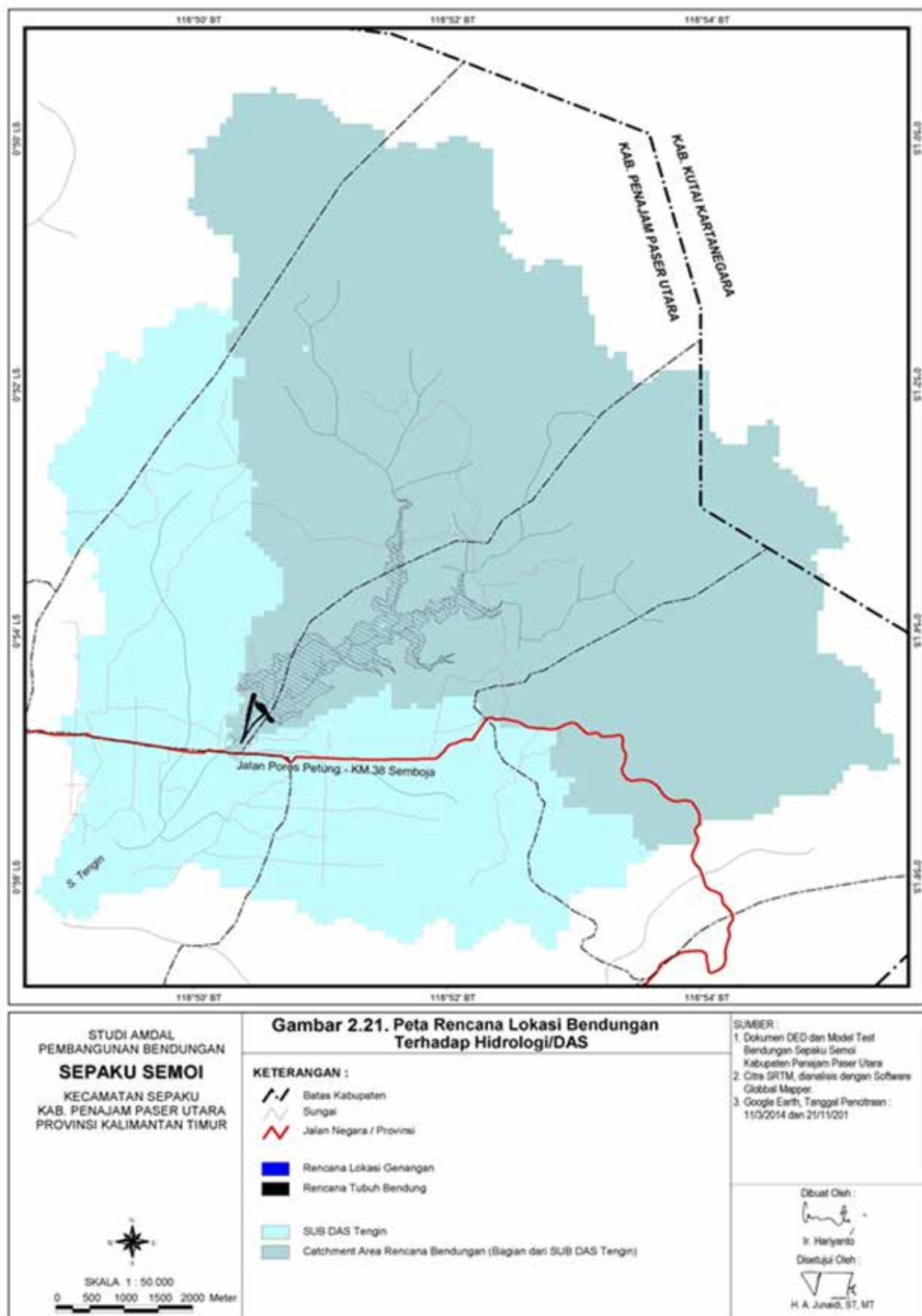
DAS Sanggai memiliki luas 89.141,20 hektar beririsan dengan tiga wilayah administrasi kabupaten/kota yakni Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah aliran sungai terbesar di DAS Sanggai berada di Kecamatan Sepaku seluas 86.612,32 hektar¹⁰⁶.

103 <https://www.pu.go.id/berita/pasok-kebutuhan-air-baku-di-ikn-kementerian-pupr-selesaikan-bendungan-sepaku-semoi-dan-intake-sepaku-di-2023> diakses pada 9 Mei 2023

104 Papan Informasi Proyek di Lokasi Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi, April 2022

105 [https://regional.kompas.com/read/2023/02/10/205835478/progres-bendungan-sepaku-semoi-pemasok-air-ke-ikn-sudah-85-persen-target#:~:text=Sebagai%20informasi%2C%20pembangunan%20Bendungan%20Sepaku,PT.%20BRP%20\(KSO\).](https://regional.kompas.com/read/2023/02/10/205835478/progres-bendungan-sepaku-semoi-pemasok-air-ke-ikn-sudah-85-persen-target#:~:text=Sebagai%20informasi%2C%20pembangunan%20Bendungan%20Sepaku,PT.%20BRP%20(KSO).) diakses tanggal 19 Mei 2023

106 mengacu pada laporan BBWS Mahakam IV, 2017



Gambar 37. Peta Bendungan Sepaku Semoi dan DAS Tengin Peta Bendungan Sepaku Semoi dan DAS Tengin.

Dari hasil deliniasi DAS yang dilakukan, diketahui pola aliran sungai dan Daerah Tangkapan Air (DTA), panjang Sungai Tengin dari hulu sampai ke lokasi waduk adalah 9,5 km, sedangkan daerah tangkapan air Bendungan Sepaku Semoi adalah sebesar 77,47 km² ¹⁰⁷.

KOTAK I: Beranak Pinak Proyek Bendungan Sepaku Semoi

Penelusuran dilakukan terhadap seluruh daftar proyek¹⁰⁸ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di kawasan ibu kota baru¹⁰⁹, yang terdiri dari di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan di luar KIPP. Di dalam KIPP Terdapat 51 dari 90 proyek yang berada di tubuh DAS Sanggai. 51 proyek itu di dominasi oleh proyek pembangunan Drainase dan Embung.

Sementara itu dari 25 proyek di dalam daftar Kementerian PUPR yang berada di luar kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) terdapat 10 proyek yang lokasinya berada di atas tubuh DAS Sanggai dan aliran sungai sepaku yang juga merupakan ruang hidup masyarakat adat Balik.

Sepuluh (10) proyek itu mulai dari proyek fasilitas early warning system DAS sanggai, jaringan transmisi air minum SPAM Sepaku, proyek pengendalian banjir di sungai Sepaku, sungai Tengin, sungai Sanggai dan sungai Pemaluan hingga proyek besar seperti bendungan Sepaku Semoi. Proyek-proyek ini berada di bawah bidang Ditjen sumber daya air dan ditjen cipta karya kementerian PUPR.

Tidak salah, jika rencana pemindahan ibu kota ini disebut sebagai sekedar mega proyek belaka. Proyek-proyek yang dibangun hanyalah ruang bagi perburuan rente dan hanya upaya untuk menggelembungkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan transaksi dan keuangan melalui aktivitas belanja jasa dan belanja barang.

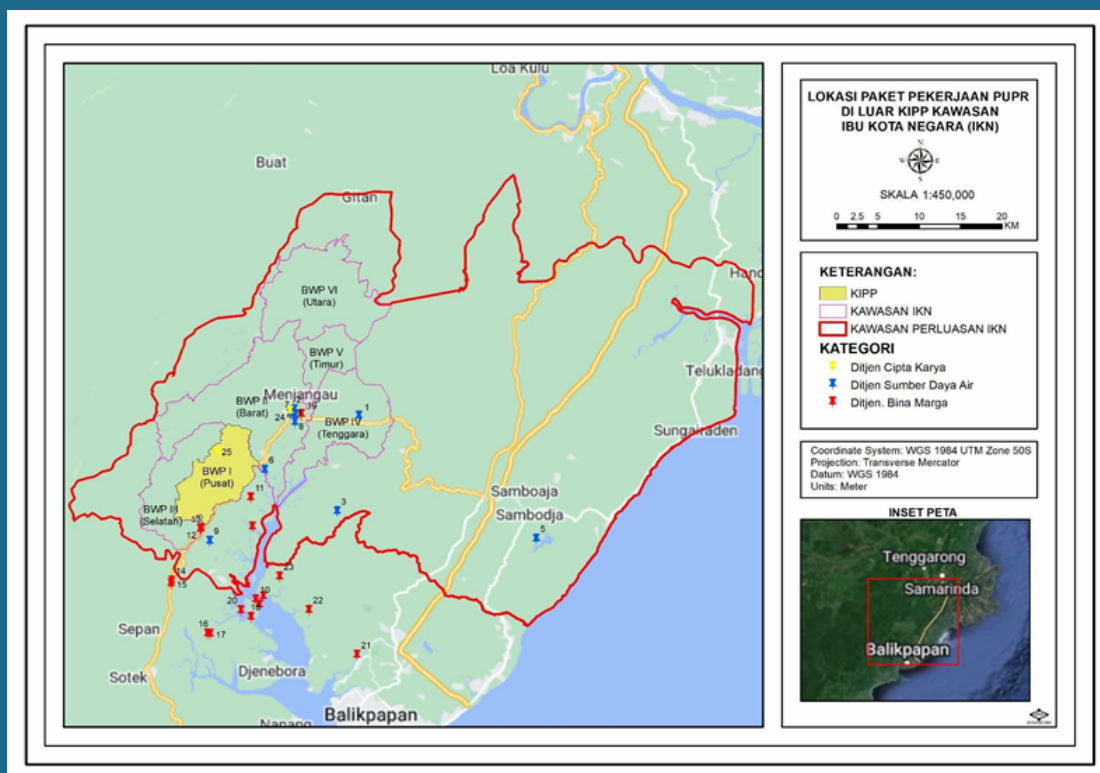
107 KA ANDAL Hal II-53

108 Penelusuran atas Data Daftar proyek Kementerian PUPR tahun 2023, sumber database JATAM Kaltim.

109 Penelusuran atas Data Daftar proyek Kementerian PUPR tahun 2023, sumber database JATAM Kaltim.

Sebelas dari 12 proyek ini, atau 90 persennya, merupakan proyek konsultasi, supervisi, riset desain, pengadaan dokumen lingkungan, hingga berbagai kajian yang bernilai 67,8 miliar rupiah. Selebihnya adalah proyek pembangunan Infrastruktur fisik termasuk belanja barang, yang keseluruhannya bernilai 811,4 Miliar Rupiah.

12 Proyek ini dikerjakan oleh tujuh perusahaan jasa dan pelaksana proyek fisik. PT Teknik Cipta Konsultan, sebagai contoh, menguasai dua dari 12 proyek, yaitu Desain Penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Review Desain Dan Sertifikasi Bendungan Sepaku Semoi serta Kajian Sempadan Dan Landscape Bendungan Sepaku Semoi.



Gambar 38. Peta Lokasi Proyek di Luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

A	B	C
NO	NAMA PROYEK	KATEGORI
1	Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi	Ditjen Sumber Daya Air
2	Pembangunan Prasarana Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara; 1 km; 0 m ³ /detik;	Ditjen Sumber Daya Air
3	Pembangunan Penyediaan Air Baku Persemaian Mentawir Kab. Penajam Paser Utara; 1 Unit; 0,04 m ³ /detik; F; K; SYC	Ditjen Sumber Daya Air
4	Pengendalian Banjir Sungai Sepaku	Ditjen Sumber Daya Air
5	Pengendalian Banjir Sungai Seluang dan Tengin	Ditjen Sumber Daya Air
6	Pengendalian Banjir Sungai Sanggai	Ditjen Sumber Daya Air
7	Jaringan Hidrologi DAS Sanggai	Ditjen Sumber Daya Air
8	Early Warning System DAS Sanggai	Ditjen Sumber Daya Air
9	Pengendalian Banjir Sungai Pamaluan	Ditjen Sumber Daya Air
10	PEMBANGUNAN PELINDUNG TUMBUKAN KAPAL (FENDER) DAN BANGUNAN PELENGKAP JEMBATAN PULAU BALANG	Ditjen. Bina Marga
11	Jalan Akses Dermaga PT.IHM	Ditjen. Bina Marga
12	Pembangunan (Pelebaran) 2x2 Lajur Sp.ITCI - Sp.3 Riko Segmen 1	Ditjen. Bina Marga
13	Preservasi Jalan SP. Itchi - SP. 3 Riko Segmen I	Ditjen. Bina Marga
14	Pembangunan (Pelebaran) 2x2 Lajur Sp.ITCI - Sp.3 Riko Segmen 2	Ditjen. Bina Marga
15	Preservasi Jalan SP. Itchi - SP. 3 Riko Segmen II	Ditjen. Bina Marga
16	Pembangunan Jalan Sp.3 Riko - Pulau Balang Bentang Pendek	Ditjen. Bina Marga
17	Preservasi Jalan Sp.3 Riko - Pulau Balang Bentang Pendek	Ditjen. Bina Marga
18	Pembangunan (Duplikasi) Jembatan P.Balang Bentang Pendek	Ditjen. Bina Marga
19	Pembangunan Shortcut Pasar Sepaku	Ditjen. Bina Marga
20	Pembangunan 4 Dermaga	Ditjen. Bina Marga
20	Pembangunan 4 Dermaga	Ditjen. Bina Marga
20	Pembangunan 4 Dermaga	Ditjen. Bina Marga
20	Pembangunan 4 Dermaga	Ditjen. Bina Marga
21	Jalan Tol IKN Segmen Tol Balsam KM 11 - KKT Karingau Segmen 3A	Ditjen. Bina Marga
22	Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau - Sp. Tempadung Segmen 3B	Ditjen. Bina Marga
23	Jalan Tol IKN Segmen Sp. Tempadung - Jembatan Plau Balang Segmen 5A	Ditjen. Bina Marga
24	Pembangunan IPA Kap. 2x300 L/detik dan Bangunan Pendukung SPAM Sepaku	Ditjen Cipta Karya
25	Pembangunan Jaringan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku (15,9 Km)	Ditjen Cipta Karya

Gambar 39. Daftar Tabel Nama Proyek.

Perusahaan-perusahaan lain yang masing-masing menguasai dua dari 12 proyek tersebut adalah PT. Wahana Adya dan PT. Aditya Engineering Consultant. Berikut adalah keempat proyek yang mereka kuasai. Pertama, Studi Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) dan Potensi Longsoran Bendungan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022. Kedua, SID Air Baku Bendungan Sepaku Semoi Aditya Engineering Consultant, Batu Lepek, Sungai di Teluk Balikpapan, dan Air Tanah di Kab. PPU dan Kab. Kukar Tahun 2020. Ketiga, Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Tahap II Bendungan Sepaku Semoi Tahun 2022. Keempat, Studi LARAP Bendungan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017.

Proyek bendungan Sepaku Semoi sendiri dimenangkan lelangnya oleh PT. Brantas Abipraya dengan nilai proyek 556,4 Miliar Rupiah¹¹⁰. Perusahaan ini memiliki rekam jejak terkait dengan perampasan 145 hektar tanah milik 500 warga di desa Wadas, Jawa Tengah. Rencana penggusuran dan perampasan tanah ini dilakukan untuk bisa menambang batuan andesit, salah satu bahan baku Proyek Strategis Nasional (PSN) bendungan Bener dari perbukitan Wadas. Sebagai respons terhadap penolakan warga, 64 warga ditangkap pada tanggal 8 februari 2022 lalu¹¹¹.

Dalam penelusuran atas daftar pengurus PT. Brantas Abipraya, ditemukan potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) melalui salah satu komisarisnya, Khalawi Abdul Hamid. Yang bersangkutan bukan hanya menjabat sebagai komisaris di tahun 2018. Pada tahun 2017 Abdul Hamid juga merupakan pejabat eselon I (a), yaitu sebagai Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan di Kementerian PUPR¹¹².

Begitu juga dari penelusuran atas pengurus PT. Teknika Cipta Konsultan, ditemukan potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) melalui Direktur Utamanya, Ryan Dwi Cahyanto yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kementerian PUPR¹¹³. Kedua jabatan ini membuat PT. Teknika Cipta Konsultan diuntungkan karena mendapatkan kemudahan akses informasi.

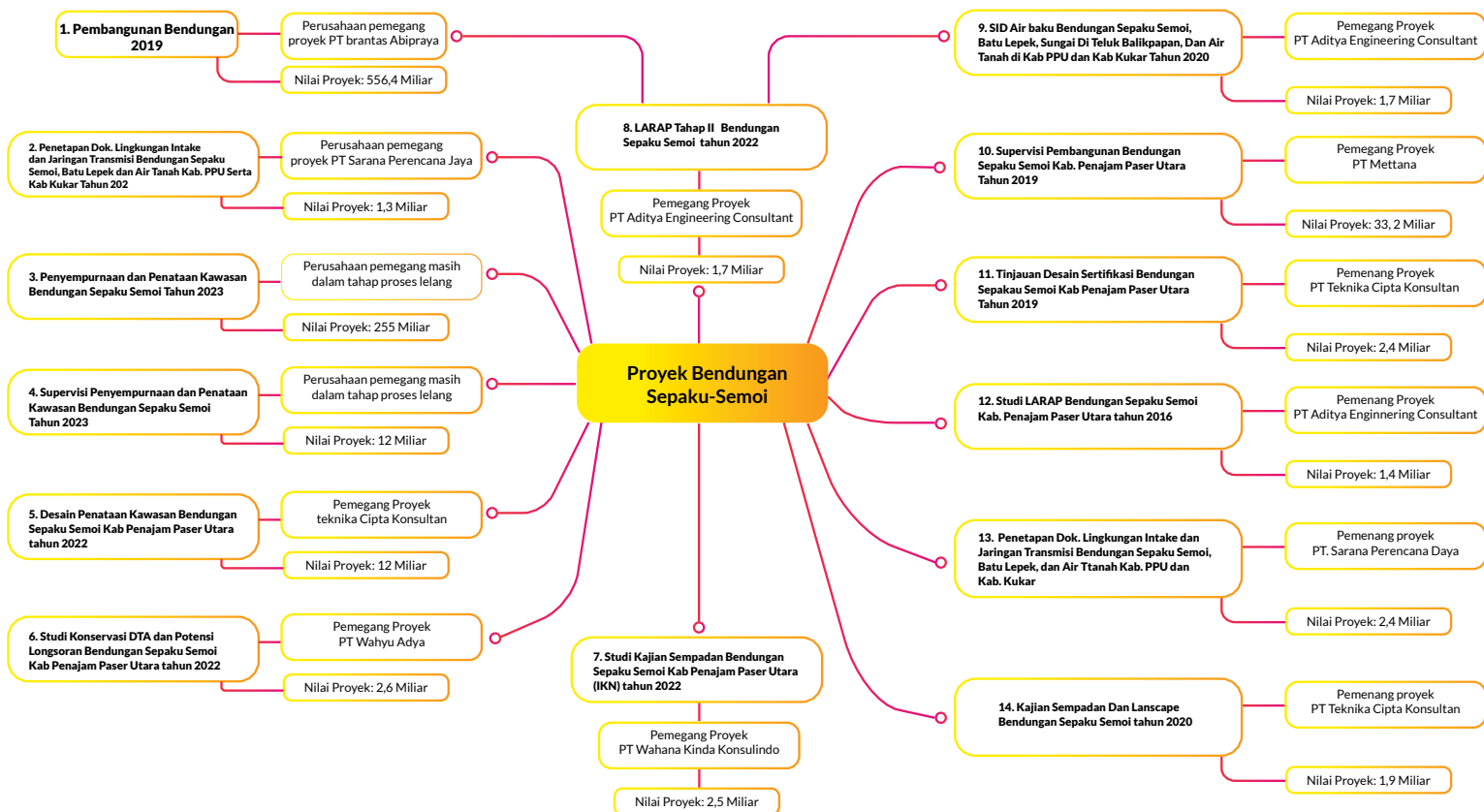
Proyek bendungan Sepaku Semoi juga menuai kritik dan protes warga. Sejak awal, proses pembebasan lahan dan kompensasi

110 LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Informasi Tender (pu.go.id) diakses pada 22 Juni 2023

111 <https://nasional.tempo.co/read/1559978/bendungan-bener-proyek-strategis-jokowi-pemicu-konflik-di-desa-wadas>, diakses pada 20 Juni 2023

112 <https://www.opentender.net/company-list/218815?name=Khalawi%20Abdul%20Hamid> diakses pada 22 Juni 2023

113 Detail Data Tenaga Ahli (pu.go.id) diakses pada 22 Juni 2023



Gambar 40. Infografis Tali-temali proyek

sudah bermasalah, seperti yang dialami oleh sejumlah warga di Desa Argo Mulyo, Tengin Baru dan Sukomulyo. Mereka dipaksa untuk menerima besaran ganti kerugian yang sepihak ditetapkan dan ancaman pengadilan jika tidak menyerahkan lahannya untuk proyek bendungan¹¹⁴.

Desa Argo Mulyo memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.173 jiwa dengan kepadatan penduduk 87,80 jiwa/km², sedangkan Desa Tengin Baru memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.901 jiwa dengan kepadatan 89,72 jiwa/km².¹¹⁵

114 <https://www.cnnindonesia.com/tv/20220130164016-405-753044/video-war-ga-sepaku-tak-puas-dengan-kompensasi-ganti-lahan-pembangunan> diakses pada 11 Mei 2023.

115 Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Pembangunan dan Pengoperasian Bendungan Sepaku Semoi, Tahun 2019, Halaman II-62



Gambar 41. Sungai Tengin atau Sungai Mentoyok di Desa Tengin Baru RT 15.

Diluar urusan protes pembebasan lahan, proyek bendungan Sepaku Semoi juga menghilangkan akses warga ke sungai Mentoyok. Hm, salah satu warga yang tinggal di bantaran sungai Mentoyok, menceritakan bahwa warga sejak dahulu bergantung pada sungai Mentoyok dengan memanfaatkan sungai sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, seperti mencuci, memasak, dan aktivitas lainnya.

Keberadaan Sungai Mentoyok juga dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi dan kebutuhan konsumsi. Hm menceritakan kehidupan warga dari kekayaan sungai Mentoyok, dengan hasil tangkapan ikan seperti ikan kakap, ikan pari, atau ikan bulan-bulan (bagian samping ikan berwarna perak, sementara bagian punggungnya hijau kebiruan), dan ikan baung.



Gambar 42. Gerbang Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru.

Selain contoh ikan-ikan yang disebutkan Hm di atas, dokumen Kerangka Acuan (KA) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Bendungan Sepaku-Semoi menyebutkan bahwa dari informasi masyarakat setempat, nekton (organisme perairan) yang umum ditemui pada badan perairan wilayah studi (rawa dan sungai) adalah jenis ikan rawa seperti Gabus, Betok (papuyu), sepat, sepat siam, biawan, lele, dan udang rawa. Sementara itu juga terdapat kelompok ikan perairan sungai (arus deras) seperti patin, baung, lais, belida, jelawat, salat, lempam, seluang, udang galah, klebere, lancang, pahat, kendia dan belut sungai (layur)¹¹⁶.

Selain sebagai sumber protein hewani vital, Sungai Tengin juga dimanfaatkan sebagai jalur transportasi yang menghubungkan antar wilayah atau desa yang sulit untuk diakses melalui jalur darat. Bahkan seringkali sungai menjadi jalur transportasi satu-satunya bagi masyarakat. Jalur sungai tengin juga digunakan untuk mengangkut

116 Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Pembangunan dan Pengoperasian Bendungan Sepaku Semoi, Tahun 2019, Halaman II-61

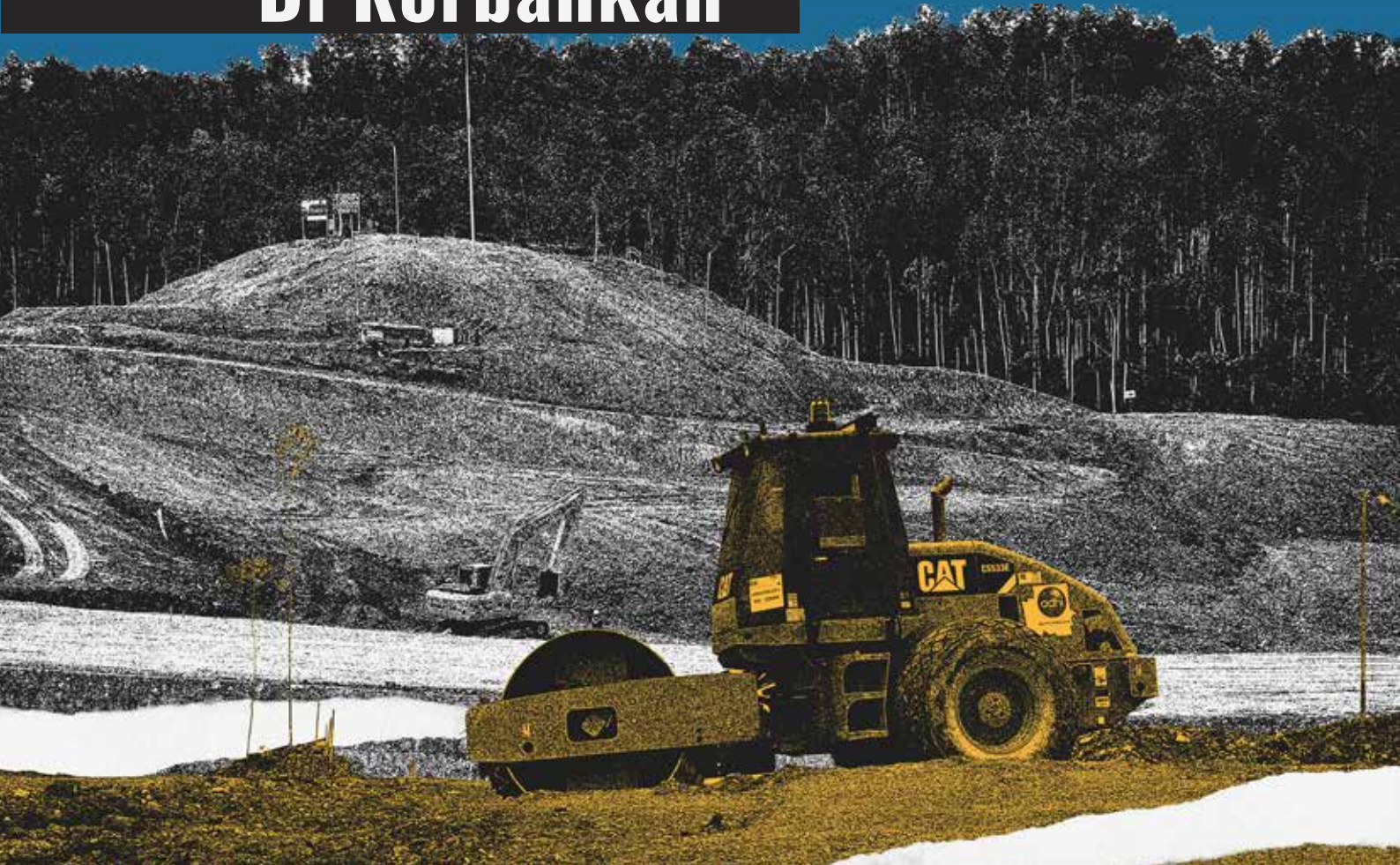
barang, seperti hasil panen berupa sayur-sayuran dan buah-buahan hingga jalur transportasi menuju Kota Balikpapan. Bahkan PT Inne Dongwha, salah satu perusahaan kayu, memanfaatkan sungai ini sebagai jalur untuk mengangkut hasil kayu yang berasal dari hutan Sepaku¹¹⁷.

Menurut kesaksian Toerah, perempuan transmigran di desa Tengin, sungai adalah jalur bagi tengkulak dari Balikpapan untuk membeli hasil sayur dan buah-buahan di wilayahnya. “Ada tanaman kayak singkong, lombok, nangka muda semua bisa dijual. Ada tengkulak dari Balikpapan pakai kapal, waktu itu singkong dibeli pake karung, pepaya dibeli berkarung-karung, juga pulur sebagai bahan manisan juga dijual”, sambung Toerah¹¹⁸.

117 Rekaman wawancara bersama Hm pada 18 Januari 2023

118 Rekaman wawancara Toerah dan Imam Turmudi, 16 Desember 2022

V. Wilayah Lain yang Ikut Di Korbankan



"IKN itu seperti cewek cantik dari kampung yang belum di poles pakai bedak. Jadi semakin hari orang tahu barang ini, barang yang bagus, orang datang,"¹¹⁹

(Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi)

Mega Proyek Ibu Kota Baru adalah wujud dari urbanisme kapitalistik yakni pencangkakan gaya dan cara hidup baru yang akan mengorbankan gaya dan cara hidup yang panjang sejarahnya dan yang dituduh sebagai cara hidup ketinggalan jaman. Cara hidup seperti inilah yang selama ini sudah berlangsung dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Suku Balik.

119 https://www.youtube.com/watch?v=PS1Bw5_jk-U diakses pada 22 Juni 2023

Orientasi gaya dan cara hidup "serba maju" ini juga mendorong desakralisasi terhadap tubuh alam dan tubuh perempuan. Yang disebut kemajuan tidak menghapus, bahkan mengawetkan praktek penindasan terhadap alam sekaligus perempuan. Hal tersebut diwujudkan melalui pembongkaran dan perombakan bentang daratan dan perairan pulau, termasuk bentang hutan, pesisir, teluk hingga lautnya. Kesemuanya dikorbankan untuk apa yang disebut kemajuan cara hidup.

Megaproyek ibu kota baru ini juga mempertontonkan karakter ekstraktif dan pemangsa. Sifat tersebut melekat pada relasi pemangsa dari segala daur proses ekstraksi dan eksploitasi, sejak penggalan material dan energi dari lokasi tambangnya, pengangkutannya melewati laut dan jalan darat sampai ke wilayah konsumsinya, dari Kalimantan maupun dari pulau lainnya. Untuk menemukan gambar besar, bagaimana alam beserta penghuninya di wilayah megaproyek dan di pulau lain "mensubsidi", dan "dikorbankan", untuk memasok bahan baku dan membangun infrastruktur megaproyek ini, bab ini hendak menyoroti soal penderitaan dan kehilangan pada skala yang melampaui ukuran-ukuran luas lahan kawasan megaproyek.

Salah satu di antaranya adalah rencana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan berkapasitas 9.000 MW di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Pembangkit terbesar se-Asia Tenggara ini direncanakan akan memasok listrik bagi satu lagi megaproyek di Kabupaten Bulungan yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning (diaku sebagai "kawasan hijau terbesar di dunia")¹²⁰, di samping memasok listrik bagi megaproyek Ibukota Negara Baru di sebelah Selatannya.

Megaproyek ini akan dikerjakan oleh perusahaan patungan PT. Kayan Hydro Energy bekerja sama antara lain dengan PowerChina dan Sumitomo Corporation Jepang. Kompleks pembangkit yang direncanakan untuk membendung Sungai Kayan tersebut terdiri dari lima bendungan dengan luas konsesi 184.270 hektar. Ada enam kampung yang akan terdampak oleh proyek PLTA Sungai Kayan ini, yaitu Desa Long Lejuh, Desa Long Peso,

120 <https://www.antaranews.com/berita/3419067/presiden-kiptanah-kuning-kawasan-industri-hijau-terbesar-di-dunia>



Gambar 43. Pelabuhan bongkar muat material IKN Desa Bumi Harapan.

Long Bia, Long Pelban, Muara Pangiang dan Long Lian. di tepian Sungai Kayan juga terdapat situs purbakala, yaitu di wilayah Desa Long Pelban, Muara Pangiang dan Long Lian. Dua desa yang akan hilang dari peta adalah desa Long Pelban dan Long Lejuh di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan. Selain itu juga ada situs penting masyarakat adat Bulungan yang juga terancam megaprojek ini, yaitu makam keramat (Salung) di Desa Muara Pangean, Desa Long Lejuh, Desa Long Pelban, dan Desa Long Lian. Di Long Pelban juga terdapat peninggalan sejarah Bulungan “Lahai Bara”, semacam makam atau situs yang dikeramatkan¹²¹.

Selain eksploitasi Sungai Kayan untuk pembangkitan listrik, ekstraksi material juga dilakukan di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah untuk memasok kebutuhan batu gajah dalam jumlah besar untuk pembangunan infrastruktur IKN. Ekstraksi dan pengangkutan batu gajah dari Sulawesi Barat dijalankan oleh PT Sulbar Malaqbiq sebesar 20 juta m³. Pengangkutan dengan kapal ke Penajam Paser Utara (PPU) dan Balikpapan dilakukan lewat pelabuhan Palipi. Bahan yang sama hendak ditambang dari Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyepakati

121 <https://www.jatam.org/megaprojek-ibukota-baru-bencana-iklim-dan-masyarakat-adat/> diakses pada 22 juni 2023



Gambar 44. Kondisi tambak Badusappo tepat berada disamping aktivitas bongkar muat material IKN.

MoU (*Memorandum Kesepahaman*) di Kantor Gubernur Kaltim, ketika Gubernur Sulteng Rusdi Mastura berkunjung ke Kaltim pada tanggal 9 September 2021.

Dari penelusuran dan pengamatan di lapangan, penumpukan berbagai batu yang diduga berasal dari Palu tersebut sudah terlihat di sebuah pelabuhan baru bongkar muat yang terletak di RT 01, Desa Bumi Harapan. Menurut kesaksian para pekerjanya, batu-batu tersebut diangkut menggunakan tongkang dan kemudian dijemput dengan truk-truk. Kegiatan ini diperkirakan telah berlangsung setahun belakangan dan diselenggarakan dua - tiga kali seminggu¹²².

Merebaknya bisnis jasa-jasa pelabuhan dan pemasokan berbagai bahan alam untuk bangunan maupun infrastruktur IKN juga membawa dampak bagi warga di wilayah-wilayah operasinya. Di sisi Kalimantan, dampak tersebut dialami langsung oleh Badusappo. Setiap kali hujan turun, air dari pelebaran pelabuhan yang mengandung lumpur dan tanah liat mengalir langsung ke tambak udang dan bandeng milik Badusappo yang lokasinya tidak jauh dari pelabuhan tersebut. Tambaknya menjadi tercemar dan airnya tidak lagi cocok untuk budidaya ikan dan udang yang menjadi mata

122 <https://korankaltim.com/read/berita-terkini/46528/tekan-mou-kerjasama-sulteng-kekurangan-batu-bara-dan-kaltim-butuh-suplai-batu-palu> diakses pada 22 juni 2023

pencapaian utamanya dan warga di situ. Keberhasilan usaha pertambakan yang telah dirintis selama bertahun-tahun sekarang terancam. Menurut kesaksian Badusappo, akibat air lumpur yang melimpas ke tambaknya pada awal Juni 2023 lalu ia harus kehilangan lebih dari 5.000 ekor Bandeng¹²³.

Badusappo berusaha keras melindungi tambaknya dengan cara menggali parit sendiri untuk menyalurkan air yang terkontaminasi, namun upaya itu tidak cukup efektif. Ia merasa frustrasi karena pelabuhan yang seharusnya menjadi sumber kemajuan dan pertumbuhan ekonomi lokal justru berdampak negatif pada mata pencahariannya.

Warga di sekitar sungai Sepaku yang memiliki usaha pertambakan lainnya juga mengalami masalah yang serupa. Mereka harus menghadapi tantangan ekonomi yang meningkat akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan

oleh perluasan pelabuhan. Bukan hanya air yang terkontaminasi lumpur, tetapi juga terjadi pendangkalan sungai akibat sedimentasi yang berasal dari aktivitas pelabuhan.

V.a. Perluasan Perusakan IKN atas nama Reforma Agraria dan Bank Tanah

Perluasan perusakan tidak hanya berlangsung didalam batas-batas konsesi megaproyek IKN, maupun pada wilayah asal pengerukan material dan energi di Kalimantan Utara hingga Sulawesi Tengah dan Barat. Terdapat beberapa rencana proyek baru yang masih berkaitan dengan megaproyek IKN. Salah satunya adalah sebuah proyek tambahan, yang disebut dalam rencana induknya sebagai "pusat kota" baru (*central town*). Proyek ini berada di luar batas 256 ribu hektar wilayah megaproyek IKN. Proyek baru ini diklaim berpotensi menjadi "pintu gerbang masuk" dan "penunjang" kawasan strategis nasional Ibukota baru (IKN).

123 Rekaman wawancara Badusappo pada 12 Juni 2023



Gambar 45. Papan penanda dan patok Bank Tanah terpasang di depan rumah warga Kelurahan Gersik.

Lokasi proyek merupakan perluasan ekspansi proyek ibukota baru di Kelurahan Pantai Lango, Jenebora, Gersik, Maridan dan Riko di Kecamatan Penajam, 43,5 km dari kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Proyek ini disebut sebagai bagian megaprojek, penunjang konektivitas seperti bandara, bangunan berbagai institusi, dan pelabuhan.

Operator dari proses penguasaan lahan adalah Bank Tanah, yang di dalam publikasinya, menyiapkan lahan seluas 4.162 hektar¹²⁴. Bank tanah memilah rencana penggunaan lahan tersebut. 1.883 hektar lahan dikuasai atas nama program reforma agraria, 360 hektar lahan untuk pembangunan Bandara, 380 hektar untuk bangunan berbagai Institusi, 507 hektar untuk kawasan lindung dan 1.032 hektar untuk pengembangan berikutnya.

124 Publikasi Badan Bank Tanah, 2023



Gambar 46. Spanduk penolakan aktivitas Bank Tanah di kebun warga.

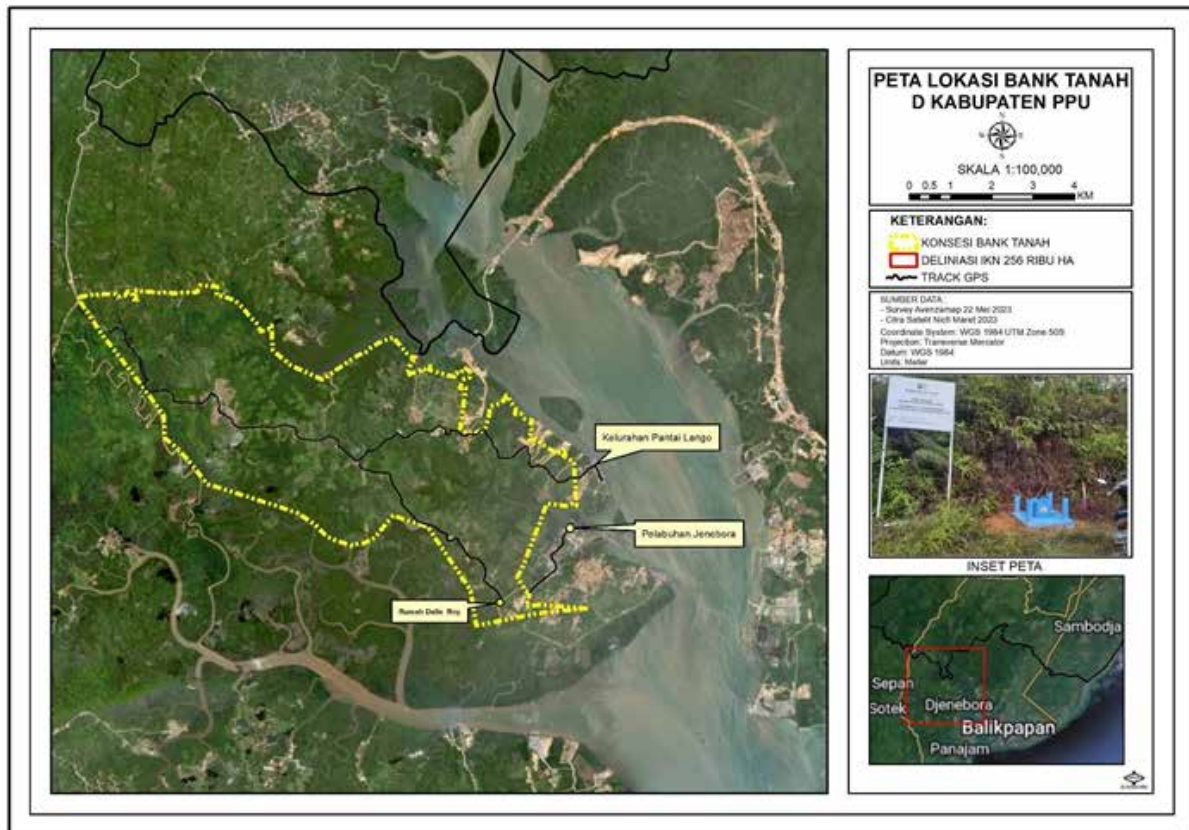
Agenda Reforma agraria dimanfaatkan untuk memperoleh lahan Eks Hak Guna Usaha (HGU), bekas perkebunan kelapa sawit, PT Triteknik

Kalimantan Abadi (TKA). “Ketidakpedulian” para petugas lapangan Bank Tanah pada kronologi kehadiran perusahaan dan sejarah komunitas yang sudah ada sejak sebelum perusahaan sawit ini berakhir, dan penciptaan opini publik lewat slogan reforma agraria ini telah menjadi pangkal masalah baru yang harus warga hadapi.

Modus memperoleh lahan tersebut mengundang gelombang protes, diantaranya seperti dalam kesaksian warga kelurahan Gersik, Dalle Roy Bastian¹²⁵. Disana warga yang terdampak dari pembangunan Bandara lebih dari 1.000 orang. Dalle menyebut warga dipaksa pindah dari tanah yang diambil alih Bank Tanah.

"Kami intinya menolak," kata Dalle. "Tanah itu sudah ditempati warga sebelum Indonesia merdeka," ujarnya menegaskan. Dalle mengatakan, operasi jahat Bank Tanah tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan apapun

¹²⁵ Rekaman wawancara, 25 Juni 2023



Gambar 47. Peta Lokasi Bank Tanah di Kecamatan Penajam, PPU.

kepada warga. Pada saat pematokan batas-batas tanah, para petugas Bank Tanah bahkan dikawal oleh aparat Kepolisian bersenjata.

"Bank tanah itu belum melakukan sosialisasi dari kemarin, dia langsung *action*, dia langsung patok. Warga akhirnya menahan agar petugas tidak mendekati patok itu. Pada saat warga menahan kegiatan, barulah Bank Tanah melakukan sosialisasi," ujarnya.

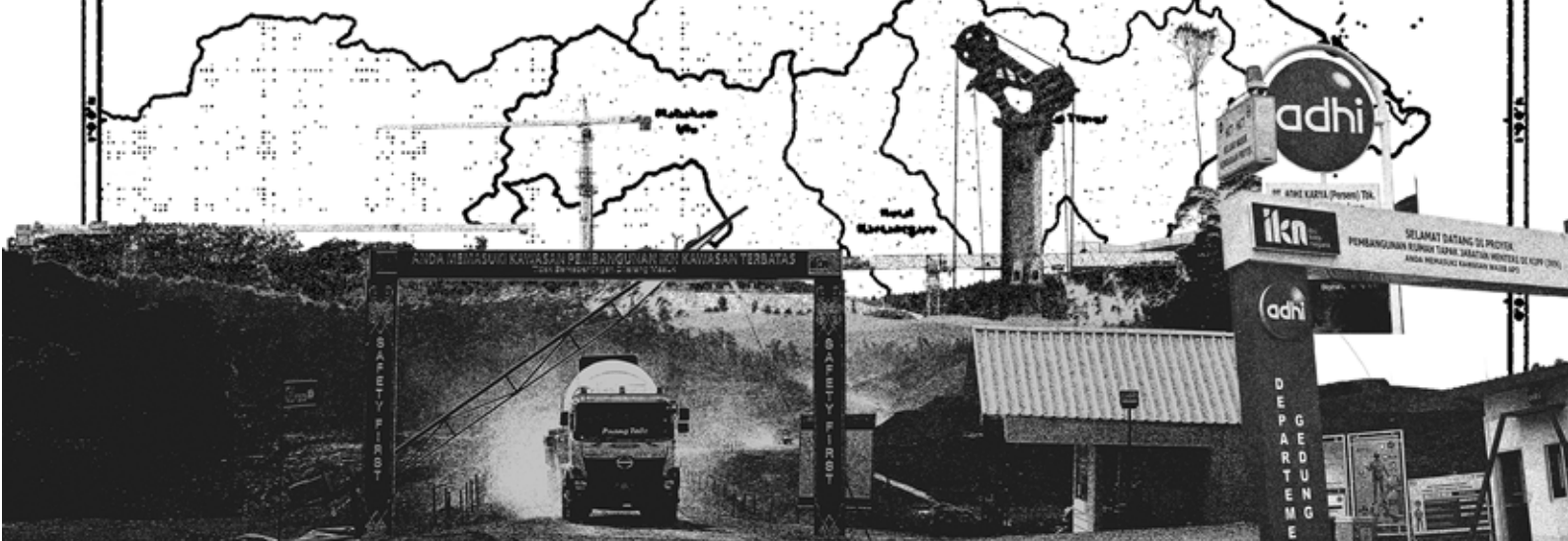
Ratusan warga yang protes itu berasal dari lima kelurahan. Empat kelurahan berada di Kecamatan Penajam, yakni kelurahan Gersik, Jenebora, Pantai Lango dan Kelurahan Riko. Sementara satu lagi berada di Kecamatan Sepaku yakni Kelurahan Maridan.

"Kita itu cuma minta yang dulu masuk HGU dan tidak pernah ditanami dan tidak pernah diganti rugi, jangan diambil. Itu aja yang kami minta,"

ujarnya. “Tapi yang terjadi hari ini tanah warga yang tidak masuk HGU diambil juga. Nah kalau seandainya Bank Tanah mau melakukan kegiatan di eks tanah HGU ya silahkan. Monggo. Tidak akan ada pelarangan,” imbuhnya.

Dalle, merasa warga seperti dipaksa untuk dipindah, ia menyebut 1.884 Ha yang seharusnya milik warga pun malah menjadi bagian lahan untuk pembangunan bandara. Imbasnya, warga yang berada di lima kelurahan akan direlokasi. Masalahnya, kata Dalle, lahan itu bukan lahan kosong. Dalle menjelaskan di atas lahan itu ada permukiman dan kebun milik warga. Terlebih, kata dia, luasan lahan yang disiapkan untuk relokasi juga tak sebanding dengan ukuran yang seharusnya. “Orang kan enggak mau dong. Misal selama ini kami ada yang punya lahan 2 Ha, ada yang 4 Ha. Belum lagi, tanaman dan tumbuhan yang ada di tanah mereka nanti mau dipindah itu seperti apa, apakah mereka bisa ganti”, ujarnya¹²⁶.

126 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230621123136-12-964695/ratusan-war-ga-ppu-protas-pematokan-tanah-untuk-bandara-ikn>, diakses pada 20 Juli 2023



VI. Data yang Disembunyikan, Komponen dan Prakiraan Dampak

VI.a. PUPR sembunyikan informasi Bendungan Sepaku-Semai

JATAM Kaltim menemukan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak transparan dan tidak membuka data terbaru mengenai dokumen teknis dan kajian dampak lingkungan proyek Bendungan Sepaku dan Intake Sungai Sepaku. Beberapa dokumen yang tidak dibuka tersebut adalah sebagai berikut:

Dokumen Teknis Pembangunan Bendungan Sepaku Semai; Dokumen Teknis Pembangunan Prasarana Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku; Dokumen Persyaratan Administrasi Identitas Pembangunan Bendungan Sepaku Semai; Dokumen Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Bendungan Sepaku Semai; Dokumen Persetujuan Prinsip Pembangunan Bendungan Sepaku Semai; Dokumen AMDAL Pembangunan Sepaku Semai; dan Dokumen AMDAL Prasarana Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku¹²⁷.

127 Surat Permohonan Informasi Jatam Kaltim kepada Kementerian PUPR tanggal 17 Oktober 2022 Nomor Surat 05/Jatam Kaltim/eks/X/2022, sumber database JATAM Kaltim 2023

JATAM Kaltim akhirnya menggugat Kementerian PUPR pada tanggal 22 Februari 2023, setelah sejak 17 Oktober 2022 permohonan untuk mendapatkan informasi tidak dihiraukan atau ditolak diserahkan, dengan alasan bahwa apabila dokumen tersebut diberikan kepada pemohon atau kepada publik dapat mengganggu kepentingan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan mengganggu persaingan usaha¹²⁸.

Upaya menyembunyikan data dan dokumen ini dapat dinilai sebagai sebuah kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam memulai sebuah proyek yang diperuntukkan bagi kepentingan publik dan pembiayaannya bersumber dari anggaran dana publik. Kejahatan ini juga merupakan skandal terhadap transparansi dan akuntabilitas keseluruhannya, dan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan megaprojek ibu kota baru ini dimulai dengan menghambat akses ke informasi publik. Alasan yang disampaikan tidak cukup kuat untuk mencegah publik mendapatkan informasi mengenai kegiatan megaprojek IKN yang penting dan patut diketahui masyarakat umum¹²⁹.

VI.b. PUPR sembunyikan informasi Bendungan Sepaku-Semai

Meskipun sengketa dan gugatan informasi yang diajukan JATAM Kaltim masih berlangsung, berdasarkan penelusuran, setidaknya terdapat lima komponen utama dalam rencana proyek pembangunan bendungan Sepaku Semai yang tengah dikerjakan saat ini di atas bentang sungai Mentoyok atau Tengin. Kami berusaha menelusur informasi tentang proyek ini, untuk membantu memahami keterbatasan daya guna dari bendungan serta potensi daya rusaknya ketika bendungan ini beroperasi.

128 Nomor register sengketa 011/II/KIP-PSI/2023, sumber database JATAM Kaltim 2023

129 <https://betahita.id/news/detail/8956/jatam-amdal-dan-5-dokumen-proyek-ikn-disembunyikan-dari-publik.html?v=1688346101>, diakses pada 20 Juli 2023

VI.c. Berbagai komponen dalam proyek Bendungan Sepaku Semoi

Meskipun sengketa dan gugatan informasi yang diajukan JATAM Kaltim masih berlangsung, berdasarkan penelusuran, setidaknya terdapat lima komponen utama dalam rencana proyek pembangunan bendungan Sepaku Semoi yang tengah dikerjakan saat ini di atas bentang sungai Mentoyok atau Tengin. Kami berusaha menelusur informasi tentang proyek ini, untuk membantu memahami keterbatasan daya guna dari bendungan serta potensi daya rusaknya ketika bendungan ini beroperasi.

VI.d. Bangunan Pengelak

Komponen pertama adalah, komponen Bangunan Pengelak yang terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan *Cofferdam*

Bangunan pengelak direncanakan berupa bendungan pengelak (*cofferdam*) dengan material berupa timbunan tanah homogen. Konstruksi *cofferdam* ini nantinya akan menyatu dengan tubuh bendungan utama. Design *cofferdam* direncanakan terletak di bagian hulu dari bendungan untuk mengamankan pelaksanaan konstruksi pondasi dan tubuh bendungan dari debit banjir yang berasal dari daerah tangkapan air.

2. Rencana Pembangunan Saluran pengelak

Selain Selain bangunan tanggul *cofferdam* (permanen) juga akan dibangun saluran pengelak yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem bangunan pengelak bendungan. Fungsi dari saluran ini adalah untuk mengalirkan aliran sungai eksisting pada kondisi normal maupun banjir, sehingga aliran tersebut tidak mengganggu atau menggenangi lokasi tapak bangunan bendungan yang akan dikonstruksi. Rencana trase saluran *box culvert* dengan panjang 92,5 meter tersebut diletakkan di sebelah kiri dari aliran sungai eksisting dengan berjarak 100 meter¹³⁰.

130 Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Pembangunan dan Pengoperasian Bendungan Sepaku Semoi, Tahun 2019, Halaman, II-7



Gambar 48. Bendungan Bener dengan Tipe Urugan, di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

VI.e. Tubuh Bendungan

Bendungan Sepaku Semoi sesuai dengan kondisi dan karakteristik site-nya direncanakan sebagai bendungan tipe urugan tanah homogen. Bendungan tipe urugan merupakan salah satu tipe bendungan yang mempunyai kelebihan dalam penyesuaian dengan gerakan pondasi tubuh bendungan, selain itu juga mudah dalam pelaksanaan konstruksi. Namun demikian bendungan

tipe urugan tanah ini mempunyai kelemahan terhadap kejadian *overtopping* dan rembesan melalui tubuh bendungan. Bendungan Sepaku Semoi direncanakan sebagai konstruksi bendungan dalam kategori menengah dengan volume tampungan $\pm 11.557.000 \text{ m}^3$ dan memiliki luas genangan $\pm 220,83 \text{ ha}$. Konstruksi tubuh bendungannya sendiri direncanakan dengan

tinggi 19 meter dari dasar sungai dengan ketinggian genangan air waduk adalah 14 meter.

VI.f. Rencana Pembangunan Bangunan Pelimpah

Bangunan pelimpah atau *spillway* merupakan bangunan pelengkap bendungan yang berfungsi untuk membuang kelebihan air waduk pada saat banjir, untuk mencegah pelimpasan air lewat puncak bendungan (*over topping*), sehingga dapat memberikan jaminan keamanan terhadap bendungan dari keruntuhan. Lokasi pelimpah direncanakan berada pada sandaran sebelah kanan. design pelimpah dipilih tipe pelimpah samping (*side spillway*). Bangunan pelengkap pelimpah terdiri dari saluran pengarah, saluran pelimpah samping, Bagian Hilir (Transisi, Peluncur dan Peredam Energi) dan Saluran Pembuangan Akhir (*Tailrace*).

VI.g. Rencana Pembangunan Bangunan Pengambilan (Intake)

Konsep perencanaan bangunan intake adalah menyalurkan air waduk menuju ke lokasi instalasi pengolahan dengan cepat dan mudah tanpa mengganggu keberadaan bangunan yang lain. Rencana lokasi bangunan intake didasarkan kepada kondisi-kondisi topografi dan geologi tempat kedudukan tapak bangunan penyadap serta tujuan, kapasitas dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis dari bangunan intake tersebut. Untuk rencana bangunan intake di bendungan Sepaku Semoi yang memiliki ketinggian 19 meter tersebut, dinilai bahwa konsep sistem bangunan yang direncanakan sangat cocok apabila menggunakan bangunan intake sistem menara.

Konstruksi bangunan intake menara pada bendungan Sepaku Semoi sesuai dengan kebutuhannya direncanakan dengan ketinggian ± 25 meter (termasuk pondasi) menggunakan konstruksi beton dengan mutu K-300. Dimensi lubang intake direncanakan dengan ukuran 0.5 m x 0.5 m,

ditempatkan dengan pola melingkar pada tubuh menara dengan masing-masing lingkaran memiliki 3 lubang pengambilan. Pada bangunan ini juga akan dilengkapi dengan jembatan penghubung dari crest bendungan menuju ke puncak menara. Jembatan penghubung tersebut direncanakan dari konstruksi baja dengan lantai jembatan dari kayu yang memiliki lebar 1,5 meter.

VI.h. Peralatan (Instrumentasi) Keamanan Bendungan

Instrumentasi bendungan adalah segala jenis peralatan yang dipasang pada tubuh maupun pondasi bendungan guna memantau kinerja atau perilaku bendungan, baik selama masa konstruksi maupun pada tahap operasinya. Dengan demikian diharapkan bahwa segala bentuk penyimpangan dan perubahan yang terjadi dapat diketahui lebih awal, sehingga tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dapat dilakukan sedini mungkin, demi menjaga atau menjamin keamanan bendungan. Secara umum maksud pemasangan instrumentasi bendungan dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebagai alat pemantau sekaligus untuk memperoleh rekaman data sebagai bahan kajian, apakah desain bendungan benar-benar sudah memadai dan cocok atau sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.
2. Membantu mencegah efek negatif yang mungkin timbul sebagai akibat ketidak sempurnaan desain yang disebabkan oleh faktor-faktor yang belum diketahui sebelumnya.
3. Sebagai alat bantu dalam rangka mengevaluasi hasil penerapan suatu metode terapan modifikasi berbagai teknologi untuk keperluan pengembangan di bidang desain bendungan untuk masa yang akan datang.
4. Untuk mendiagnosa dalam menentukan seluk beluk dan penyebab terjadinya kerusakan atau kegagalan suatu bendungan.¹³¹

5.

6.

131 Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Pembangunan dan Pengoperasian Bendungan Sepaku Semoi, Tahun 2019, Halaman II-23

Menurut Isnaini Zulkarnain¹³², seorang Akademisi Fakultas Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur, terdapat perbedaan antara intake dan bendungan. Secara khusus intake diperuntukan bagi pengolahan air yang mengarah penyediaan air bersih, sedangkan bendungan bisa untuk macam-macam keperluan yang bukan hanya seperti air bersih, namun juga untuk suplai air pertanian seperti irigasi ataupun suplai yang lainnya seperti pembangkit listrik tenaga air.

Untuk pembangunan fisiknya, intake dibangun mengarah pada salah satu sisi sungai baik kiri atau kanan sungai, sedangkan untuk bendungan memang untuk membendung sebuah atau seluruh sungai. Intake juga membutuhkan perlakuan khusus atau treatment mengarah pada penyediaan air bersih dengan beberapa lapisan yang nantinya keluarannya akan dianggap telah bersih, “istilahnya di filter” ujar Isnaini.

“Bendungan juga bisa diarahkan untuk intake. Sehingga jika nantinya air dari hasil bendungan akan digunakan sebagai air bersih maka akan mungkin dibangun intake untuk pengolahannya. Pada intake karena peruntukannya adalah penyedia air bersih pastinya akan memerlukan sejumlah teknologi filtrasi air menyesuaikan keperluannya ada yang hanya perlu dengan obat dan ada pula yang masuk melalui mesin penjernih” ujar Isnaini menjelaskan.

132 Rekaman wawancara dengan Isnaini Zulkarnain, ST., MT, pada 3 Februari 2023

KOTAK II: MODUS OPERASI PERAMPASAN TANAH WARGA

Dari penelusuran di lapang ditemukan setidaknya terdapat sembilan modus dalam perampasan lahan-lahan warga di kelurahan Sepaku menurut kesaksian masyarakat, berikut modus-modusnya.

a) Manipulasi Tanda Tangan Kehadiran Menjadi Tanda Tangan Persetujuan

Bece' menceritakan pengalamannya pada saat menghadiri pertemuan dengan pemerintah di kantor kelurahan Sepaku pada Agustus 2021, tentang rencana pembangunan proyek intake sungai Sepaku. Bece merasa ditipu. "Bapak ini seperti tipu-tipu sama kita. Kita tanda tangan daftar hadir malah dianggap tanda tangan setuju, bapak tipu-tipu ini, bapak datang patok, gusur tanpa persetujuan dari yang punya lahan, jadi bapak kayak rampok. Saya tunjuk itu peta di depan bapak-bapak itu, karena saya tidak bisa tulis, tidak bisa baca", bapak yang dimaksud Bece adalah perwakilan dari panitia pembebasan lahan.

"Tidak ada pemberitahuan sama sekali mengenai maksud tanda tangan, mereka perlakukan tanda tangan yang kami berikan itu sebagai tanda tangan persetujuan, padahal itu adalah tanda tangan kehadiran pertemuan", menurut Bece lagi. Hal ini membangkitkan pertanyaan: Mengapa tanda tangan kehadiran menjadi tanda tangan persetujuan? "Kapan kami ngomong setuju? Mereka



Gambar 49. Mustapa menunjukkan patok Proyek Intake Sungai Sepaku, di samping rumahnya.

datang ke sini langsung mengukur lahan tanpa bertanya kepada pemilik lahan. Mereka yang datang itu adalah orang dari proyek. Makanya saya kemarin dibilangin, nanti kalau kami ke lapangan ibu ikut ya ! Iya, saya akan ikut kalau dipanggil”, jawab Bece’.

b) Mematok dan mengukur lahan warga tanpa izin

Modus perampasan lainnya adalah pemasangan patok sepihak dan pengukuran lahan warga tanpa izin yang diduga dilakukan oleh PT Adhi Karya dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV di Kelurahan Sepaku, sebagai bagian dari proyek Intake Sungai Sepaku.

Mustapa, Ketua Kelompok Tani Bolum Taka dan empat keluarga lainnya yang rumahnya berada di jalan Datu Nodol



Gambar 50. Pemasangan patok di bawah kolong rumah masyarakat.

RT 03, menjadi korban dari pemasangan patok-patok ini. Rumah-rumah warga di patok secara sedikit demi sedikit, dengan tujuan meredam protes warga. Pada tahap pertama mereka mematok lima rumah dan satu masjid terlebih dahulu. Rumah Mustapa dipatok bagian dapur dan toilet, sehingga memaksa Mustapa dan keluarganya harus membongkar dan memindahkan sebagian bangunan rumahnya yang terkena patok.

Belum selesai Mustapa membangun dan memindahkan dapurnya, pihak proyek kembali memasang patok, yang kali ini posisi patoknya telah memakan setengah dari rumahnya, dengan alasan sebagai perluasan dan penunjang dari proyek intake sungai sepaku meskipun warga terdampak tidak mengetahui secara menyeluruh rencana pembangunan intake sungai sepaku.



Gambar 51. Patok bertuliskan IKN di perkebunan masyarakat.

Begitu pula dengan empat keluarga lainnya, yaitu Hermansyah, Rahmat, Mastur, dan Sarimala. Mereka mengalami hal yang sama yakni pematokan sepihak proyek yang dipasang hingga kolong rumah. Patok jadi penanda perampasan ruang hidup dan lahan warga, kehadirannya menghilangkan rasa aman dan menciptakan suasana intimidatif.

Patok-patok itu tidak hanya bermunculan di pemukiman warga, tapi juga sampai ke kebun-kebun milik warga seperti cerita yang diungkapkan oleh Pandi. “Pada awal Desember 2022 saya pergi ke kebun saya di Kilo (sebutan wilayah kebun yang berada dekat dengan perusahaan). Saya menemukan patok di lokasi kebun milik Pak Atim, bertuliskan “IKN”, dengan cat warna merah putih



Gambar 52. Penanda “Proyek Normalisasi” Sungai Sepaku berada di kebun milik Sahran.

dan dibawahnya ada angka-angka yang saya tidak tahu apa maksudnya”, ujar Pandi.

“Saya tidak tahu kapan patok itu dipasang, siapa yang memasang. Patok itu terbuat dari beton. Ketika ditelusuri, ternyata patok ini adalah patok-patok yang menunjukkan bahwa kebun kami masuk ke wilayah “IKN”. Katanya patok ini berada di kawasan milik KLHK yang akan dilepaskan ke pihak otorita”, lanjutnya.

Pengukuran tanah pun dilakukan dengan cara paksaan, seperti cerita Dahlia perempuan suku balik yang tinggal di Desa Bumi Harapan. “Mereka datang mau ngukur tanah sama rumah ini, saya bilang nggak mau, mereka



Gambar 53. Tim Petugas Pengadaan Tanah IKN menggunakan rompi dinas.

bilang lagi kalau nggak mau nanti ketika digusur, nggak dianggap ada bangunannya loh mbak, saya jawab biar aja, saya nggak peduli, sampai enam kali bolak balik saya tetap nggak mau diukur”, ujar Dahlia.

“Orang yang datang menggunakan seragam dan membawa peralatan-peralatan, ada yang menggunakan helm proyek dan seragam bertuliskan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saya selalu pesan ke mbak yang jaga di sini (penjaga warung miliknya). Kalau ada orang asing mau ngukur atau tanya soal tanah bilang aja tunggu saya datang, jangan

pernah izinkan mereka untuk mengukur tanah”, tegas Dahlia. “Lahan yang diukur disini banyak. Tempat ini lahanku, sebelah lagi lahan kakakku, berturut-turut adik dan di sebelah belakang ada lahan acilku. Sudah diukur semua” tutup Dahlia.

c) Kompensasi Tak Sesuai, Tanam Tumbuh Tak dihitung

Modus berikutnya adalah pemberian kompensasi terhadap tanah dan tanam tumbuh yang tidak sesuai dengan perbincangan awal atau perjanjian, seperti dialami oleh Bece’ dan keluarganya di Sepaku Lama.

“Setelah beberapa kali diundang rapat kami mendapatkan ‘kompensasi’, tetapi ini meleset tidak sesuai dengan perjanjiannya”. “Kemarin janjinya 100 ribu per-meter untuk tanah, pohon-pohon buah 4 ribu per-pohon, tetapi mengapa menjadi rata?”, tanya Bece.

“Sekarang tanah menjadi 70 ribu per-meter termasuk pohon-pohon buah menjadi sama dengan tanah, maksudnya sudah termasuk dalam harga 70 ribu itu, hitungannya menjadi ‘global’, jadi pohon buah tidak dihitung”, tambah Bece’.

Total yang Bece’ dan keluarganya dapatkan dari tanah pertamanya dengan lebar 20 meter

dan panjang 4 meter adalah 28 juta rupiah. “Makanya, tanah kedua yang ini mau diukur dan dibayarkan lagi saya tidak mau karena tidak sesuai dengan perjanjian harga yang dimau. Kalau mereka masih tetap mau patok saya akan cabut lagi”, tutup Bece’.

Kekhawatiran lain juga dirasakan oleh Syahran, warga RT 01 Sepaku Lama yang sebagian lahannya sudah di patok tanpa sepengetahuan dan izin nya, “awalnya mereka memasang patok 5 meter di pinggir sungai itu aja, kemudian nambah lagi 10 meter sampai kesini, benerbener masuk ke pekarangan rumah, lihat ini ada sudah patoknya di sebelah rumah, itu tanpa izin, sudah seperti maling aja saya bilang itu” tutur Sahran.

Di lahan yang ia kelola saat ini terdapat beberapa tumbuhan yang biasanya ia panen, seperti pohon kelapa, rambutan, pisang dan pohon buah lainnya serta pohon sawit, “itu kalau musim panen orang tinggal ambil aja gak usah bayar, itung-itung buat bersedekah dan berbagi, gak untuk kita jual” lanjut Sahran. Saat ini kekhawatiran Syahran dan keluarga semakin bertambah, dari pengalaman warga lainnya lahan di ganti rugi itu tidak terdapat rincian. “Itu ganti rugi dihitung global, kita tidak tau tanam tumbuh berapa, tanahnya berapa, jadi cuma dibayar keseluruhannya aja” tutup Sahran.

Basri (80) juga mengalami hal yang sama, ia bahkan tidak pernah mendapat undangan pertemuan. Basri dan istrinya kerap kali didatangi oleh RT setempat dan beberapa orang tak dikenal. Ia dibujuk untuk melepaskan lahan kebunmiliknya.LahanmilikkeluargaBasriseluas 2 Ha akhirnya dikuasai oleh intake. “setiap hari mereka ketok pintu bujukin kami untuk lepas kebun itu” cerita Basri sambil menunjukkan pohon buahnya yang sudah kering.

Tak berhenti disitu, Basri kembali ditawari sejumlah uang untuk menandatangani surat yang ia sendiri tidak tau isinya. “saya sudah tua, mata saya sudah gak awas membaca. katanya itu surat persetujuan sawah saya ditimbun”, ada yang datang bawa uang setumpuk saya tolak, besoknya datang lagi bawa uang satu juta dan pulpen suruh tanda tangan” ujar Basri. Surat kepemilikan lahan juga diambil dan dijanjikan untuk diganti yang baru. Namun, hingga saat ini Basri tidak menerima surat apapun justru, sawah sisa miliknya juga turut ditimbun.

d) Kompensasi Tak Sesuai, Tanam Tumbuh Tak dihitung

Modus lain adalah warga dipaksa menerima amplop berisi nilai ganti rugi yang akan diterima. Sebagian menerima kwitansi dan diminta

menandatangani tanda terima. sebagian “ditodong” membuat buku rekening untuk menerima kompensasi ganti kerugian.

Bece, warga Sepaku yang tanahnya menjadi sasaran pembebasan lahan menceritakan pengalamannya.”Ketika menerima uang kami hanya diberikan kwitansi tanpa surat apapun. Pernah suatu ketika ada orang yang mengurus tanah itu bilang kok ibu ini ada lagi? Jangan karena mentang-mentang ada rumah dan tanah saya di sana sini mau langsung-langsung diselesaikan, anak saya loh juga banyak. Anak saya sepuluh”, tegas Bece¹³³.

Dahlia menceritakan pengalamannya mendapatkan informasi harga tanah untuk kompensasi atau ganti kerugian lahan dari proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di desa Bumi Harapan, “Iya itu (saya dengar dari teman) dibayar dengan harga 375 ribu rupiah per meter persegi, kaget saya, lalu bagaimana

kita menolak ini ? posisi mereka juga tidak ada keterbukaan harga”, ujar Dahlia menceritakan ulang kegundahannya.

“Ini contohnya aja proyek IPAL, mereka hanya (tiba-tiba) dibukakan buku rekening, diajak undanganpertemuandi Balikpapan. Pagisampai siang pertemuan, sorenya ada petugas bank datang dan mereka dibuatkan buku rekening satu persatu, tanpa diberi tahu kapan mereka

akan menerima uang, berapa jumlah uang dan berapa luasan tanah yang diambil”, ujar Dahlia.

e. Janji Relokasi Tempat Bermukim dan Pemberian lahan cadangan

Menebar janji adalah salah satu modus pemerintah setempat, seperti yang tertangkap dalam protes yang disampaikan oleh warga dalam rapat pertemuan konsultasi masyarakat RT 01 dan RT 02 tentang pengendalian banjir sungai Sepaku akhir Januari 2023 lalu.

“Kami pegang omongan Pak Camat waktu itu. Dia bilang adanya intake masyarakat adat tidak akan direlokasi ataupun disingkirkan, tapi buktinya secara tidak langsung, secara perlahan-lahan gusur sepotong gusur lagi sepotong. Sama saja pak itu. Kita digusur perlahan-lahan, sengaja dibuat tidak nyaman nanti kan pergi sendiri. Itukah yang dinamakan adil pak buat masyarakat? Berarti tidak ada namanya Pancasila sekarang ini pak. Kalau memang ada itu Pancasila tidak mungkin terjadi seperti ini. Kami memang disini dianggap tidak ada cuma hutan belantara, tidak ada manusia disini, padahal penghidupan kami disini. Pemerintah enak mengatur dari sana, padahal ada kehidupan kami disini. Betapa menderitanya kami disini”, ucap Samsiah.

BERITA ACARA

RAPAT BERSAMA SUKU BALIK, SEPAKU LAMA DAN PEMALUAN

Hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan rapat musyawarah adat bersama di hadir tokoh-tokoh dan masyarakat adat suku balik, Sepaku Lama dan Pemaluan di rumah Ketua Adat di Sepaku lama **SIBUKDIN**, rapat bersama tersebut dilakukan dalam rangka membahas kondisi masyarakat adat paska daerah kecamatan sepaku di tetapkan sebagai Ibu Kota Negara(IKN). Serta di tambah dengan rencana program Pembangunan Bendungan Intake serta program Normalisasi Sungai yang sudah di sosialisasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat adat di sekitar bendungan akan di gusur kampong serta rumah-rumah yang masuk dalam rencana pembangunan tersebut. Dengan ini masyarakat adat dalam forum rapat bersama menyatakan poin-poin sebagai berikut;

1. Masyarakat adat suku balik di Lokasi IKN terdampak menolak program pengusuran kampung.
2. Masyarakat adat sepakat tidak mau di relokasi atau di pindahkan ke daerah lain oleh Pemerintah
3. Masyarakat adat menolak pengusuran situs-situs sejarah leluhur, kuburan atau tempat-tempat tertentu yang diyakini masyarakat adat sebagai situs adat suku balik turun-temurun
4. Masyarakat Adat Suku Balik menolak dengan keras dipindahkan(Relokasi) atau di pisahkan dari tanah leluhur
5. Masyarakat Adat Suku Balik di Kecamatan Sepaku Menolak perubahan nama kampung dan nama-nama sungai yang selama ini kami kuasai
6. Masyarakat Adat Suku Balik meminta kepada Pihak Pemerintah Segera membuat kebijakan **Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Suku Balik di Kecamatan Sepaku.**
7. Meminta Pemerintah melakukan perhatian khusus terhadap suku balik yang terdapat aktifitas pembangunan IKN, baik dampak lingkungan serta dampak sosial yang di rasakan oleh masyarakat adat suku balik di Kecamatan Sepaku
8. Masyarakat Adat Suku Balik Menolak serta tidak bertanggungjawab jika ada tokoh atau kelompok yang mengatasnamakan mewakili atasnamakan suku Balik melakukan kesepakatan terkait kebijakan di IKN tanpa melibatkan secara langsung komunitas Adat.

Demikian Berita Acara pertemuan bersama suku Balik di Sepaku Lama dan di hadir oleh Suku Balik Pemaluan, ini kami buat dengan sebenarnya dan melalui Musyawarah Adat kesepakatan bersama ini agar dapat menjadi pernyataan sikap resmi Suku Balik di Lokasi Kawasan IKN.

Atas perhatian kearah ini kami ucapkan terima kasih.Tanda tangan Peserta yang hadir dalam pertemuan terlampir menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan.



Ketua Adat Suku Balik Sepaku Lama



Kepala Adat Suku Balik Pemaluan

Gambar 54. Berita Acara, Hasil Rapat Bersama Masyarakat Adat Balik, tentang rencana Pembangunan Intake dan Normalisasi Sungai Sepaku.

f. Dihadapkan Pada Ancaman Pengadilan

Terjadi praktik pematokan untuk pembebasan lahan di beberapa titik rumah warga tanpa proses sosialisasi. Warga yang menolak di intimidasi, dipaksa untuk menerima dan jika tetap menolak diancam dengan gugatan hukum ke pengadilan.

Pengalaman ini dirasakan Rimba, warga Sepaku Lama RT 03 yang lahan kebun miliknya juga dicaplok oleh proyek pembangunan Intake Sungai Sepaku. Ia menceritakan menerima amplop kompensasi atau ganti kerugian yang bukan berisi uang namun berisi nilai nominal angka ganti kerugian yang akan ia terima. "Saya dipanggil ke ruangan, dikasih amplop disuruh buka amplopnya isinya nilai uang ganti ruginya. kita dibilangin segitu nilainya. Kalau tidak terima disuruh ambil ke pengadilan", ujar Rimba menceritakan.

Ibu-ibu adalah kelompok yang paling vokal ketika berhadapan dengan ancaman sidang dan pengadilan, seperti yang terekam dalam rekaman yang beredar di masyarakat. Rekaman perdebatan itu terjadi pada 31 Januari 2023 di masjid Darul Ibadah, lokasi pertemuan konsultasi masyarakat RT 01 dan RT 02 tentang pengendalian banjir sungai Sepaku. "Kalau keberatan silahkan disidang." Emang kita ini orang miskin ini punya uang buat bersidang? Buat buka dan harus menghadiri sidang itu sudah habis uang berapa pak? Emang kita ini

orang kaya kah pak harus buka sidang? Kami ini orang susah cuma masyarakat miskin, jangan masalah seperti ini kita ditakuti diancam dengan sidang-sidang begitu,” ujar anak Ibu Serintan.

Sahran, warga Rt. 01 Sepaku lama menceritakan bagaimana pengalamannya menyaksikan warga lainnya ketika diundang saat pertemuan pembebasan lahan proyek normalisasi di lapangan RT 01 yang biasa disebut masyarakat sebagai “tribun” RT. “Warga seperti kami itu kalau tidak mengerti merasa seperti terintimidasi. Sekarang tidak ada kejelasan juga. Ada yang bilang nanti kami dipanggil ke kantor satu-persatu, suka tidak suka, setuju tidak setuju uangnya (uang ganti rugi pembebasan lahan) disuruh ngambil di pengadilan. Itu kan saya bilang menghakimi dan pemaksaan. Tapi maaf saya ini orang awam, nggak ada sekolahnya”, tutur Sahran.

Di lokasi proyek yang lain, Mustapa bersama sekitar 30 keluarga di Rt. 03 menjadi korban pembangunan proyek Intake Sepaku yang merambah halaman belakang rumah dan kebun miliknya. “Lahan saya 25 meter panjang dan 6 meter lebarnya, dibayar 15 juta untuk tanah dan 25 juta untuk tanam tumbuh” ujarnya, ia mengaku bahwa menerima ganti kerugian atau kompensasi pembebasan lahan tersebut juga dengan terpaksa. Tidak ada diberi kesempatan kita pak untuk menyampaikan keberatan. Kata mereka, “silahkan diterima. Jika tidak setuju,

keberatan, silahkan ke pengadilan. begitu kata mereka pak,” tambah Mustapa lagi.

Medan, masyarakat asli suku Balik yang tinggal di Desa Bumi Harapan, kecamatan Sepaku, juga senasib dengan Sahran dan Mustapa. “Tanah saya 3,5 hektar yang saya tanami sawit dan buah-buahan, katanya diambil untuk KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan),” ujarnya. “ Kalau tidak setuju, kata mereka, lanjut ke Pengadilan, tidak ada kesempatan tanya jawab”, tambah pemangku adat setempat ini.

Bukan cuma Sahran, Mustapa dan Medan yang keberatan dan kecewa, tidak jauh untuk proyek serupa Bendungan Sepaku Semoi, ratusan warga pemilik lahan juga kebingungan. Mereka menyampaikan keberatan namun serupa yang terjadi dengan proyek Intake Sungai Sepaku, mereka tidak punya pilihan dan tidak punya dana untuk melawan sampai ke Pengadilan. Padahal sebagian besar dari mereka adalah warga Masyarakat Adat Balik yang memiliki konsep sendiri tentang Tanah. “Silahkan gugat ke pengadilan” telah menjadi kalimat andalan yang selalu dipakai oleh penyelenggara proyek dan pemerintah dalam setiap agenda pembebasan lahan. Kalimat ini mengintimidasi dan mengganggu kepercayaan diri warga.

g. Mengadu-domba sesama warga lewat rekayasa pertemuan antar warga

Bukan hanya isi rapat dan hasil rapat yang tidak menyerap aspirasi masyarakat. menurut kesaksian Rahma, warga RT 02 Sepaku Lama, bahkan sebagian warga ditutup informasinya untuk dapat mengakses jadwal rapat dan pertemuan, sehingga hak atas informasi warga menjadi hilang. “Ya semuanya semaunya aja, berubah-ubah terus rencana pertemuan-pertemuan di Kelurahan & di Masjid. Iya betul itu, nggak ada informasi, pemberitahuan mendadak-mendadak. Mereka juga saling menutupi biar masyarakat nggak tahu”, ujar Rahma.

Rapat dan pertemuan yang seharusnya menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan mengkonsolidasikan diri justru digunakan oleh aparat pemerintahan dan pelaksana proyek sebagai strategi untuk memecah dan "mengkondisikan" warga, seperti yang disampaikan oleh Pandi, warga RT 03, Sepaku Lama. Pertemuan konsultasi masyarakat RT 01 dan RT 02 tentang pengendalian banjir sungai sepaku pada hari selasa 31 Januari 2023 di masjid Darul Ibadah RT 03, menurut Pandi sengaja dipisahkan.

“Ini adalah salah satu cara pemerintah untuk memecah suara penolakan warga, karena jika disatukan pertemuan di balai kelurahan maka

**SURAT PERNYATAAN PELEPASAN/PENYERAHAN HAK ATAS TANAH ATAU
PENYERAHAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN/ATAU TANAMAN
DAN/ATAU BENDA-BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIMBA**
NIK/Identitas diri lainnya : 6409040107580063
Umur : 63 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl Datu Nondol RT 003 Kel. Sepaku, Kec. Sepaku

selaku pemilik/pihak yang menguasai/pemegang hak bidang tanah atas Objek Pengadaan Tanah berupa sebidang tanah dengan luas 469 m², NIS 14 bangunan/tanaman/benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah (lihat halaman 2) terletak di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini menyatakan :

1. bahwa saya telah melepaskan/menyerahkan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah*) tersebut di atas kepada Negara, dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas Objek Pengadaan Tanah tersebut (terlampir) kepada Pelaksana Pengadaan Tanah,
2. bahwa saya telah menerima Ganti Kerugian berupa uang sebesar **Rp 98.554.075 (Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah)**,
3. saya menjamin bahwa:
 - a. Objek Pengadaan Tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak dalam sengketa atau perkara;
 - b. Objek Pengadaan Tanah tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungan/tidak dijadikan jaminan utang dengan cara apapun;
 - c. Objek Pengadaan Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun; dan
 - d. tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/memiliki hak atas Objek Pengadaan Tanah tersebut.
4. Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai/memiliki hak atas Objek Pengadaan Tanah tersebut, saya bersedia menanggung segala akibat dari pelepasan hak/penyerahan Objek Pengadaan Tanah ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya ancaman/paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah dicatat daftar
No. AT.02.02/ 456 -64.09/PTP2/IV/2022

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Penajam Paser Utara



ADE CHANDRA WIJAYA, S.T., M.Si.
NIP. 19780511 200212 1 005

Penajam Paser Utara, April 2022
Pihak Yang Berhak,



RIMBA

Gambar 55. Surat pelepasan tanah warga.

akan kuat orang-orang yang menolak”, ujar Pandi.

Manfaat dari rapat dan pertemuan juga tidak dirasakan oleh warga, lebih dari itu, seperti kesaksian yang disampaikan Samsiah, warga Sepaku Lama RT 03 yang mengikuti pertemuan tersebut, rapat dan pertemuan justru tidak mencatat dan tidak menindaklanjuti aspirasi warga, padahal menurut Samsiah saat pertemuan di masjid itu warga meminta hasil berita acara pertemuan, sebab tidak semua menerima dan lebih banyak yang bersikap menolak atas rencana-rencana proyek.Pandi.¹³⁴

h. Setelah Transaksi, Surat Tanah Asli Tak Kunjung Dikembalikan

Salah satu kondisi yang dialami warga adalah, warga tidak menguasai lagi surat atau sertifikat tanah setelah proses pembelian sebagian lahan dilakukan oleh proyek Intake. Perlakuan ini dialami oleh,sepasang suami istri, Rimba dan Baniah, warga kelurahan Sepaku. Padahal lahan yang dibebaskan oleh pihak perusahaan hanya 469 m², dari keseluruhan luas tanahnya 1.400 M persegi. Keluarga itu kini resah karena hanya memegang surat pernyataan, sementara surat tanah asli milik mereka tidak dipecah sebelumnya, dan bahkan surat asli sebagai bukti kepemilikan belum diberikan sampai saat

LAMPIRAN BANGUNAN, TANAMAN, DAN BENDA-BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

NIS	Pihak Yang Berhak		Luas yang Dibeaskan (m ²)	Tanaman				Bangunan		Benda-benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah
	Pemilik	Mengusai/Penggarap		Jenis	Kecil	Sedang	Besar/Produktif	Jenis	Luas (m ²)	
14	RIMBA	RIMBA	469	Salak	-	-	2			
				Cempedak	-	-	9			
				Aren	-	-	4			
				Durian	-	-	9			
				Lay	-	-	4			
				Sawit	-	-	4			
				Langsat	-	-	4			
				Mangga	-	-	3			
				Jeruk	-	-	1			
				Jati	-	-	1			
				Rambutan	-	-	1			
				Palem	-	-	2			
				Pisang	-	-	1			

Gambar 56. Surat Lampiran pembebasan lahan Proyek Intake Sepaku.

ini. Hal ini juga dialami oleh beberapa warga lainnya seperti, Mustapa, Basri, dan Bakron.

Diatas lahan itu tumbuh berbagai tanaman buah seperti durian, rambutan, langsung, jeruk, mangga, seperti pada foto lampiran dibawah. Lahan itu dibeli seharga 90 juta Rupiah. Rimba dan Baniah juga mengaku penentuan harga dilakukan secara sepihak oleh pihak proyek intake, padahal sebelumnya ada kesepakatan akan dilakukan penghitungan lahan dan tanam tumbuh didalamnya. Sepasang suami istri itu juga menceritakan alur pengalaman kelam sebelum akhirnya lahan mereka “terpaksa” diserahkan ke Proyek intake. Mulanya mereka menerima informasi bahwa lahannya tidak masuk ke dalam

proyek intake, namun setelah proyek tersebut berjalan, justru sebagian lahan mereka masuk dalam proyek tersebut.

Selama mengikuti berbagai pertemuan, Rimba mengaku mengalami beberapa kegagalan, diantaranya adalah berubahnya kop surat absensi kehadiran, menjadi kop surat persetujuan. Hal menggajal lainnya adalah proses pembayaran pembebasan tanah yang berlangsung tertutup dan terkesan memojokkan pihak warga karena dikawal oleh pihak pertanahan dan kepolisian. Ungkapan jika tidak setuju terhadap proses pembebasan dan pembayaran, “Warga dipersilahkan untuk pergi ke pengadilan”, juga muncul dalam pengalaman Rimba. Hal ini membuat Rimba dan warga lainnya, merasa tertekan dan takut.



7. Lex Mercatoria, Bagaimana Produksi Kebijakan dan Hukum Menyokong Penghancuran

“Kita sekarang berada pada garis depan kemajuan dari *lex mercatoria*, rezim hukum untuk membela kepentingan dagang : kantor-kantor negara akan melindungi dan menjamin aliran investasi bukan pemenuhan hak rakyat”¹³⁵

(Hendro Sangkoyo, 2014)

¹³⁵ <https://indoprogress.com/2014/10/hendro-sangkoyo-kita-sekarang-berada-pada-garis-depan-kemajuan-dari-lex-mercatoria-rezim-hukum-untuk-membela-kepentingan-dagang/>
diakses pada 30 Mei 2023

Mega proyek Ibu kota baru tidak berdiri sendiri, selain didukung oleh aliran finansial dan keuangan, rencana ini juga disokong oleh gelombang regulasi dan berbagai produk hukum lainnya, hubungannya saling terikat, tanpa sokongan regulasi dan produk hukum, aliran finansial atau keuangan juga tidak akan lancar, rangkaian regulasi dan produk hukum ini dapat digolongkan sebagai rezim hukum untuk membela kepentingan dagang atau yang disebut sebagai *lex mercatoria*¹³⁶.

Sejak awal keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, termasuk juga pemilihan lokasi, di sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara adalah keputusan politik yang disampaikan mendahului kajian, bahkan belum didukung oleh regulasi hukum pada 26 Agustus 2019¹³⁷, namun keputusan ini kemudian disusul dengan sejumlah pembahasan produk hukum untuk melegitimasi dan menjustifikasinya.

Hingga kini, sudah 4 tahun berjalan, sedikitnya enam belas¹³⁸ produk hukum mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah pusat dan daerah yang menjadi bagian dari rezim hukum ibu kota baru yang memiliki fungsi sebagai legitimator mega proyek ini.

Pada akhirnya melalui produksi hukum dan peraturan tersebut, kombinasi negaradankorporasitelahmelegalkankejahatandibalikurbanisme kapitalistik ibu kota baru, yakni melegalkan penggusuran dari tanah dan ruang hidup,

136 <https://indoprogress.com/2014/10/hendro-sangkoyo-kita-sekarang-berada-pada-garis-depan-kemajuan-dari-lex-mercatoria-rezim-hukum-untuk-membela-kepentingan-dagang/> diakses pada 30 Mei 2023

137 Silahkan cek dan baca ; <https://www.jatam.org/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik-atau-elit/>

138 Dua belas diantaranya adalah, Undang-Undang Cipta kerja nomor 11 tahun 2020, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU IKN nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara, Peraturan Presiden nomor 63 Perincian Rencana Induk Ibukota Nusantara, Peraturan Gubernur Kaltim nomor 6 tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, penggunaan tanah dan Perizinan pada Kawasan Calon Ibukota dan Kawasan Penyangga, Pengaturan Pemerintah (RPP) tentang kemudahan berusaha atau investasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN)



Gambar 57. Infografis berbagai peraturan dan regulasi kebijakan yang berkaitan dengan memuluskan megaprojek IKN.

perampasan bentang air dan sungai, merampok uang publik, melanjutkan warisan perusakan sebelumnya, menyingkapkan identitas, pengetahuan dan sejarah hingga meminggirkan perempuan adat suku balik.

Seperti banyak rangkaian berbagai proyek infrastruktur sebelumnya yang juga menggunakan dalih “atas nama kepentingan umum”, pengurus negara kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum untuk melancarkan pencaplokan tanah demi megaprojek IKN ini.

Begitu juga untuk mengundang para pemodal, sejumlah regulasi dan peraturan diproduksi, diantaranya melalui Peraturan pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, bagi para wajib pajak dalam negeri yang melakukan penanaman modal di IKN Nusantara akan diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.

Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 1 diberikan untuk penanaman modal paling sedikit Rp. 10 Miliar (sepuluh miliar rupiah)¹³⁹. Hal ini melengkapi kemudahan yang diberikan sebelumnya berupa perpanjangan HGB selama dua kali 80 tahun dan HGU selama 95 tahun.

Pada PP yang sama, setelah jaminan kemudahan mendapatkan lahan dan diskon bagi pengusaha yang diharapkan menanamkan modalnya di Ibukota baru, dalam hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, pengurus negara juga memberikan ruang yang lapang bagi tenaga kerja asing diantaranya yang tercantum dalam pasal 22, pengurus negara mengatur pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dapat mempekerjakan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu.

Selanjutnya pada Pasal 23, pengurus negara mengatur bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakan pelaku usaha tersebut dapat diberikan izin tinggal untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, bahkan mengatakan bukan hanya pekerja asing, namun juga keleluasaan bagi tenaga kerja pengawas yang juga membuka ruang untuk diisi oleh pengawas atau konsultan asing.

¹³⁹ <https://sulteng.antaranews.com/berita/263628/pemerintah-beri-pengurangan-pajak-ke-investor-domestik-yang-masuk-ikn> diakses pada 30 Mei 2023

Luhut menilai, sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing. "Bangsa kita enggak bisa ya memang enggak bisa. Kualitasnya masih kadang miring-miring, kalau Anda lihat bangunan kita masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi, kuat tapi masih belok-belok," kata Luhut¹⁴⁰.

Sementara disaat yang sama di lapangan, terjadi banyak rangkaian kejahatan terhadap tenaga kerja Indonesia yakni salah satunya adalah isu tentang tidak dibayar dan dipotongnya upah kerja para pekerja konstruksi di proyek IKN. Informasi yang beredar banyak pekerja konstruksi yang pulang kampung karena hanya mendapatkan upah Rp.80.000 sehari. Upah itu dipotong oleh sang mandor yang awalnya dijanjikan Rp.150.000 per-hari sebelum berangkat ke Kalimantan.¹⁴¹

Ketidakpastian atas hak kepemilikan tanah dirasakan oleh sebagian masyarakat, seperti yang dirasakan oleh Sibukdin dan Jubain. Mereka merasa jika tidak ada kepastian hukum, bisa saja sewaktu-waktu akan diambil alih oleh negara jika tak jelas alas hak mereka. Padahal kampung ini tercatat sudah lama didiami warga, terutama masyarakat adat Balik. Kepala adat masyarakat Balik di Kampung Sepaku Lama, Sibukdin, mengatakan mereka telah berada di wilayah itu jauh waktu, bahkan sebelum negara RI merdeka dan perusahaan konsesi masuk ke sana.

Senada pula, Kepala adat di Kelurahan Pemaluan, Jubain, mengatakan sejak awal pengumuman IKN, pihaknya belum mendapatkan penjelasan kepastian soal nasib mereka. Jubain yang sehari-hari memenuhi kehidupan keluarganya berladang mengaku lahan garapannya sudah disebutkan petugas masuk ke dalam KIPP IKN. Ia menuturkan ketika ada program sertifikasi lahan dari pemerintah, setelah pengukuran rumahnya yang berada di RT 2 Pemaluan itu, dirinya meminta sekalian juga diukurkan kebunnya kepada petugas dari BPN.

140 <https://www.kompas.tv/regional/416551/proyek-ikn-pakai-pekerja-asing-luhut-bangsa-kita-tidak-bisa-kualitasnya-kurang-bagus>, diakses pada 20 Juli 2023

141 [13 Pekerja Konstruksi di IKN Pulang karena Diupah Rp80.000 Sehari, Ini Kata Badan Otorita \(inews.id\)](#) diakses pada 20 Juli 2023

“Kata orang BPN ini sudah masuk ke IKN, waktu itu kita mau urus juga (sertifikat untuk kebun) dan minta tolong diukur, ternyata tidak bisa karena katanya sudah masuk peta IKN itu,” kata dia.

“Jangan disebut kami tidak ada [lahan], kami tidak pernah diajak berunding atau sosialisasi ditempatkannya ibu kota ini,” imbuhnya.

Sejak diumumkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Agustus 2019 hingga UU 3 tahun 2022 tentang IKN disahkan, mereka merasa belum mendapatkan penjelasan dan kepastian akan nasib mereka baik lahan rumah maupun pertanian atau ladang yang jadi Ibu Kota Baru.¹⁴²

Yang dirasakan oleh masyarakat adat sebelum IKN diputuskan, mereka tidak merasa perlu meminta pengakuan atau legalisasi terhadap tanahnya. Namun kini setelah IKN diputuskan muncul kekhawatiran. Bukan hanya status terhadap lahan lahan mereka, namun juga memiliki dampak psikologis mendaftarkan atau melegalisasi tanah tanah yang mereka miliki.

Hal ini adalah sisi yang tidak dipikirkan pemerintah ketika mengeluarkan Peraturan Gubernur Kaltim nomor 6 tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, penggunaan tanah dan Perizinan pada Kawasan Calon Ibu Kota dan Kawasan Penyangga serta Peraturan Bupati Penajam Paser Utara nomor 22 tahun 2019 tentang pengawasan dan pengendalian transaksi jual/beli tanah/peralihan hak atas tanah. Begitu ditambah lagi dengan Surat Edaran (SE) Kementerian ATR/BPN Nomor 3/SE-400.HR.02/II/2022.

Pada Pasal 4 Ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Kaltim nomor 6 tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, penggunaan tanah dan Perizinan pada Kawasan Calon Ibukota dan Kawasan Penyangga pada menyebutkan “pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf d dan huruf e, dengan melakukan pembatasan yaitu tidak membuat /menguatkan/ mengesahkan akta/surat keterangan dan/atau bentuk lain yang bermaksud untuk melegalisasi perbuatan hukum dalam rangka peralihan hak atas tanah dan pelepasan tanah yang bertujuan menguasai tanah secara berlebihan, tidak wajar dan terindikasi spekulatif.”

142 [Ketar-ketir Masyarakat Adat Tersingkir dari Ibu Kota Nusantara \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com) diakses pada 25 Juli 2023.

Kesemuanya termasuk SE Kementerian ATR/BPN, disimpulkan sebagai kejahatan maladministrasi¹⁴³ yang menyebabkan terhentinya pelayanan permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran di desa dan dampaknya juga pada penghentian urusan pertanahan termasuk di wilayah luar kawasan delineasi IKN.

Kejahatan atau pelanggaran ini mengakibatkan hilang dan minimnya perlindungan hak perdata warga negara, seperti yang ditemukan oleh penyelidikan/investigasi Ombudsman RI melalui ekspos temuan mereka pada 27 Juli 2023. Terdapat lima kecamatan yang terdampak mengenai urusan ini mulai dari seluruh desa di kecamatan Sepaku, sebagian kelurahan Jawa, 8 kelurahan dan sebagian kelurahan muara kembang, sebagian desa sungai Payang dan Jonggon di kecamatan Loa Kulu hingga 5 desa di kecamatan Loa Janan¹⁴⁴. Praktik peraturan ini juga menambah beban, kecemasan dan permasalahan yang dihadapi warga, salah satunya adalah lenyapnya hak keperdataan kepemilikan lahan/tanah, terutama bagi masyarakat lokal atau masyarakat adat yang menguasai atau memiliki hak atas tanah tetapi tidak memiliki dokumen kepemilikan.

Saat masyarakat dipersulit untuk mendapat perlindungan atas hak tanahnya, justru di saat yang sama kemudahan mendapatkan lahan diberikan kepada korporasi dan investor melalui kebijakan “diskon” HGB dan HGU yang dikeluarkan pemerintah pusat itu sendiri. Selain regulasi yang memuluskan penguasaan lahan dan tenaga kerja asing, hal lain yang juga muncul adalah “ditabraknya” konsep sistem pemerintahan dalam otonomi daerah melalui konsep dan sistem pemerintahan badan otorita yang diatur pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ibu Kota Negara. yang menyebutkan “Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara.”¹⁴⁵

Namun hal ini mengundang sorotan dan kritik diantaranya adalah hilangnya semangat otonomi daerah seperti hilangnya hak untuk menentukan prioritas

143 <https://www.voaindonesia.com/a/ombudsman-ri-temukan-dugaan-maladministrasi-di-ikn-nusantara/7200716.html>, diakses pada 31 Juli 2023

144 Presentasi Penyampaian Hasil Investigasi, Dugaan Maladministrasi Penghentian Layanan pertanahan di dalam dan diluar daerah delineasi IKN, sumber data JATAM Kaltim 2023

145 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ibu Kota Negara

pembangunan daerah, hak mengelola sumber daya, dan mempengaruhi kebijakan yang akan berdampak pada kehidupan mereka.

Partisipasi masyarakat, termasuk melalui mekanisme konsultasi publik dan dialog antara pemerintah dan warganya, dianggap penting untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah juga akan hilang, termasuk hilangnya hak politik sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) UU IKN bahwa Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD. Hilangnya DPRD di wilayah IKN akan berdampak pada hilangnya sosok perwakilan yang berfungsi menjembatani masyarakat dengan pemerintah namun juga hilangnya aspirasi masyarakat.

Produksi regulasi kebijakan yang menyokong IKN ini nampaknya akan terus berlanjut, diantaranya adalah rencana revisi terhadap Undang-undang IKN No.3 Tahun 2020, diantaranya adalah menjadi landasan perluasan wilayah dari 256.142 Ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektar) menjadi 333.300 Ha (tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus hektar)¹⁴⁶. Begitu juga dengan penambahan luasan kawasan untuk pengembangan IKN dari yang semula seluas 199.962 Ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua hektar), menjadi 277.120 Ha (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh hektar).¹⁴⁷

Selain itu muncul juga wacana tentang penambahan porsi anggaran untuk pembiayaan IKN yang semula hanya sebesar dua puluh persen kini menjadi lebih besar, yang akan diselundupkan ke dalam revisi Undang-undang IKN ini. Karena dianggap porsi anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan tidak mencukupi untuk pembiayaan pembangunan IKN¹⁴⁸. Kondisi ini tentu akan kembali menguras uang rakyat di tengah sejumlah masalah ekonomi yang lebih krusial, seperti pembengkakan beban hutang, laju inflasi global yang dihadapi Indonesia, dan belum banyak masalah ekonomi yang dirasakan masyarakat seperti pengurangan subsidi BBM, juga naiknya premi iuran kesehatan bagi masyarakat.

146 <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-035527-5724.pdf>

147 <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-035527-5724.pdf>

148 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230206/9/1625231/revisi-uu-no-32022-tentang-ikn-pembiayaan-apbn-cuma-20-persen> diakses pada 31 Juli 2023



8. Desakan

MEGA PROYEK Ibukota Baru bukan solusi hijau dan berkelanjutan seperti yang selama ini digemborkan, sebaliknya Indonesia tidak membutuhkan Ibu Kota Baru melainkan agenda pemulihan atas krisis sosial ekologi yang saat ini terjadi pada bentang alam kepulauannya yang menyebabkan kekacauan dan bencana iklim

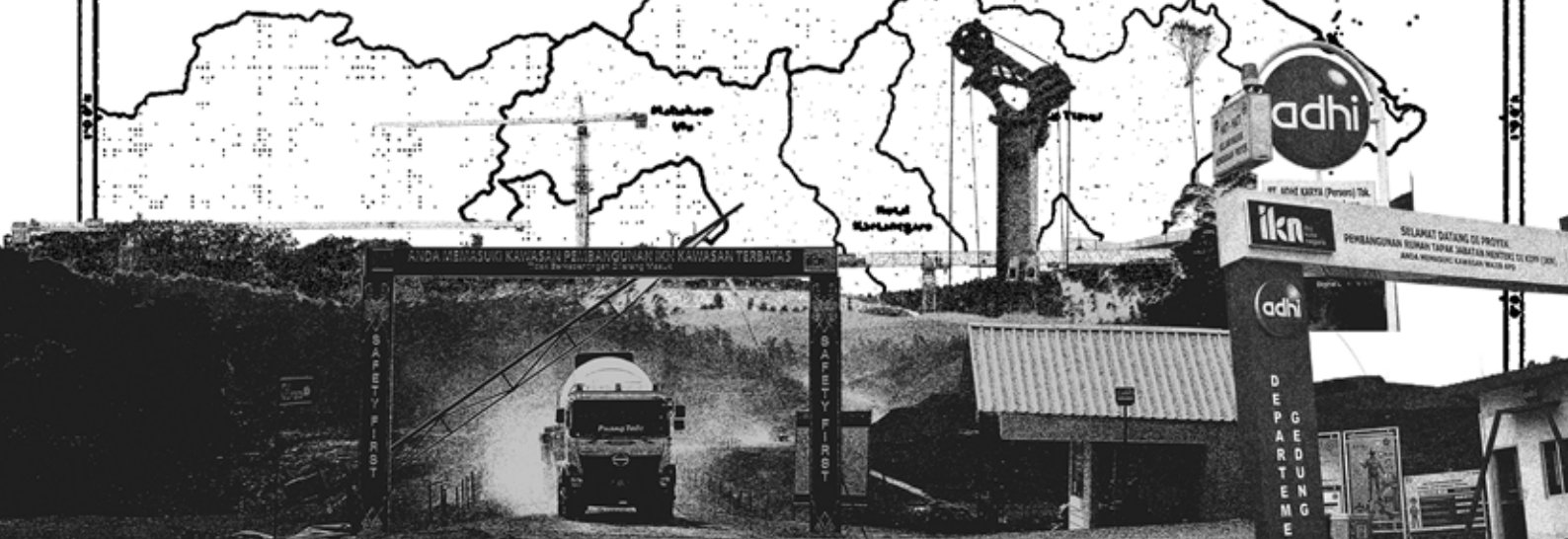
Pembangunan Ibu Kota Baru melalui berbagai proyek bagian dari mega proyek pemindahan Ibukota Baru Indonesia yang saat ini dikemas sebagai proyek “hijau” dan “berkelanjutan” melalui pembangunan Bendungan

Sepaku-Semai, Intake dan Proyek pengendalian banjir Sungai Sepaku, terungkap bagaimana ancaman dan daya rusak yang dialami oleh masyarakat dan perempuan adat Balik. Mereka menghadapi penjajahan dan penindasan berlapis dan menyejarah hingga menjadi korban sempurna oleh proyek yang diklaim sebagai “Legacy” Presiden Jokowi ini.

Keputusan pemindahan ibu kota negara baru Indonesia harus dibatalkan dan memprioritaskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar rakyat Indonesia. Proyek infrastruktur bendungan harus dihentikan karena dokumen teknis dan lingkungan diselenggarakan tanpa transparansi dan tidak terbuka kepada publik, terutama kepada masyarakat adat dan warga yang terdampak di sekitarnya

Tuntutan masyarakat dan perempuan adat untuk mempertahankan ruang hidup tersisa saat ini harus dikedepankan, berbagai aneka pemaksaan kehendak untuk menggusur dan mencuri lahan milik masyarakat harus dihentikan.

Negara-negara, Investor dan Lembaga-lembaga Keuangan harus menyelamatkan reputasinya pada proyek yang dimulai dengan tidak transparan dan melanggar hak-hak masyarakat ini dengan mengevaluasi keterlibatan dan menarik diri dari berbagai keterkaitan finansial pada mega proyek Ibu Kota Baru ini.



9. Lampiran

1. Berita Acara

BERITA ACARA

RAPAT BERSAMA SUKU BALIK, SEPAKU LAMA DAN PEMALUAN

Hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan rapat musyawarah adat bersama di hadirinya tokoh-tokoh dan masyarakat adat suku balik, Sepaku Lama dan Pemaluan di rumah Ketua Adat di Sepaku lama **SIBUKDIN**, rapat bersama tersebut dilakukan dalam rangka membahas kondisi masyarakat adat paska daerah kecamatan sepaku di tetapkan sebagai Ibu Kota Negara(IKN). Serta di tambah dengan rencana program Pembangunan Bendungan Intake serta program Normalisasi Sungai yang sudah di sosialisasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat adat di sekitar bendungan akan di gusur kampung serta rumah-rumah yang masuk dalam rencana pembangunan tersebut. Dengan ini masyarakat adat dalam forum rapat bersama menyatakan poin-poin sebagai berikut;

1. Masyarakat adat suku balik di Lokasi IKN berdampak menolak program pengusuran kampung.
2. Masyarakat adat sepakat tidak mau di relokasi atau di pindahkan ke daerah lain oleh Pemerintah
3. Masyarakat adat menolak pengusuran situs-situs sejarah leluhur, kuburan atau tempat-tempat tertentu yang diyakini masyarakat adat sebagai situs adat suku balik turun-temurun
4. Masyarakat Adat Suku Balik menolak dengan keras dipindahkan(Relokasi) atau di pisahkan dari tanah leluhur
5. Masyarakat Adat Suku Balik di Kecamatan Sepaku Menolak perubahan nama kampung dan nama-nama sungai yang selama ini kami kuasai
6. Masyarakat Adat Suku Balik meminta kepada Pihak Pemerintah Segera membuat kebijakan **Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Suku Balik di Kecamatan Sepaku**.
7. Meminta Pemerintah melakukan perhatian khusus terhadap suku balik yang terdampak aktifitas pembangunan IKN, baik dampak lingkungan serta dampak sosial yang di rasakan oleh masyarakat adat suku balik di Kecamatan Sepaku
8. Masyarakat Adat Suku Balik Menolak serta tidak bertanggungjawab jika ada tokoh atau kelompok yang mengatasnamakan mewakili atasnamakan suku Balik melakukan kesepakatan terkait kebijakan di IKN tanpa melibatkan secara langsung komunitas Adat.

Demikian Berita Acara pertemuan bersama suku Balik di Sepaku Lama dan di hadirinya oleh Suku Balik Pemaluan, ini kami buat dengan sebenarnya dan melalui Musyawarah Adat kesepakatan bersama ini agar dapat menjadi pernyataan sikap resmi Suku Balik di Lokasi Kawasan IKN.

Atas perhatian kearah ini kami ucapkan terima kasih.Tanda tangan Peserta yang hadir dalam pertemuan terlampir menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan.

Ketua Adat Suku Balik Sepaku Lama



Kecamatan SIBUKDIN

Kepala Adat Suku Balik Pemaluan



Kecamatan SEPULUAN

10. Daftar Pustaka

1. AdyWidyanto, TaenHine, Mencari Tahu, Investigasi Daya Rusak Pertambangan, 2008
2. Syamsul Dwi Maarif (2021) Sejarah Pemberontakan DI-TII Ibnu Hadjar: Alasan, Tujuan, & Akhir diakses 2 Mei 2023 <https://tirto.id/sejarah-pemberontakan-di-tii-ibnu-hadjar-alasan-tujuan-akhir-giE5>
3. Merah Johansyah (2023) Kabar Keruh dari Sungai Sepaku: Penghancuran Berlapis pada Masyarakat Suku Balik dan Ruang Hidupnya diakses 27 Juni 2023 <https://www.naladwipa.or.id/essay/kabar-keruh-dari-sungai-sepaku-penghancuran-berlapis-pada-masyarakat-suku-balik-dan-ruang-hidupnya>
4. Website Resmi Pemerintah Desa Bukit Raya (2023) Sejarah Desa diakses pada Februari 2023 <http://desa-bukitraya.penajamkab.go.id/sejarah-des/>
5. Assegaf A.S, Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Paser, 1982, Halaman 82
6. Kompas (2021) Asal usul Balikpapan dan cerita perahu terbalik. Diakses pada : 31 Juli 2023 <https://regional.kompas.com/read/2021/02/20/08000091/asal-usul-balikpapan-dan-cerita-perahu-papan-terbalik?page=all>
7. Mees, Constatinus Alting, 2021: KRONIK KUTAI, hal.108.
8. Verelladevanka Adryamathanino (2022), Pertempuran Balikpapan 1942, Latar Belakang, Kronologi dan Akhir diakses pada 10 Februari 2023 <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/09/090000479/pertempuran-balikpapan-1942--latar-belakang-kronologi-dan-akhir?page=all>
9. Verelladevanka Adryamathanino, (2022) Ibnu Hadjar, Pemimpin Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan diakses pada 10 Februari 2023 [https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/28/120000579/ibnu-hadjar-pemimpin-pemberontakan-di-tii-di-kalimantan-selatan-?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%E2%80%93%20Ibnu%20Hadjar%20adalah,Indonesia%20\(DI%2FTII\)](https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/28/120000579/ibnu-hadjar-pemimpin-pemberontakan-di-tii-di-kalimantan-selatan-?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%E2%80%93%20Ibnu%20Hadjar%20adalah,Indonesia%20(DI%2FTII))

10. Gunawan, Rimbo. Industrialisasi kehutanan dan dampaknya terhadap masyarakat adat kasus Kalimantan Timur. 1998. hal 40
11. Komunitas Nyerakat: Geliat di Tengah Gempuran Arus Modernitas - Desantara Foundation diakses pada 20 Juni 2023
12. Maimunah, Siti. Mencari Makroman di Tanah Pinjaman Perempuan Makroman di Tengah Perubahan Agraria dan Perjuangan Komunitas Menghadapi Pengerukan Batubara. Working Paper Sajogyo Institute No. 10, 2014. hal 90.
13. Studi Tentang Jenis-Jenis Bangunan Air Pada PT ITCI KARTIKA UTAMA Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Kawulur, James Karel 2002 Halaman 17.
14. Bob Hasan, the Rise of Apkindo, and the Shifting Dynamics of Control in Indonesia's Timber Sector¹ Christopher M. Barr
15. <https://www.weyerhaeuser.com/company/history/> diakses pada 19 juni 2023
16. Studi Tentang Jenis-Jenis Bangunan Air Pada PT ITCI KARTIKA UTAMA Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Kawulur, James Karel 2002 Halaman 17.
17. Kaltim Kece (2019) Mengenang kejayaan PT ITCI, perusahaan mati suri yang lokasinya menjadi Ibu Kota Negara. Diakses pada 5 Mei 2023 <https://kaltimkece.id/historia/peristiwa/mengenang-kejayaan-pt-itci-perusahaan-mati-suri-yang-lokasinya-menjadi-ibu-kota-negara>
18. Tirto (2019) Jejak bisnis angkatan darat dan adik Prabowo di Penajam Paser Utara. Diakses pada 5 Mei 2023 <https://tirto.id/jejak-bisnis-angkatan-darat-dan-adik-prabowo-di-penajam-paser-utara-ehe7>
19. JATAM (2019) .Ibu Kota Buat Siapa? Diakses pada 5 Mei 2023 <https://www.jatam.org/ibu-kota-baru-buat-siapa/>
20. Kompas (2022) Profil Sukanto Tanoto, Raja Sawit yang Beli Bekas Istana Raja Jerman diakses pada 19 Juni 2023 <https://money.kompas.com/read/2021/02/14/100200126/profil-sukanto-tanoto-raja-sawit-yang-beli-bekas-istana-raja-jerman?page=all>

21. Profil Perusahaan PT ITCI Hutani Manunggal. Diakses pada 5 Mei 2023 <https://itcihutanimanunggal.co.id>
22. Detik (2023) Investor ikn bisa dapat hbg 80 tahun kalau... Diakses pada 20 Juli 2023 <https://finance.detik.com/properti/d-6605729/investor-ikn-bisa-dapat-hgb-80-tahun-kalau>
23. CNN Indonesia(2022) JATAM: Temuan Lubang Bekas Tambang Di IKN Kini 149 diakses pada 20 Juli 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220203164809-20-754698/jatam-temuan-lubang-bekas-tambang-di-ikn-bertambah-kini-149>
24. Tempo (2023) Jokowi minta perusahaan hijaukan lagi lubang tambang di sekitar IKN. Diakses pada 20 Juli 2023 <https://nasional.tempo.co/read/1695000/jokowi-minta-perusahaan-hijaukan-lagi-lubang-tambang-di-sekitar-ikn>
- 25.Kaltim Post (2023) Wacana Legalisasi Tambang Di Bukit Tengkorang Harus Izin Otorita IKN. Diakses 20 Juli 2023 <https://kaltimpost.jawapos.com/kaltim/07/06/2023/wacana-legalisasi-tambang-di-bukit-tengkorak-harus-izin-otorita-ikn>
- 26.Laporan Progres Pelaksanaan Pembangunan IKN oleh Kementerian PUPR, per 29 Desember 2022
- 27.Bisnis.Com (2022). Otorita IKN Tegaskan Crowdfunding Itu Sah Untuk Pendanaan Ibu Kota, Baru Diakses Pada 20 Juli 2023 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220325/9/1514957/otorita-ikn-tegaskan-crowdfunding-itu-mekanisme-sah-untuk-pendanaan-ibu-kota-baru>
28. Silahkan baca buku Saksi Kunci Saksi Kunci: Kisah Nyata Perburuan Vincent, Pembocor Rahasia Pajak Asian Agri Group Penulis : Metta Darma Saputra, silahkan baca resensinya di sini : <https://www.setaranews.com/2017/03/resensi-buku-saksi-kunci-kisah-nyata.html>
- 29.DW (2021) Antara Bisnis Sukanto Tanoto dan Kerusakan Alam Indonesia. Diakses pada 14 Februari 2023. <https://www.dw.com/id/antara-bisnis-sukanto-tanoto-dan-kerusakan-alam-indonesia/a-56532913>

30. CNN Indonesia (2022) Jatam ungkap bukti lubang tambang Luhut di Kaltim : 12 di IKN. Diakses pada 14 Februari 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220207112818-20-755940/jatam-ungkap-bukti-lubang-tambang-luhut-di-kaltim-12-di-kawasan-ikn>
31. CNN Indonesia (2021) Bambang Brodjonegoro diangkat jadi komisaris toba bara. Diakses pada 14 Februari 2023 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210618091442-92-656037/bambang-brodjonegoro-diangkat-jadi-komisaris-toba-bara>
32. BBC (2018) Kasus E-KTP: Setya Novanto Dituntut 16 Tahun penjara, Denda, dan Pencabutan Hak Politik Lima Tahun. Diakses pada 14 Februari 2023 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43579739>
33. Kompas (2023) Diakses pada tanggal 08 Mei 2023 (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/tokoh/ketua-umum-partai-bulan-bintang-pbb-yusril-ihza-mahendra>)
34. International Consortium Of Investigative Journalist. Diakses pada tanggal 08 Mei 2023 <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/81226>
35. Laporan Riset lapang JATAM Kaltim, Januari - Maret 2023, Kebohongan Hijau: tentang Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki dan Keselamatan Rakyat Pada Tapak Proyek Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara (belum dipublikasikan)
36. JATAM Siaran pers, halaman 9 dan 12 (2019) Ibu Kota Negara Baru Untuk Siapa Publik atau Elit ? Diakses pada 8 Mei 2023 <https://www.jatam.org/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik-atau-elit/>
37. CNN Indonesia (2020). Gerindra Umumkan Kepengurusan Baru 2020-2025. Diakses pada 08 Mei 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200919203121-32-548459/gerindra-resmi-umumkan-kepengurusan-baru-2020-2025>
38. Kontan.Co.Id (2023). Tak Ada Perubahan Porsi Anggaran Dari APBN Untuk Pembangunan IKN. Diakses pada 14 Februari 2023 <https://nasional.kontan.co.id/news/tak-ada-perubahan-porsi-anggaran-dari-apbn-untuk-pembangunan-ikn>

39. CNN Indonesia (2023). Investor Sampaikan Surat Pernyataan Minat Investasi di IKN. Diakses pada 14 Februari 2023 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230504115153-92-945145/200-investor-sampaikan-surat-pernyataan-minat-investasi-di-ikn>
41. Laporan Progres Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR 29 Desember 2022
42. CNBC (2023). Proyek Investor Di IKN Sepi Ternyata Ini Biang Keroknya. diakses pada 14februari 2023<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230502150356-4-433762/proyek-investor-di-ikn-sepi-ternyata-ini-biang-keroknya>
43. CNN Indonesia (2022) KPA Pemberian HGB 160 tahun kepada Investor di IKN langgar UU Agraria. Diakses pada 14 Februari 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221020095931-20-863052/kpa-pemberian-hgb-160-tahun-kepada-investor-di-ikn-langgar-uu-agraria>
44. Liputan 6 (2022). Menteri Hadi Tjahjanto Tawarkan HGB Hingga 160 tahun di IKN Nusantara. Diakses pada 14 Februari 2023 <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5093390/menteri-hadi-tjahjanto-tawarkan-hgb-hingga-160-tahun-di-ikn-nusantara>
45. Ekonomi Bisnis (2023). Kado Awal Tahun Aturan Insentif IKN Segera Meluncur. Diakses pada 9 Mei 2023 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230104/45/1615006/kado-awal-tahun-aturan-insentif-ikn-segera-meluncur>
46. LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Informasi Tender (pu.go.id) diakses pada 08 Mei 2023 <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/72932064/pengumumanlelang>
47. Papan informasi proyek penanganan banjir sungai sepaku yang berada di RT 03 Kelurahan Sepaku
48. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (2023). Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Suku Balik Terhadap Pembangunan dan Menolak Pembangunan Ibu Kota Negara Baru yang Merusak. Diakses pada 9 Mei 2023 <https://aman.or.id/regional-news/pernyataan-sikap-masyarakat-adat-suku-balik-terhadap-pembangunan-dan-menolak-pembangunan-ibu-kota-negara-baru-yang-merusak>

49. Penyusunan Dokumen LARAP Bidang Jalan. Diakses pada 9 Mei 2023 <https://simantu.pu.go.id/>
50. Kompas (2022). Dicoret Dari Daftar PSN Tahun 2022. Diakses pada 9 Mei 2023 <https://www.kompas.com/properti/read/2022/08/05/113000621/dicoret-dari-daftar-psn-tahun-2022-begini-profil-bendungan-tiro-?page=all>
51. Headtopics (2022). Ratusan Warga Desa Lelong Demo Tolak Larap Bendungan Muju. Diakses pada 9 Mei 2023 <https://headtopics.com/id/ratusan-warga-desa-lelong-demo-tolak-larap-bendungan-mujur-31138773>,
52. Kabupaten Bovendigoel (2022). Masyarakat Suku Muyu Kati Menolak Bendungan Digoel. Diakses pada 9 Mei 2023. <https://bovendigoelkab.go.id/berita/masyarakat-suku-muyu-kati-menolak-bendungan-digoel>
53. JPPN NTB (2022). Larap Bendungan Muju Ditolak Ada 3 Poin Penting. Diakses 9 Mei 2023. <https://ntb.jpnn.com/ntb-terkini/3511/larap-bendungan-mujur-ditolak-ada-3-poin-penting>
54. Naladwipa Institute (2023). Kabar Keruh Dari Sungai Sepaku Penghancuran Berlapis Pada Masyarakat Suku Balik dan Ruang Hidupnya. Diakses Pada 9 Mei 2023 <https://naladwipa.or.id/essay/kabar-keruh-dari-sungai-sepaku-penghancuran-berlapis-pada-masyarakat-suku-balik-dan-ruang-hidupnya>
55. Kementerian PUPR (2023). Pasok Kebutuhan Air Baku di IKN Kementerian PUPR selesaikan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku di 2023. Diakses pada 9 Mei 2023. <https://www.pu.go.id/berita/pasok-kebutuhan-air-baku-di-ikn-kementerian-pupr-selesaikan-bendungan-sepaku-semoi-dan-intake-sepaku-di-2023>
56. Kompas (2023). Progres Bendungan Sepaku Semoi Pemasok Air ke IKN Sudah 85 persen. Diakses pada 19 Mei 2023 [https://regional.kompas.com/read/2023/02/10/205835478/progres-bendungan-sepaku-semoi-pemasok-air-ke-ikn-sudah-85-persentarget#:~:text=Sebagai%20informasi%2C%20pembangunan%20Bendungan%20Sepaku,PT.%20BRP%20\(KSO\)](https://regional.kompas.com/read/2023/02/10/205835478/progres-bendungan-sepaku-semoi-pemasok-air-ke-ikn-sudah-85-persentarget#:~:text=Sebagai%20informasi%2C%20pembangunan%20Bendungan%20Sepaku,PT.%20BRP%20(KSO))
57. LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Informasi Tender (pu.go.id) diakses pada 22 Juni 2023

58. Tempo (2023). Bendungan Bener Proyek Strategis Jokowi Pemicu Konflik di Desa Wadas. Diakses pada 20 Juni 2023 <https://nasional.tempo.co/read/1559978/bendungan-bener-proyek-strategis-jokowi-pemicu-konflik-di-desa-wadas>
59. Opendender (2023). Diakses pada 22 Juni 2023 <https://www.opentender.net/company-list/218815?name=Khalawi%20Abdul%20Hamid>
60. CNN Indonesia (2022). Video Warga Sepaku Tak Puas Dengan Kompensasi Ganti Lahan Pembangunan. Diakses pada 11 Mei 2023. <https://www.cnnindonesia.com/tv/20220130164016-405-753044/video-warga-sepaku-tak-puas-dengan-kompensasi-ganti-lahan-pembangunan> diakses pada 11 Mei 2023.
61. Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Pembangunan dan Pengoperasian Bendungan Sepaku Semoi, Tahun 2019, Halaman II-62
62. Youtube Kompas (2023). IKN Semakin Diminati. Diakses pada 22 Juni 2023 Investor. https://www.youtube.com/watch?v=PS1Bw5_jk-U
63. JATAM (2023). Megaprojek Ibukota Baru Bencana Iklim dan Masyarakat Adat. <https://www.jatam.org/megaprojek-ibukota-baru-bencana-iklim-dan-masyarakat-adat/>
64. Koran Kaltim (2021). Teken MoU Kerjasama Sulteng Kekurangan Batu Bara dan Kaltim Butuh Suplai Batu Palu. Diakses pada Juni 2023 <https://korankaltim.com/read/berita-terkini/46528/teken-mou-kerjasama-sulteng-kekurangan-batu-bara-dan-kaltim-butuh-suplai-batu-palu>
65. CNN Indonesia (2023). Ratusan Warga PPU Protes Pematokan Tanah Untuk Bandara IKN. Diakses pada 20 Juli 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230621123136-12-964695/ratusan-warga-ppu-protes-pematokan-tanah-untuk-bandara-ikn>
66. Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Pembangunan dan Pengoperasian Bendungan Sepaku Semoi, Tahun 2019, Halaman, II-7

67. Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Pembangunan dan Pengoperasian Bendungan Sepaku Semoi, Tahun 2019, Halaman II-23

68. Indoproggress (2014). Hendro Sangkoyo Kita Sekarang Berada Pada Garis Depan Kemajuan Dari Lex Mercatoria. Diakses pada 30 Mei 2023 <https://indoproggress.com/2014/10/hendro-sangkoyo-kita-sekarang-berada-pada-garis-depan-kemajuan-dari-lex-mercatoria-rezim-hukum-untuk-membela-kepentingan-dagang/>

69. Antara News (2023). Pemerintah Beri Pengurangan Pajak Ke Investor Domestik Ynag Masuk IKN diakses pada 30 Mei 2023 <https://sulteng.antaranews.com/berita/263628/pemerintah-beri-pengurangan-pajak-ke-investor-domestik-yang-masuk-ikn>

70. Kompas TV (2023). Proyek IKN Pakai Pekerja Asing Luhut Bangsa Kita Tidak Bisa Kualitasnya Kurang Bagus. Diakses pada 20 Juli 2023 <https://www.kompas.tv/regional/416551/proyek-ikn-pakai-pekerja-asing-luhut-bangsa-kita-tidak-bisa-kualitasnya-kurang-bagus>

71. 13 Pekerja Konstruksi di IKN Pulang karena Diupah Rp80.000 Sehari, Ini Kata Badan Otorita (inews.id) diakses pada 20 Juli 2023. <https://www.inews.id/finance/bisnis/13-pekerja-konstruksi-di-ikn-pulang-karena-diupah-rp80000-sehari-ini-kata-badan-otorita>

72. Ketar-ketir Masyarakat Adat Tersingkir dari Ibu Kota Nusantara (cnnindonesia.com) diakses pada 25 Juli 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220311093629-20-769765/ketar-ketir-masyarakat-adat-tersingkir-dari-ibu-kota-nusantara>

73. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ibu Kota Negara

74. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-035527-5724.pdf>

75. Ekonomi Bisnis (2023). Revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN Pembiayaan APBN Cuma 20 Persen. Diakses pada 23 Juli 2023 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230206/9/1625231/revisi-uu-no-32022-tentang-ikn-pembiayaan-apbn-cuma-20-persen>

Tim Penyusun

Jaringan Advokasi Tambang adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, dan lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas.

Dalam prosesnya penelitian ini juga bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak (PuSHPA) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Bersihkan Indonesia.

Proses penyuntingan juga dilakukan oleh banyak pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu . Begitu juga dukungan dari Both Ends yang memiliki cita -cita yang sama dengan maksud yang diusung dalam penelitian ini, dimana hak-hak dan suara masyarakat adat dapat didengar dan menggaung ke seluruh penjuru dunia.

Tentang Judul

Buku atau hasil riset ini diberi judul Nyapu ; Bagaimana Perempuan dan Masyarakat Adat Balik Mengalami Kehilangan, Derita dan Kerusakan Berlapis Akibat Megaproyek Ibu Kota Baru Indonesia. Nyapu sendiri berasal dari bahasa suku Balik yang berarti Hilangnya Kehidupan, yang diusulkan oleh teman-teman Masyarakat Adat Balik di Sepaku.

Diterbitkan oleh

JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM) KALIMANTAN TIMUR,
2023



website : www.jatam.org



[jatam_kaltim](https://www.instagram.com/jatam_kaltim)



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK

**#BERSIHKAN
INDONESIA**



PUSHPA
(Pusat Studi Hukum Perempuan Dan Anak)
Fakultas Hukum - Universitas Mulawarman